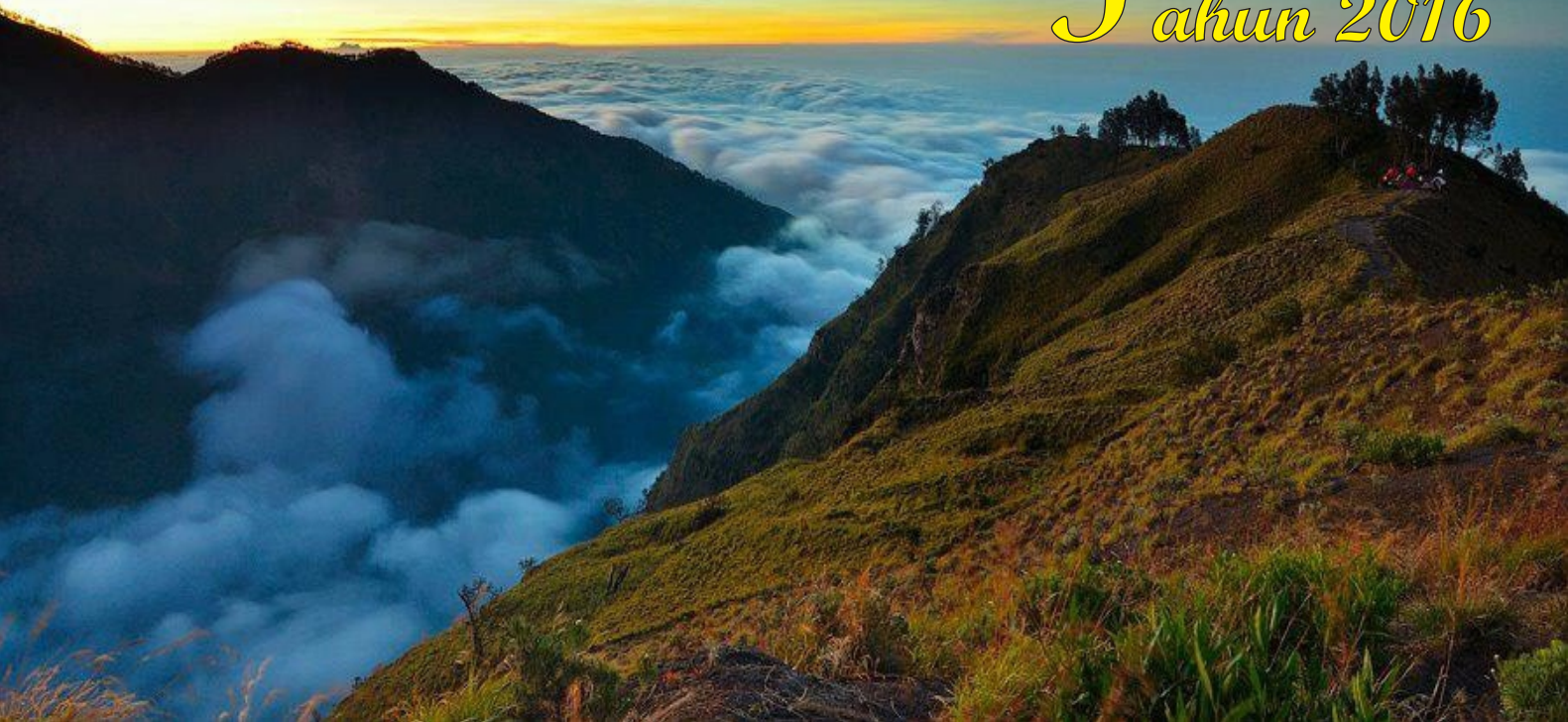


LAPORAN CAPAIAN RENJA 2016 dan PROGRES CAPAIAN RENSTRA 2015-2019 Setditjen KSDAE

Tahun 2016



KATA PENGANTAR



Laporan Capaian Renja Tahun 2016 dan Progres Capaian Renstra 2015-2016 Sekretariat Ditjen (Setditjen) KSDAE Tahun 2016 disusun dalam rangka evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan bidang KSDAE tahun 2016 sebagaimana telah tertuang dalam Dokumen Rencana Kerja Setditjen KSDAE Tahun 2016 dan merupakan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran selama tahun yang bersangkutan. Laporan Capaian Renja Tahun 2016 dan Progress Capaian Renstra 2015-2016 ini juga menyajikan informasi terkait pelaksanaan kegiatan oleh masing-masing Bagian dan Subbagian lingkup Setditjen KSDAE selama periode Januari - Desember 2016.

Pada kesempatan ini tidak lupa kami sampaikan penghargaan kepada seluruh pegawai lingkup Setditjen KSDAE dan semua pihak yang peduli dan turut berperan serta dalam terwujudnya pelaksanaan Tupoksi Setditjen KSDAE. Di samping itu, kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga Laporan Capaian Renja Setditjen KSDAE Tahun 2016 ini dapat tersusun dengan baik.

Semoga laporan ini dapat memberikan gambaran atas pelaksanaan tugas kesekretariatan dan dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan perencanaan dalam rangka peningkatan kinerja Setditjen KSDAE di masa yang akan datang.

Jakarta, 26 Januari 2017
Sekretaris Direktorat Jenderal
Konservasi Sumberdaya Alam dan
Ekosistem,



Ir. Herry Subagiadi, M.Sc
NIP. 19611115 198703 1 001

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUGAS DAN FUNGSI	1
C. STRUKTUR ORGANISASI	2
BAB II. RENCANA KERJA TAHUN 2016	9
A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019	9
B. RENCANA KERJA TAHUN 2016	12
C. RENCANA ANGGARAN	15
BAB III. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016	19
A. CAPAIAN PELAKSANAAN KINERJA KEGIATAN	19
B. CAPAIAN RENSTRA 2015-2019 SAMPAI DENGAN TAHUN 2016	86
LAMPIRAN	98

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Distribusi Pegawai Negeri Sipil Per Bagian Setditjen KSDAE Tahun 2016-----	4
Tabel 2. Distribusi Pegawai Negeri Sipil Per Golongan Setditjen KSDAE Tahun 2016 -----	4
Tabel 3. Rekapitulasi Pegawai Setditjen KSDAE Berdasarkan Tingkat Pendidikan-----	5
Tabel 4. Perkembangan Pegawai Berdasarkan Umur Lingkup Setditjen KSDAE -----	6
Tabel 5. Perbandingan Nilai Aset Setditjen KSDAE 2011-2016-----	8
Tabel 6. Target IKK Nilai Sakip Ditjen KSDAE 2015-2019 -----	10
Tabel 7. Rencana Anggaran Per Output Kegiatan Setditjen KSDAE Tahun 2016 -----	15
Tabel 8. Alokasi Anggaran Setditjen KSDAE Tahun 2016-----	16
Tabel 9. Alokasi Anggaran Per Bagian Non Gaji Lingkup Setditjen KSDAE Tahun 2016 -----	17
Tabel 10. Alokasi Anggaran Per Jenis Belanja Setditjen KSDAE 2016 -----	18
Tabel 11. Daftar Standar Kegiatan dan Biaya Bidang KSDAE Tahun 2017 -----	22
Tabel 12. Nilai LKj 5 UPT Terbaik tahun 2015 -----	34
Tabel 13. Nilai LKj 5 UPT dengan nilai kurang baik -----	35
Tabel 14. Penelaahan Proposal Perjanjian Kerjasama -----	57
Tabel 15. Rekapitan Data yang telah dipantau dan dievaluasi-----	59
Tabel 16. Tabel Koordinasi Kerjasama BBTNGGP dengan PT Lido -----	61
Tabel 17. Rekapitulasi Penanganan Perkara Perdata dan TUN tahun 2016-----	67
Tabel 18. Rekapitulasi perizinan yang diproses tahun 2016 -----	70
Tabel 19. Nilai SAKIP Ditjen PHKA (KSDAE) Tahun 2012-2016-----	86
Tabel 20. Alokasi Nilai Setiap Komponen dan Sub Komponen-----	87
Tabel 21. Kategori Nilai Hasil Akhir Penilaian -----	87
Tabel 22. Pagu Setditjen KSDAE Tahun 2016 Berdasarkan Sumber Dana-----	90
Tabel 23. Pagu Setditjen KSDAE Tahun 2016 Berdasarkan Jenis Belanja -----	91
Tabel 24. Pagu Setditjen KSDAE Tahun 2016 Berdasarkan Output -----	91
Tabel 25. Alokasi Anggaran Per Bagian Lingkup Setditjen KSDAE -----	92
Tabel 26. Realisasi Setditjen KSDAE Tahun 2016 Berdasarkan Sumber Dana -----	92
Tabel 27. Realisasi Setditjen KSDAE Tahun 2016 Berdasarkan Jenis Belanja -----	93
Tabel 28. Realisasi Setditjen KSDAE Tahun 2016 Berdasarkan Output-----	93
Tabel 29. Realisasi Per Bagian Lingkup Setditjen KSDAE Tahun 2016 -----	93
Tabel 30. Realisasi Per Sub Bagian Lingkup Setditjen KSDAE Tahun 2016 -----	94
Tabel 31. Realisasi Setditjen KSDAE Tahun 2016 Dengan Pagu Setelah <i>Self Blocking</i> Per Jenis Belanja	95
Tabel 32. Realisasi Setditjen KSDAE Tahun 2016 Dengan Pagu Setelah <i>Self Blocking</i> -----	95
Tabel 33. Realisasi Setditjen KSDAE Tahun 2016 Dengan Pagu Setelah <i>Self Blocking</i> Per Output -----	95
Tabel 34. Realisasi Setditjen KSDAE Tahun 2016 Dengan Pagu Setelah <i>Self Blocking</i> Per Bagian -----	96
Tabel 35. Realisasi Setditjen KSDAE Tahun 2016 Dengan Pagu Setelah <i>Self Blocking</i> Per Bagian -----	96
Tabel 36. Pagu dan Realisasi Setditjen KSDAE Tahun 2012-2016 -----	97

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Setditjen KSDAE berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.18/MENLHK-II/2015.	3
Gambar 2. Grafik Distribusi Persentase Pegawai Per Bagian Lingkup Setditjen KSDAE	4
Gambar 3. Grafik Distribusi Persentase Pegawai Per Golongan Setditjen KSDAE Tahun 2016	5
Gambar 4. Grafik Distribusi Persentase Pegawai Setditjen KSDAE Tahun 2016	6
Gambar 5. Diagram Prosentase Sebaran Pegawai menurut Usia tahun 2016 Lingkup	7
Gambar 6. Diagram Perbandingan Alokasi Anggaran Setditjen KSDAE Tahun 2016	17
Gambar 7. Perbandingan Data Belanja Non Operasional Pada setiap Bagian	18
Gambar 8. Cover Buku Rencana Kerja Ditjen KSDAE Tahun 2017	19
Gambar 9. Cover Buku Rencana Kerja Setditjen KSDAE Tahun 2017	20
Gambar 10. Laporan Kegiatan Kelompok Kerja Program dan Anggaran Bidang KSDAE	21
Gambar 11. Cover Juknis Penyusunan RKA Bidang KSDAE Tahun 2017	21
Gambar 12. Cover SKB Bidang KSDAE Tahun 2017	22
Gambar 13. Cover Perjanjian Kinerja Lingkup Ditjen KSDAE Tahun 2016	23
Gambar 14. Pembahasan Anggaran Bidang KSDAE Tahun 2017 di DPR RI	23
Gambar 15. Kegiatan Pra-Rakornis Tahun 2016 Regional Sumatera	24
Gambar 16. Foto-foto Kegiatan Rapat Koordinasi Teknis Bidang KSDAE Tahun 2016	24
Gambar 17. Foto-foto Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran	25
Gambar 18. Foto-foto Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2017 Bidang KSDAE Wilayah Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Papua	26
Gambar 19. Foto-foto Kegiatan Pemantapan Penyusunan RKA KL	26
Gambar 20. Cover LKj Ditjen KSDAE dan cover LKj Setditjen KSDAE Tahun 2015	27
Gambar 21. Cover LCR Ditjen KSDAE dan Cover LCR Setditjen KSDAE Tahun 2015	28
Gambar 22. Perbandingan Nilai SAKIP Ditjen KSDAE 2012-2016	29
Gambar 23. Rapat Hasil Penilaian SAKIP Ditjen KSDAE oleh Inspektorat Jenderal Kementerian LHK	29
Gambar 24. Printscreen Pelaporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2016 dalam aplikasi	30
Gambar 25. Peserta Rakor Evaluasi Kinerja Ditjen KSDAE	32
Gambar 26. Output Kegiatan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan UPT Tahun 2016	34
Gambar 27. Penilaian Review LKj UPT Tahun 2016	35
Gambar 28. Hasil Reviu Laporan Kinerja tahun 2016	36
Gambar 29. Cover Buku Statistik Direktorat Jenderal Tahun 2015	36
Gambar 30. Cover Buku Statistik Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE	37
Gambar 31. Halaman depan WEBSITE SIDAK KSDAE	38
Gambar 32. Rekonsiliasi Pendataan Bidang KSDAE Tahun 2016	39
Gambar 33. Halaman Muka WEBSITE Ditjen KSDAE	40
Gambar 34. Cover Buku Sejarah 5 Taman Nasional Pertama	40
Gambar 35. Contoh Personal use untuk bahan informasi Pembangunan LHK	41
Gambar 36. Wokrshop Penyelesaian Masalah Strategis bidang KSDAE	42
Gambar 37. Serah Terima Jabatan Struktural Lingkup Ditjen KSDAE	44

Gambar 38. Kegiatan Penyegaran Operator SIMPEG Tahun 2016	47
Gambar 39. Kegiatan Penilaian DUPAK	49
Gambar 40. Kegiatan Pembinaan Jabatan Fungsional	49
Gambar 41. Kegiatan Penunjang Pengembangan Fungsional UPT	50
Gambar 42. Pembinaan Pegawai Lingkup Setditjen KSDAE Tahun 2016	51
Gambar 43. Pembahasan Penyusunan Analisis Jabatan	52
Gambar 44. Kegiatan rapat pembahasana Penataan Organisasi	54
Gambar 45. Rapat Pembahasan dan Kunjungan ke Lapangan Tata Hubungan Kerja	55
Gambar 46. Pembahasan Draf Pedoman Evaluasi Kinerja Organisasi	56
Gambar 47. Cover Buku Draft Peraturan Dirjen KSDAE tentang Pedoman Evaluasi	56
Gambar 48. Kegiatan Penelaahan Proposal dan Perjanjian Kerjasama	58
Gambar 49. Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi di Yayasan BOS, Kalimantan Timur	60
Gambar 50. Rapat pembahasan koordinasi dengan mitra kerjasama	62
Gambar 51. Rapat Kelompok Kerja Mitra Kerjasama	63
Gambar 52. Fasilitasi dengan Instansi Terkait	63
Gambar 53. Rapat pembahasan penyusunan data base kerjasama	64
Gambar 54. Tata Cara Kerjasama dalam rangka Pembangunan Strategis yang Tidak Dapat Dielakkan	65
Gambar 55. Konsultasi Publik di UPT regional Papua, Kalimantan dan Bali	66
Gambar 56. Pelaksanaan sidang Setempat di Taman Nasional Komodo dan	68
Gambar 57. Tim Kuasa Hukum Kemen LHK dalam penanganan perkara perdata	68
Gambar 58. Rapat pembahasan permasalahan pemanfaatan jasa lingkungan panas	69
Gambar 59. Rapat pembahasan kasus perambahan di TWA. Pantai Panjang	69
Gambar 60. Rapat koordinasi pengembangan pariwisata alam di TWA. Kawah Ijen	69
Gambar 61. Rapat Koordinasi refitalisasi Lembaga Konservasi	70
Gambar 62. Monitoring penangkaran koral/karang hias di Bayuwangi	71
Gambar 63. Monitoring dan evaluasi Lembaga Konservasi Kebun Binatang Bandung	71
Gambar 64. Peninjauan lokasi pengembangan pariwisata alam di TN. Bali Barat	71
Gambar 65. Sosialisasi dan pembinaan hukum pemanfaatan TSL dan	72
Gambar 66. Pelepasliaran Burung Jalak Bali di TN. Bali Barat bersama pejabat pemda	72
Gambar 67. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Ditjen KSDAE Tahun 2015	73
Gambar 68. Foto Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Ditjen KSDAE Semester I	74
Gambar 69. Pembinaan Pengelolaan PNBK bidang KSDAE	75
Gambar 70. Kegiatan Pembinaan Keuangan di UPT	75
Gambar 71. Presentasi hasil Upgrade Aplikasi Database LHA	77
Gambar 72. Kegiatan Menghadiri Diseminasi Hibah Lingkup Kementerian	77
Gambar 73. Log in Sistem Informasi Kearsipan	85
Gambar 74. Salah satu menu dalam Sistem Informasi Kearsipan	85
Gambar 75. Peningkatan Nilai SAKIP Ditjen PHKA (KSDAE) Tahun 2012-2016	86
Gambar 76. Persentase Alokasi Pagu Setditjen KSDAE Per Sumber Dana	90
Gambar 77. Persentase Alokasi Pagu Setditjen KSDAE Per Jenis Belanja	91
Gambar 78. Persentase Alokasi Pagu Setditjen KSDAE Per Jenis Belanja	92
Gambar 79. Perbandingan Persentase Realisasi Anggaran Setditjen KSDAE Tahun 2012-2016	97

BAB I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan sebagian tugas Sekretaris Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Setditjen KSDAE) ditujukan untuk mendukung pencapaian visi Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Ditjen KSDAE). Sebagian tugas tersebut berkaitan dengan koordinasi tugas dan dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Ditjen KSDAE.

Setditjen KSDAE berupaya untuk melaksanakan seluruh tugas dan kegiatannya sesuai dengan Tugas Pokok Fungsi (TUPOKSI) dan rencana kerja yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, kegiatan dan anggaran perlu direncanakan secara rasional dan matang. Sebagai upaya pelaksanaan komitmen kinerja yang harus dicapai, rencana kegiatan Setditjen KSDAE telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Setditjen KSDAE Tahun 2015-2019 yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja). Guna memberikan panduan dan arah pelaksanaan kegiatan lingkup Setditjen KSDAE selama tahun 2015, maka disusun Rencana Kerja (Renja) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Sekretaris Ditjen KSDAE Nomor: P.7/Set-1/2015 tanggal 30 November 2015. Guna mengetahui pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016, maka perlu disusun sebuah laporan yang menggambarkan hasil capaian pelaksanaan anggaran dan kegiatan Setditjen KSDAE dalam satu tahun anggaran dalam bentuk Laporan Capaian Renja 2016 dan Progres Capaian Renstra 2015-2019 Sampai Dengan Tahun 2016 Setditjen KSDAE.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Kelembagaan

Dalam mencapai tujuan dan sasaran dari program Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem maka sesuai Peraturan Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan Nomor: P.18/MENLHK-II/2015 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Ditjen KSDAE adalah sebagai berikut :

a. Kedudukan

Sekretariat Ditjen KSDAE dipimpin oleh Sekretaris Ditjen KSDAE yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal KSDAE.

b. Tugas Pokok dan Fungsi Per Bagian Lingkup Setditjen KSDAE

Berdasarkan Pasal 269 dan 270 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Setditjen KSDAE mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Setditjen KSDAE menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Koordinasi dan penyusunan rencana, program, kerja sama teknik, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja konservasi sumber daya alam dan ekosistem;
- 2) Koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data dan pengolahan

- sistem informasi konservasi sumber daya alam dan ekosistem;
- 3) Koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana konservasi sumber daya alam dan ekosistem;
 - 4) Koordinasi dan penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan dan telaahan peraturan perundang-undang, serta pemberian pertimbangan dan advokasi hukum konservasi sumber daya alam dan ekosistem; dan
 - 5) Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Direktorat Jenderal.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Setditjen KSDAE terdiri dari :

- 1) Bagian Program dan Evaluasi;
- 2) Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana;
- 3) Bagian Keuangan dan Umum; dan
- 4) Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik.

Sesuai dengan fungsi yang diemban, Setditjen KSDAE terdiri dari empat bagian dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Bagian Program dan Evaluasi

Tugas Bagian Program dan Evaluasi adalah melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan rencana, program dan anggaran, data, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan manajemen informasi dan kehumasan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bagian Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran;
- b) Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan kinerja rencana, program dan anggaran, penyusunan statistik Direktorat Jenderal;
- c) Penyiapan bahan pengelolaan sistem informasi dan kehumasan.

2. Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

Tugas Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana adalah melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, pengembangan pegawai dan administrasi jabatan fungsional, serta penyiapan bahan penyusunan organisasi dan ketatalaksanaan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a) Pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian;
- b) Pelaksanaan urusan pengembangan karir pegawai dan administrasi jabatan fungsional; dan
- c) Penyiapan bahan penyusunan organisasi dan ketatalaksanaan.

3. Bagian Keuangan dan Umum

Tugas Bagian Keuangan dan Umum adalah melaksanakan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kearsipan dan pengelolaan urusan keuangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bagian Keuangan dan Umum menyelenggarakan fungsi:

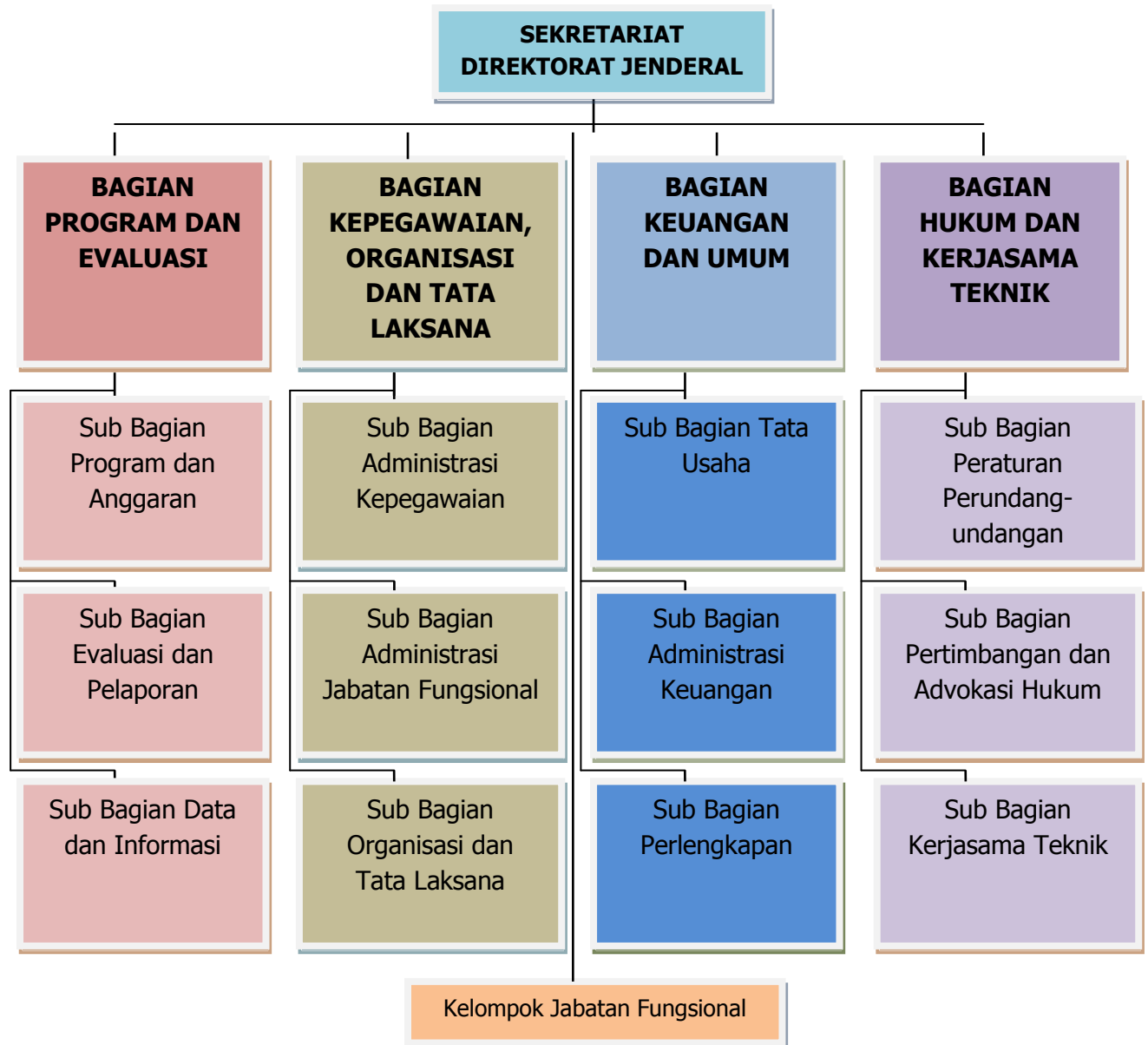
- a) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga, kearsipan dan pengelolaan barang milik negara;
- b) Pelaksanaan urusan administrasi keuangan; dan
- c) Pelaksanaan urusan perlengkapan.

4. Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik

Tugas Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik adalah melaksanakan penyusunan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, penelaahan permasalahan, pertimbangan, advokasi hukum, serta penyusunan bahan administrasi kerjasama teknik dalam negeri dan luar negeri. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- Penyiapan bahan peraturan perundang-undangan;
- Penyiapan bahan pertimbangan dan advokasi hukum; dan
- Penyiapan bahan administrasi kerja sama teknik dalam negeri dan luar negeri.

Struktur Organisasi Setditjen KSDAE disajikan pada Gambar berikut :



Gambar 1. Struktur Organisasi Setditjen KSDAE berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.18/MENLHK-II/2015.

a. Sumber Daya Manusia

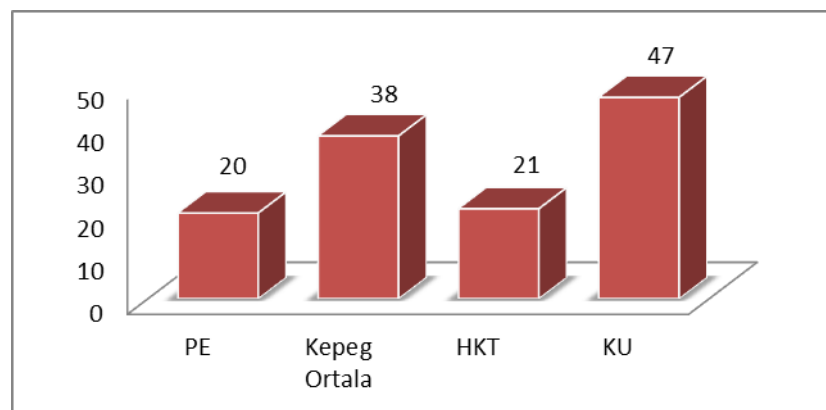
Sesuai dengan formasi jabatan yang tersedia, dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, pada tahun 2016 Setditjen KSDAE memiliki pegawai sebanyak 126 orang, dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 1. Distribusi Pegawai Negeri Sipil Per Bagian Setditjen KSDAE Tahun 2016

No.	Bagian	Sumber Daya	%
1	Program dan Evaluasi	20	15,87
2	Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana	38	30,16
3	Hukum dan Kerjasama Teknik	21	16,67
4	Keuangan dan Umum	47	37,30
	JUMLAH	126	100.00

Sumber: *Bagian Kepegawaian dan Ortala, 2016*

Jika dilihat dari tabel di atas, sebaran pegawai yang terbanyak terdapat di Bagian Keuangan dan Umum yaitu 47 orang (37,30%). Jumlah total pegawai pada tabel di atas merupakan pegawai negeri sipil lingkup Setditjen KSDAE. Di samping itu, terdapat pegawai yang berstatus pegawai harian lepas yang berada di lingkup Setditjen KSDAE dengan jumlah keseluruhan mencapai 40 orang. Adanya pegawai berstatus pegawai harian lepas adalah untuk menutupi kebutuhan kekurangan pegawai yang sebagian besar adalah pramu kantor dan pengaman kantor meskipun terdapat beberapa pegawai harian lepas yang memiliki jabatan tertentu selain pramu kantor dan pengaman kantor. Distribusi pegawai Per Bagian disajikan dalam grafik berikut.



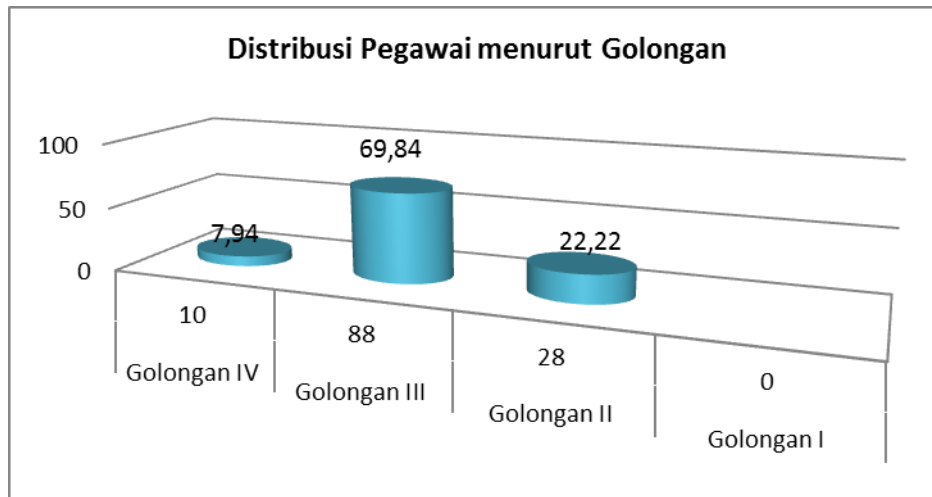
Gambar 2. Grafik Distribusi Persentase Pegawai Per Bagian Lingkup Setditjen KSDAE Tahun 2016

Untuk sebaran pegawai Setditjen KSDAE berdasarkan golongan sampai dengan tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. Distribusi Pegawai Negeri Sipil Per Golongan Setditjen KSDAE Tahun 2016

No.	Golongan	Jumlah	Persentase (%)
1	Golongan IV	10	7,94
2	Golongan III	88	69,84
3	Golongan II	28	22,22
4	Golongan I	-	
	JUMLAH	126	100.00

Sumber: *Bagian Kepegawaian dan Ortala, 2016*



Gambar 3. Grafik Distribusi Persentase Pegawai Per Golongan Setditjen KSDAE Tahun 2016

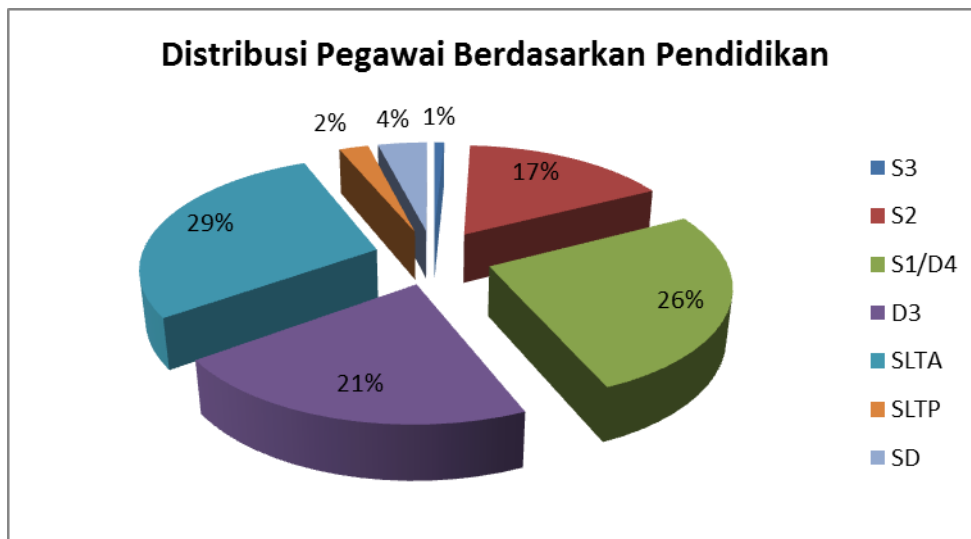
Bila dilihat dari grafik di atas, komposisi pegawai Setditjen KSDAE paling banyak adalah golongan III yaitu sebanyak 88 orang (69,84%), terbanyak kedua adalah Golongan II yaitu sebanyak 28 orang (22,22%) dan golongan IV yaitu 10 orang (7,94%). Untuk tingkat pendidikan para pegawai Setditjen KSDAE bervariasi hampir merata yang terbagi menjadi 7 tingkatan mulai lulusan sekolah dasar (SD) hingga lulusan strata tiga (S3). Rekapitulasi pegawai berdasarkan pendidikan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3. Rekapitulasi Pegawai Setditjen KSDAE Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2016

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	S3	1	0,79
2	S2	21	16,67
3	S1/D4	33	26,19
4	D3	27	21,43
5	SLTA	36	28,57
6	SLTP	3	2,38
7	SD	5	3,97
JUMLAH		126	100,00

Sumber : Bagian Kepegawaian dan Ortala, 2016

Distribusi pegawai lingkup Setditjen KSDAE berdasarkan tingkat pendidikan disajikan dalam gambar berikut.



Data per 31 Desember 2016

Gambar 4. Grafik Distribusi Persentase Pegawai Setditjen KSDAE Tahun 2016 Berdasarkan Pendidikan

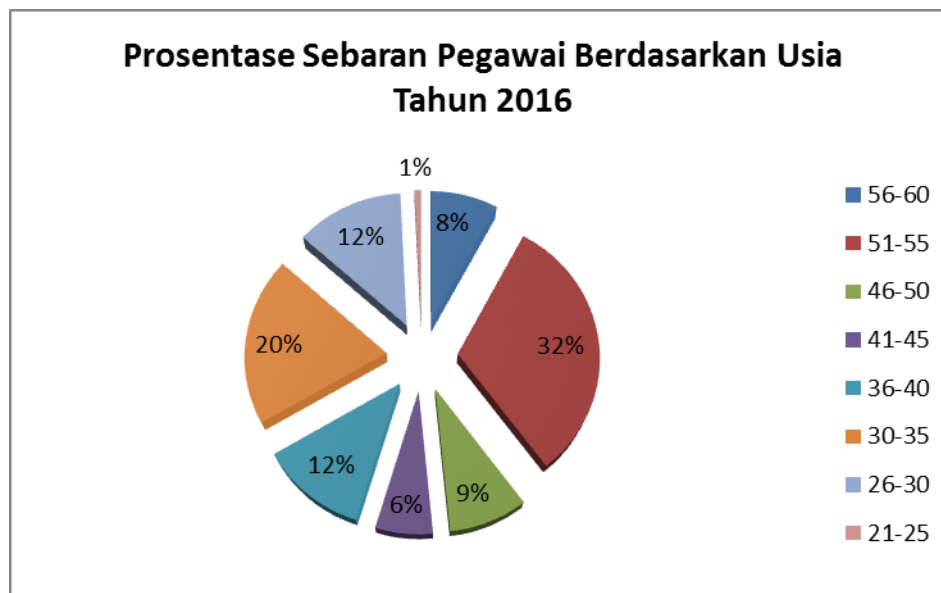
Bila dilihat dari tabel dan grafik diatas, sebaran pegawai Setditjen KSDAE terbanyak berada pada tingkat pendidikan SLTA yaitu sebanyak 36 orang (28,57%) dan tingkat pendidikan paling sedikit yaitu S3 sebanyak 1 orang (0,79%)

Untuk mengetahui komposisi pegawai Setditjen KSDAE dari segi umur, telah dibuat delapan kelompok usia. Kelompok 1 bagi mereka yang hampir memasuki usia pensiun (usia 56-60 tahun) sampai dengan kelompok 8 bagi mereka yang masih muda atau pegawai baru masuk (usia 21-25 tahun). Dalam lima tahun terakhir ini dapat dilihat sebaran pegawai Setditjen KSDAE berdasarkan kategori usia yang relatif bervariasi sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 4. Perkembangan Pegawai Berdasarkan Umur Lingkup Setditjen KSDAE Tahun 2011-2016

No.	Usia	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	56-60	1	1	3	6	10	10
2	51-55	28	28	38	42	38	40
3	46-50	47	47	34	29	16	11
4	41-45	10	10	6	10	10	8
5	36-40	17	17	18	14	12	15
6	30-35	11	11	17	21	23	25
7	26-30	20	20	29	35	24	16
8	21-25	6	6	0	0	2	1
JUMLAH		145	145	145	157	135	126

Sumber: Bagian Kepegawaian dan Ortala, 2016



Gambar 5. Diagram Prosentase Sebaran Pegawai menurut Usia tahun 2016 Lingkup Ditjen KSDAE

Jika dilihat dari grafik dan tabel di atas, bahwa jumlah pegawai Setditjen KSDAE pada tahun 2016 berkurang bila dibandingkan dengan tahun 2015 sebanyak 8 pegawai. Pengurangan jumlah pegawai ini dikarenakan adanya mutasi dan promosi ke eselon satu lainnya dan pegawai yang memasuki purna tugas.

b. Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan tugasnya Setditjen KSDAE secara bertahap melakukan pengelolaan sarana dan prasarana. Aset atau Barang Milik Negara (BMN) Intrakomptabel yang dikelola oleh Setditjen KSDAE per 31 Desember 2016 mencapai Rp. **52.236.780.099,-**.

Secara lebih rinci BMN Intrakomptabel Setditjen KSDAE tahun 2016 terdiri atas:

1. Aset Lancar

Aset lancar adalah aset yang diharapkan untuk segera direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Adapun nilai aset lancar Setditjen KSDAE per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 432.883.864,-.

2. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum berupa tanah, gedung/bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya. Adapun nilai aset tetap Setditjen KSDAE per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 50.879.620.235,-.

3. Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar dan aset tetap yang berupa aset tak berwujud, aset lain-lain dan aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan. Adapun nilai aset lainnya Setditjen KSDAE per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 924.276.000,-.

Tabel 5. Perbandingan Nilai Aset Setditjen KSDAE 2011-2016

No.	Tahun	Aset Lancar (Rp.)	Aset Tetap (Rp.)	Aset Lain-lain (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1	2011	568.609.455	69.092.440.617	113.611,000	69.774.661.072
2	2012	457.824.372	66.820.918.217	57.805,000	67.336.547.589
3	2013	689.187.391	38.158.118.975	57.805,000	38.905.111.366
4	2014	441.491.760	22.438.820.541	106.733.572	22.987.045.873
5	2015	1.658.780.040	92.553.998.679	1.166.174.300	95.378.953.019
6	2016	432.883.864	50.879.620.235	924.276.000	52.236.780.099

Sumber: Bagian Keuangan dan Umum, 31 Desember 2016

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa secara total nilai aset Setditjen KSDAE turun sebesar 25,14% dari 2011 sampai 2016. Penurunan paling besar terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp. 43.142.172.920. Dari nilai aset sebesar Rp. 95.378.953.019,- pada tahun 2015 menjadi Rp. 52.236.780.099,- pada tahun 2016.

Hal ini terjadi karena pada Tahun 2015 DIPA Setditjen KSDAE meliputi 6 (enam) sub Satker yaitu Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam, Direktorat Kawasan Konservasi, Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati, Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi dan Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial serta Sekretariat Direktorat Jenderal sendiri, sehingga asetnya pun seluruhnya tercatat sebagai aset Setditjen KSDAE.

Sedangkan pada Tahun 2016, masing-masing sub Satker tersebut kembali menjadi Satker dan anggaran DIPA tersendiri, sehingga aset yang ada pada Setditjen KSDAE juga ditransfer kembali ke masing-masing satker tersebut.

Selain adanya transfer kembali, penurunan nilai aset tahun 2016 pada Setditjen KSDAE juga terjadi karena adanya penghapusan terhadap kendaraan dinas yang meliputi 7 (tujuh) unit kendaraan roda empat dan 5 (lima) unit kendaraan roda dua.

BAB II. RENCANA KERJA TAHUN 2016

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019

Pengelolaan konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya dapat tergambar dalam bentuk hadirnya visi dan misi berikut sasaran strategis yang akan mengarahkan kebijakan prioritas, program dan kegiatan pembangunan kehutanan di bidang KSDAE dalam lima tahun kedepan oleh Setditjen KSDAE, sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal KSDAE Nomor: P.6/Set-1/2015 tentang Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2015-2019.

1. Visi

Visi yang ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia untuk tahun 2015-2019 adalah “Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”.

2. Misi

Misi yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi tersebut adalah :

- a. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
- b. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan dan demokratis berlandaskan negara hukum;
- c. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai Negara maritim;
- d. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
- e. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing;
- f. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; serta
- g. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

3. Tujuan

Berdasarkan misi tersebut maka Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merumuskan tujuan pembangunan tahun 2015-2019, yaitu memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumberdaya berada rentang populasi yang aman, serta secara paralel meningkatkan kemampuan sumberdaya alam untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional.

4. Sasaran

Sasaran strategis tahun 2015-2019 untuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah sebagai berikut :

- a. Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat, dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada pada kisaran 66,5 - 68,6, angka pada tahun 2013 sebesar 63,12. Anasir utama pembangun dari besarnya indeks ini yang akan ditangani, yaitu air, udara dan tutupan hutan;
- b. Memanfaatkan potensi sumberdaya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, dengan

indikator kinerja peningkatan kontribusi Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup terhadap devisa dan PNPB. Komponen pengungkit yang akan ditangani yaitu produksi hasil hutan, baik kayu maupun non kayu (termasuk tumbuhan dan satwa liar) dan ekspor; dan,

- c. Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, dengan indikator kinerja derajat keberfungsian ekosistem meningkat setiap tahun. Kinerja ini merupakan agregasi berbagai penanda (penurunan jumlah hotspot kebakaran hutan dan lahan, peningkatan populasi spesies terancam punah, peningkatan kawasan ekosistem esensial yang dikelola oleh para pihak, penurunan konsumsi bahan perusak ozon, dan lain-lain).

Sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut kemudian diturunkan pada sasaran program di setiap Eselon I. Direktorat Jenderal KSDAE akan berperan dalam mewujudkan dua sasaran strategis, yaitu: (1) Memanfaatkan potensi Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan (sasaran strategis kedua); serta (2) Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan (sasaran strategis ketiga).

Sasaran program tersebut diturunkan pada masing-masing sasaran kegiatan di Eselon II, dan sasaran kegiatan untuk Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal KSDAE dengan penanggung jawab kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem adalah ***Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE.***

5. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

Indikator Kinerja Kegiatan Setditjen KSDAE adalah Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDAE minimal 78,00 poin.

Tabel 6. Target IKK Nilai Sakip Ditjen KSDAE 2015-2019

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja Kegiatan				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDAE minimal 78,00	77,00	77,25	77,50	77,75	78,00

6. Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja

Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan Program Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistem adalah peningkatan efektivitas pengelolaan hutan konservasi dan konservasi keanekaragaman hayati untuk pemanfaatan yang berkelanjutan bagi kepentingan ekonomi, sosial dan ekologi. Untuk memetakan keterkaitannya dengan sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka rumusan sasaran Program Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem disesuaikan menjadi:

- 1) Peningkatan efektivitas pengelolaan hutan konservasi dan upaya konservasi keanekaragaman hayati; serta
- 2) peningkatan penerimaan devisa dan PNPB dari pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati.

Upaya pencapaian sasaran Program Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistem, serta pencapaian indikator kinerja programnya akan dilaksanakan melalui delapan kegiatan, yaitu:

- 1) Kegiatan Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam;
- 2) Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi;

- 3) Kegiatan Konservasi Spesies dan Genetik;
- 4) Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi;
- 5) Kegiatan Pembinaan Konservasi Kawasan Ekosistem Esensial;
- 6) Kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati;
- 7) Kegiatan Pengelolaan Taman Nasional; serta
- 8) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal KSDAE.

Salah satu upaya pencapaian sasaran Program Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistem, serta pencapaian indikator kinerja programnya adalah Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal KSDAE yang tanggung jawab pelaksanaannya ada di dalam Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE. Penyusunan kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen KSDAE didasarkan atas tugas dan fungsi Sekretariat yang meliputi Penyusunan Program dan Anggaran; Evaluasi dan Pelaporan; Data dan Informasi; Kerjasama dan Kemitraan; Administrasi Kepegawaian; Administrasi Jabatan Fungsional; Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia; Pengembangan Organisasi dan Ketatalaksanaan; Administrasi Keuangan; Pengembangan Sarana dan Prasarana; Penyusunan Rancangan Peraturan Perundangan; dan Bantuan Penanganan Perkara berdasarkan keperluan untuk mendukung terwujudnya Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDAE minimal 78,00 poin pada Tahun 2019.

Oleh karena itu pengembangan kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal (Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Ditjen KSDAE) didasarkan prioritas Bagian dan Sub Bagian yang ditampung dalam komponen kegiatan yaitu :

1. Komponen untuk Bagian Program dan Evaluasi
Komponen kegiatan pada Bagian Program dan Evaluasi terdiri dari:
 - a) Penyusunan Program dan Anggaran Pembangunan bidang KSDAE,
 - b) Pengelolaan Data dan informasi,
 - c) Monitoring dan Evaluasi pembangunan bidang KSDAE.
2. Komponen untuk Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana
Komponen kegiatan pada Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana terdiri dari :
 - a) Pembinaan Administrasi pengelolaan kepegawaian,
 - b) Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional,
 - c) Analisis/pengkajian, pengembangan organisasi dan tatalaksana.
3. Komponen untuk Bagian Administrasi Keuangan dan Umum
Komponen kegiatan pada Bagian Administrasi Keuangan dan Umum terdiri dari:
 - a) Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan,
 - b) Pengadaan dan perawatan peralatan sarana dan prasarana,
 - c) Ketatausahaan dan bagian umum.
4. Komponen Hukum dan Kerjasama Teknik
Komponen kegiatan pada Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik terdiri dari :
 - a) Penyusunan dan Penyebar Luasan Peraturan Perundang-undangan bidang KSDAE,
 - b) Pertimbangan, Bantuan, Penanganan Perkara Hukum Bidang KSDAE,
 - c) Pengembangan dan Koordinasi Pelaksanaan Kerja sama Bidang KSDAE.

Program dan kegiatan diatas merupakan pola umum dalam penyusunan anggaran dilingkup Sekretariat Direktorat Jenderal yang didasarkan pada fungsi organisasi dan

dikaitkan dengan sasaran kegiatan dari Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE 2015 – 2019.

B. RENCANA KERJA TAHUN 2016

Pada tahun 2016 Setditjen KSDAE melaksanakan satu program pembangunan yaitu Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Rencana Kerja (Renja) Setditjen KSDAE tahun 2016 disusun berdasarkan pagu indikatif Setditjen KSDAE. Komponen kegiatan Setditjen KSDAE yang akan dilaksanakan pada Tahun 2016 telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Kerja Setditjen KSDAE Tahun 2016, sebagai berikut:

1) BAGIAN PROGRAM DAN ANGGARAN

Komponen : Dokumen Program dan Anggaran

Kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain :

1. Penyusunan Rencana Kerja Ditjen KSDAE Tahun 2017
2. Penyusunan Rencana Kerja Setditjen KSDAE Tahun 2017
3. Kelompok Kerja Program dan Anggaran Bidang KSDAE Tahun 2016
4. Penyusunan Juknis Penyusunan RKA Bidang KSDAE Tahun 2017
5. Penyusunan SKB Bidang KSDAE Tahun 2017
6. Penyusunan Perjanjian Kinerja Lingkup Ditjen KSDAE Tahun 2016
7. Penyusunan Anggaran Bidang KSDAE Tahun 2017
8. Pra Rakornis Lingkup Bidang KSDAE Tahun 2016
9. Rapat Koordinasi Teknis Bidang KSDAE Tahun 2016
10. Pemantapan Penyusunan RKA KL Bidang KSDAE Tahun 2017
11. Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Pengukuran Kinerja Bidang KSDAE 2015-2019
12. Penyusunan RKAKL Lingkup Setditjen KSDAE

Komponen : Dokumen Evaluasi dan Pelaporan

Kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain :

1. Penyusunan LKj Ditjen KSDAE dan LKj Setditjen KSDAE Tahun 2016
2. Penyusunan Laporan Capaian Renja Ditjen KSDAE dan Laporan Capaian Renja Setditjen KSDAE Tahun 2016
3. Penilaian SAKIP Ditjen dan Setditjen KSDAE
4. Monev Capaian Indikator Kinerja dan DIPA Satker Pusat
5. Rakor Evaluasi Kinerja dan Sosialisasi Evaluasi SAKIP Ditjen KSDAE
6. Pemantapan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Anggaran UPT
7. Penyusunan Laporan Bulanan Pelaksanaan Anggaran Bidang KSDAE
8. Penyusunan Buku Kumpulan Perundang-undangan Evaluasi dan Pelaporan
9. Evaluasi Dokumen Laporan Kinerja UPT dan Asistensi Penyusunan Laporan

Komponen : Dokumen Data dan Informasi

Kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain :

1. Penyusunan Buku Statistik Ditjen dan Setditjen KSDAE Tahun 2016
2. Pengelolaan Aplikasi Pendataan SIDAK KSDAE
3. Rekonsiliasi Pendataan Bidang KSDAE Tahun 2016
4. Pengelolaan Website
5. Penyusunan Buku Sejarah Lima Taman Nasional Pertama
6. Penyajian Informasi Pembangunan LHK
7. Workshop Penyelesaian Masalah Strategis Bidang KSDAE
8. Buku Informasi Strategis Taman Nasional

2) BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATALAKSANA

Komponen : Dokumen Administrasi Kepegawaian

Kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain :

1. Monev Data SIMPEG dan SAPK
2. Pelantikan/serah Terima Jabatan Pejabat Struktural
3. Formasi/Analisis Kebutuhan Pegawai
4. Pemberkasan Kenaikan Pangkat Reguler (2 periode)
5. Penataan Pejabat Struktural dan Non Struktural Lingkup KSDAE
6. Bantuan Biaya Pindah
7. Koordinasi dan Konsultasi Kepegawaian
8. Pemberian Penghargaan/penyelesaian kasus kepegawaian
9. Penyegaran Operator SIMPEG
10. Penyusunan Data/Monev LHK ASN lingkup Ditjen KSDAE
11. Penyusunan Buku Statistik Kepegawaian
12. Penyusunan Peta Jabatan Pegawai
13. Penyusunan DUK

Komponen : Dokumen Jabatan Fungsional

Kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain :

1. Penilaian DUPAK
2. Monitoring Jabatan Fungsional lingkup Ditjen KSDAE
3. Pembinaan Jabatan Fungsional lingkup Ditjen KSDAE
4. Kegiatan Penunjang Pengembangan Fungsional
5. Penyusunan Rencana Pengembangan Kompetisi Jabatan Fungsional
6. Pemberkasan Kenaikan Pangkat Fungsional
7. Pembinaan Pegawai Lingkup Ditjen KSDAE
8. Pembinaan Pegawai lingkup Setditjen KSDAE

Komponen : Dokumen Organisasi Tata Laksana

Kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain :

1. Penyusunan Analisis Jabatan
2. Penataan Organisasi dan Wilayah Kerja
3. Penyusunan Tata Hubungan Kerja
4. Evaluasi Kinerja Organisasi lingkup Ditjen KSDAE
5. Rapat Koordinasi Kepegawaian lingkup Ditjen KSDAE

3) BAGIAN KEUANGAN DAN UMUM

Komponen : Dokumen Administrasi Keuangan

Kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain :

1. Penyusunan Laporan Keuangan Ditjen dan Setditjen KSDAE Tahun 2015
2. Penyusunan Laporan Keuangan Ditjen dan Setditjen KSDAE semester I Tahun 2016
3. Laporan SAK UAKPA Triwulan I dan Triwulan III Tahun 2016
4. Pembinaan Pengelolaan PNBPN bidang KSDAE
5. Sosialisasi database tindak lanjut LHA lingkup Ditjen KSDAE
6. Sosialisasi database tindak lanjut LHA lingkup Ditjen KSDAE
7. Pembinaan Keuangan bagian Pelaksana Anggaran Satker
8. Satuan Pengawas Internal Pemerintah
9. Monitoring tindak lanjut LHA/BPK RI/BPKP dan Itjen
10. Monitoring tindak lanjut kerugian Negara

11. Upgrade database LHA Ditjen PHKA
12. Koordinasi dan Pendampingan Audit BPK RI
13. Koordinasi dan Bimbingan Teknis Bidang Keuangan
14. Pembinaan pengelolaan Hibah
15. Pengelolaan gaji karyawan satker pusat lingkup Ditjen KSDAE
16. Administrasi pengelola DIPA Setditjen KSDAE Tahun 2016

Komponen : Dokumen Ketatausahaan dan Umum

Kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain :

1. Pengumpulan, penyortiran arsip, retensi arsip dan penghapusan arsip lingkup Ditjen KSDAE
2. Sosialisasi Pedoman Tata Kearsipan lingkup Ditjen KSDAE di UPT
3. Penataan arsip dan penghapusan non arsip lingkup Setditjen KSDAE
4. Layanan Rumah Tangga Pimpinan
5. Asistensi Tata Persuratan Dinas Ditjen KSDAE di UPT
6. Sosialisasi Pedoman Tata Persuratan KLHK dan JRA KLHK
7. Pengelolaan surat/dokumen Dinas
8. Operasional Pimpinan Ditjen KSDAE

Komponen : Dokumen Perlengkapan

Kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain :

1. Penyusunan laporan BMN Ditjen dan Seditjen KSDAE tahun 2015
2. Penyusunan laporan BMN Ditjen dan Setditjen Semester I Tahun 2016
3. Bimbingan Teknis Penyusunan rencana Kebutuhan BMN
4. Pemutakhiran Data Barang Milik Negara
5. Inventarisasi Barang Milik Negara
6. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Terbaru terkait Pengelolaan BMN
7. Asistensi Pengelolaan BMN
8. Pembinaan dan Pengkajian Penghapusan/Pemindahtanganan BMN
9. Supervisi Penanganan kasus-kasus BMN
10. Monitoring dan Evaluasi Hibah BMN
11. Monitoring Optimalisasi Pemanfaatan Radio Komunikasi (SKRT)
12. Penyelenggaraan Penghapusan/ Pemindahtanganan BMN
13. Pembinaan dan Monitoring Penyelenggaraan Perpustakaan
14. Pengawetan bahan Pustaka
15. Pengadaan Obat-obatan dan bahan Poliklinik Ditjen KSDAE
16. Operasional ULP Unit Pusat Ditjen KSDAE
17. Penyusunan Rencana Kebutuhan BMN Ditjen dan Setditjen KSDAE

4) BAGIAN KERJASAMA TEKNIK

Komponen : Dokumen Kerjasama dan kemitraan

Kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain :

1. Penelaahan Proposal dan Perjanjian Kerjasama
2. Pemantauan dan Evaluasi Kerjasama
3. Koordinasi kerjasama/kemitraan
4. Kelompok Kerja Mitra Kerjasama
5. Fasilitasi dan Koordinasi dengan instansi terkait
6. Penyusunan data base kerjasama
7. Review SOP kerjasama

Komponen : Dokumen Rancangan Peraturan Perundangan

Kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain :

1. Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan
2. Perubahan Undang-undang nomor 5 tahun 1990 Pembahasan dengan Panja DPR

Komponen : Bantuan Penanganan Perkara Bidang KSDAE

Kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain :

1. Penanganan Perkara Perdata dan Perkara TUN
2. Asistensi Penyelesaian Kasus-kasus bidang KSDAE
3. Fasilitasi dan Koordinasi Pertimbangan dan Advokasi Hukum
4. Monitoring dan Evaluasi SIMAKSI/Perizinan Bidang KSDAE
5. Sosialisasi dan Pembinaan Hukum Pemanfaatan TSL, Jasa Lingkungan dan Pariwisata Alam

Selain output tersebut di atas, kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Lingkup Bidang Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem juga didukung oleh output standar, yaitu :

1. Output : Layanan Perkantoran
Pada output ini didukung oleh komponen :
 - a. Gaji dan tunjangan
 - b. Operasional perkantoran dan Pemeliharaan perkantoran
2. Output : Kendaraan Bermotor
3. Output : Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
4. Output : Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
5. Output : Gedung/Bangunan

C. RENCANA ANGGARAN

Anggaran pada Setditjen KSDAE diperuntukkan untuk menunjang kegiatan dasar yaitu pembayaran gaji, honorarium dan tunjangan serta penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran. Sebagian lainnya diperuntukkan untuk kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Setditjen KSDAE.

Tahun 2016 alokasi anggaran Setditjen KSDAE adalah Rp. 61.605.384.000,- dengan alokasi belanja pegawai adalah sebesar Rp. 39.332.632.000,- dan Operasional Perkantoran sebesar Rp. 4.250.000.000,-. Alokasi tersebut sudah termasuk alokasi untuk Tunjangan Kinerja. Secara lebih rinci rencana anggaran per output kegiatan, per jenis belanja dan per bagian adalah sebagai berikut :

1. Rencana Anggaran Per Output Kegiatan

Pada tahun 2016 terdapat 13 komponen kegiatan yang akan dilaksanakan. Alokasi anggaran untuk masing-masing komponen disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 7. Rencana Anggaran Per Output Kegiatan Setditjen KSDAE Tahun 2016

No	Output / Komponen	Pagu	%
1	2	3	4
A	Output : Nilai SAKIP DITJEN KSDAE	17.372.162.000	28.20
1	Dokumen Program dan Anggaran	3.588.850.000	20.66
2	Dokumen Evaluasi dan Pelaporan	1.218.950.000	7.02
3	Dokumen Data dan Informasi	1.277.490.000	7.35
4	Dokumen Kerjasama dan Kemitraan	1.035.200.000	5.94
5	Dokumen Rancangan Peraturan Perundang-	1.018.350.000	5.86

No	Output / Komponen	Pagu	%
1	2	3	4
	undangan Bidang KSDAE		
6	Bantuan Penanganan Perkara Bidang KSDAE	1.014.085.000	5.84
7	Dokumen Administrasi Kepegawaian	1.349.577.000	7.77
8	Dokumen Jabatan Fungsional	1.279.450.000	7.36
9	Dokumen Organisasi Tata Laksana	1.074.600.000	6.19
10	Dokumen Keuangan	1.423.990.000	8.20
11	Dokumen Ketatausahaan dan Umum	1.609.500.000	9.26
12	Dokumen Perlengkapan	1.482.120.000	8.53
B	Output : Layanan Perkantoran	43.582.632.000	70.74
	001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan	39.332.632.000	63.85
	002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	4.250.000.000	6.90
C	Output : Kendaraan Bermotor	-	-
D	Output : Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	530.590.000	0.86
E	Output : Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	-	-
F	Output : Gedung/bangunan	120.000.000	0.19
T O T A L		61.605.384.000	100.00

Sumber: Renja Setditjen KSDAE, 31 Desember 2016

Berdasarkan Tabel diatas, dapat dilihat bahwa output nilai Layanan Perkantoran dengan pagu tertinggi yaitu sebesar Rp. 43.582.632.000,- (**70.74%**). Adapun pagu terendah sebesar Rp. 120.000.000,- (**0.19%**) pada output Gedung/bangunan.

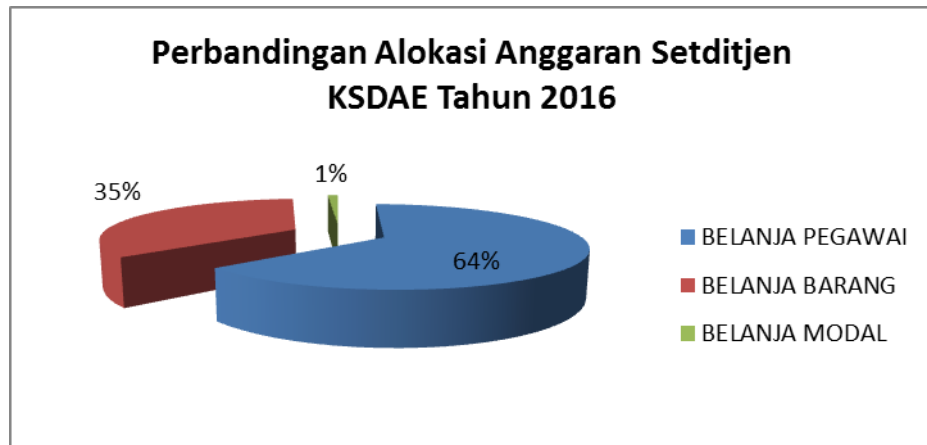
2. Rencana Anggaran Per Bagian

Dalam penyusunan rencana anggaran tahunan masing-masing Bagian lingkup Setditjen KSDAE tidak sama, karena menyesuaikan dengan kegiatan dan beban pekerjaan yang akan dilaksanakan. Alokasi anggaran DIPA pada masing-masing Bagian lingkup Setditjen KSDAE disajikan pada tabel dan gambar berikut :

Tabel 8. Alokasi Anggaran Setditjen KSDAE Tahun 2016

NO.	BAGIAN	PAGU ANGGARAN (RP)	%
1	2	3	4
I	BELANJA PEGAWAI	39.332.632.000	63.85
II	BELANJA BARANG	21.622.162.000	35.10
A	OPERASIONAL (002)	4.250.000.000	
B	NON OPERASIONAL	17.372.162.000	
1	Bagian Program & Evaluasi	6.085.290.000	
2	Bagian Kepegawaian, Ortala	3.703.627.000	
3	Bagian Keuangan dan Umum	4.515.610.000	
4	Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik	3.067.635.000	
III	BELANJA MODAL	650.590.000	1.05
	Jumlah : I + II + III	61.605.384.000	100.00

Sumber: Renja Setditjen KSDAE, 31 Desember 2016



Gambar 6. Diagram Perbandingan Alokasi Anggaran Setditjen KSDAE Tahun 2016

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa pagu anggaran Setditjen KSDAE tahun 2016 didominasi untuk Belanja Pegawai (gaji dan tunjangan) yaitu sebesar Rp. 39.332.632.000,- atau 63.85%. Sedangkan anggaran untuk belanja non pegawai (belanja barang dan belanja modal) hanya sebesar 36.15% dari total pagu Setditjen KSDAE.

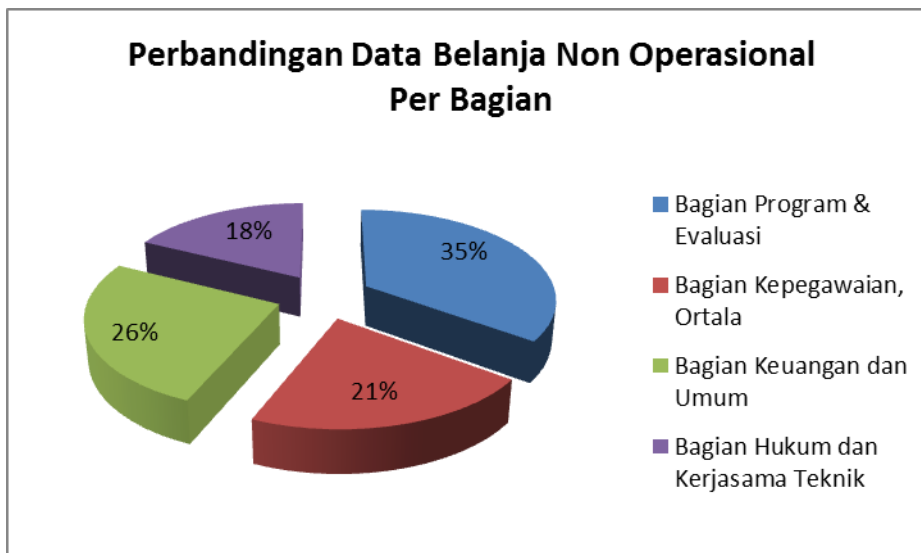
Apabila tanpa belanja pegawai maka besarnya pagu Bagian Program dan Evaluasi paling tinggi dibandingkan bagian lainnya yaitu sebesar 35.03% dari total pagu Setditjen KSDAE, selanjutnya diikuti oleh Bagian Keuangan dan Umum sebesar 25.99%, Bagian Kepegawaian, Organisasi Tata Laksana sebesar 21.32%, sedangkan yang paling rendah Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik sebesar 17.66%. Besarnya pagu anggaran pada Bagian Keuangan dan Umum ini salah satunya dikarenakan adanya anggaran untuk pengadaan barang dan jasa serta operasional perkantoran lingkup Setditjen KSDAE.

Pagu anggaran lingkup Setditjen KSDAE tahun 2016 apabila tidak dimasukkan unsur belanja Pegawai menjadi sebesar Rp. 22.272.752.000,-, dan perbandingan pagu anggaran per Bagian disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 9. Alokasi Anggaran Per Bagian Non Gaji Lingkup Setditjen KSDAE Tahun 2016

NO.	BAGIAN	PAGU ANGGARAN (RP)	%
1	Bagian Program & Evaluasi	6.085.290.000	35.03
2	Bagian Kepegawaian, Ortala	3.703.627.000	21.32
3	Bagian Keuangan dan Umum	4.515.610.000	25.99
4	Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik	3.067.635.000	17.66
	Jumlah	17.372.162.000	100.00

Sumber: Renja Setditjen KSDAE, 31 Desember 2016



Gambar 7. Perbandingan Data Belanja Non Operasional Pada setiap Bagian di lingkup Setditjen KSDAE Tahun 2016

3. Rencana Anggaran Per Jenis Belanja

Dalam pelaksanaan anggaran Setditjen KSDAE terdapat tiga jenis belanja yaitu belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal. Alokasi anggaran per jenis belanja disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 10. Alokasi Anggaran Per Jenis Belanja Setditjen KSDAE 2016

NO.	BAGIAN	PAGU ANGGARAN (RP)	%
1	2	3	4
I	BELANJA PEGAWAI	39.332.632.000	63.85
II	BELANJA BARANG	21.622.162.000	35.10
III	BELANJA MODAL	650.590.000	1.05
	Jumlah	61.605.384.000	100.00

Sumber: Renja Setditjen KSDAE, 31 Desember 2016

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa selama tahun 2016 alokasi terbesar anggaran Setditjen KSDAE pada belanja pegawai yang mencapai 63,85% dari total anggaran. Anggaran untuk belanja barang sebesar 35.10% dari pagu adapun jumlah anggaran terkecil adalah belanja modal yaitu 1.05% dari total pagu.

BAB III. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016

A. CAPAIAN PELAKSANAAN KINERJA KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan lingkup Setditjen KSDAE Tahun 2016 disajikan per Bagian, yaitu Bagian Program dan Evaluasi, Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana, Bagian Keuangan dan Umum dan Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik.

1. Bagian Program dan Evaluasi

Bagian Program dan Evaluasi terbagi dalam tiga sub bagian yaitu Program Anggaran, Data Informasi, Evaluasi dan Pelaporan. Pelaksanaan kegiatan per sub bagian disampaikan sebagai berikut:

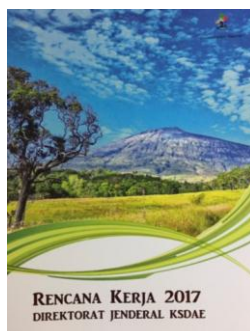
a. Sub Bagian Program Anggaran

Dalam rangka melaksanakan kegiatan pembangunan bidang KSDAE dibutuhkan acuan dalam penyusunan program, kegiatan dan penganggaran bagi unit kerja KSDAE baik di pusat maupun di daerah. Komponen kegiatan pada Sub Bagian Program dan Anggaran terdiri dari:

1) Penyusunan Rencana Kerja Ditjen KSDAE Tahun 2017

Renja Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2017 disusun dengan mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan pagu indikatif serta memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan kehutanan bidang konservasi sumberdaya alam dan ekosistem. Renja Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2017 disusun sebagai acuan dalam melaksanakan program, kegiatan dan anggaran pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan bidang konservasi sumberdaya alam dan ekosistem tahun 2017 di seluruh unit kerja lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem.

Renja Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2017 ditetapkan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal KSDAE Nomor: P.4/KSDAE/Set/Ren.0/9/2016 tanggal 20 September 2016 tentang Rencana Kerja Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem Tahun 2017. Buku Renja Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2017 telah didaftarkan ke Perpustakaan Nasional dengan nomor ISBN 978-602-60595-2-9. Buku ini dicetak sebanyak 110 buku dan telah didistribusikan kepada Direktorat Teknis dan Unit Pelaksana Teknis lingkup Ditjen KSDAE. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 57.750.000,- terealisasi Rp. 55.874.501,- atau 96,75 %.



Gambar 8. Cover Buku Rencana Kerja Ditjen KSDAE Tahun 2017

2) Penyusunan Rencana Kerja Setditjen KSDAE Tahun 2017

Renja Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2017 disusun sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di Direktorat Jenderal KSDAE di seluruh bagian lingkup Sekretariat Ditjen KSDAE pada tahun 2017. Renja Setditjen KSDAE memuat capaian kegiatan, indikator kinerja kegiatan dan kegiatan yang akan dilaksanakan seluruh bagian dilingkup Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2017. Renja Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2017 ditetapkan melalui Peraturan Sekretaris Direktorat Jenderal KSDAE Nomor: P.2/SET/PROEV/REN.2/9/2016 tanggal September 2016. Buku Renja Sekretariat Ditjen KSDAE KSDAE Tahun 2017 telah didaftarkan ke Perpustakaan Nasional dengan nomor ISBN 978-602-60595-4-3. Buku ini dicetak sebanyak 70 buku dan telah didistribusikan kepada Direktorat Teknis Lingkup Direktorat Jenderal KSDAE serta Bagian dan Subbagian lingkup Sekretariat Ditjen KSDAE. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 22.425.000,- terealisasi Rp. 21.946.750,- atau 97,87 %



Gambar 9. Cover Buku Rencana Kerja Setditjen KSDAE Tahun 2017

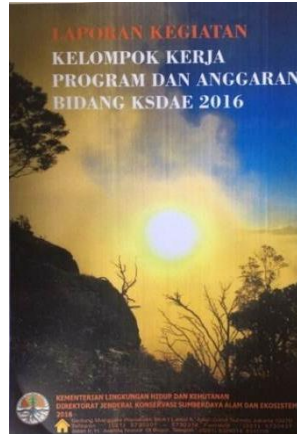
3) Kelompok Kerja Program dan Anggaran Bidang KSDAE Tahun 2016

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka efektifitas perencanaan program dan anggaran bidang Konservasi Sumberdaya Alam dan ekosistem. Kelompok Kerja ini di tetapkan melalui Surat Keputusan Sekretaris Ditjen KSDAE Nomor: SK.43/SET/PROEV/REN.0/2/2016 tanggal 26 Februari 2016 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Program dan Anggaran Ditjen KSDAE Tahun 2016.

Kegiatan yang dilaksanakan kelompok kerja ini adalah :

1. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) bidang KSDAE tahun 2017
2. Pembahasan dan penelaahan revisi APBN-P bidang KSDAE Tahun 2016 (selfblocking tahap I)
3. Pembahasan dan penelaahan revisi APBN-P bidang KSDAE Tahun 2016 (pemotongan/penghematan anggaran tahap I)
4. Pembahasan revisi administrasi pejabat perbendaharaan lingkup Ditjen KSDAE
5. Pembahasan dan penelaahan APBN-P tahap II (selfblocking tahap II) lingkup Ditjen KSDAE
6. Penelaahan Revisi Anggaran mengenai alokasi kenaikan tunjangan kinerja dan penambahan HLN lingkup Ditjen KSDAE

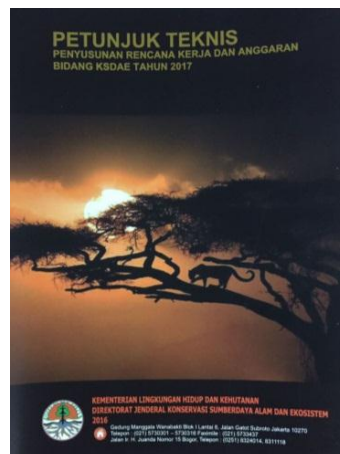
Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 608.016.000,-. terealisasi Rp.604.825.100,- atau 99,48%.



Gambar 10. Laporan Kegiatan Kelompok Kerja Program dan Anggaran Bidang KSDAE Tahun 2016

4) Penyusunan Juknis Penyusunan RKA Bidang KSDAE Tahun 2017

Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Bidang KSDAE Tahun 2017 merupakan acuan atau pedoman perencanaan dan penyusunan dokumen RKA tahun 2017 bagi seluruh satker di lingkup Ditjen KSDAE, agar tercipta perencanaan dan penganggaran yang berkualitas, efektif, efisien dan sesuai dengan kaidah-kaidah penganggaran yang berlaku. Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Bidang KSDAE Tahun 2016 ditetapkan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor : P.5/KSDAE/SET/REN.2/9/2016 tanggal 21 September 2016. Buku Juknis Penyusunan RKA Bidang KSDAE Tahun 2017 telah didaftarkan ke Perpustakaan Nasional dengan nomor ISBN 978-602-60595-1-2. Buku ini dicetak sebanyak 120 buku dan telah didistribusikan kepada Direktorat Teknis dan Unit Pelaksana Teknis lingkup Ditjen KSDAE. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 25.790.000,- dan terealisasi Rp. 24.818.400,- atau 96,23 %.



Gambar 11. Cover Juknis Penyusunan RKA Bidang KSDAE Tahun 2017

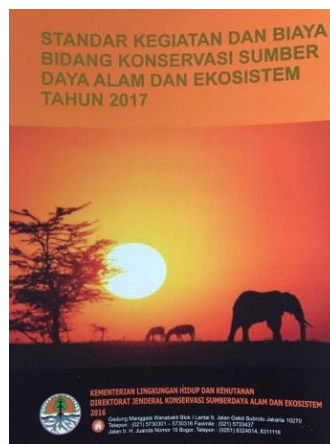
5) Penyusunan SKB Bidang KSDAE Tahun 2017

Standar Kegiatan dan Biaya (SKB) Bidang KSDAE Tahun 2017 adalah standar kegiatan dan biaya yang ditetapkan untuk mengatur tahapan pelaksanaan kegiatan secara seragam, teratur dan terukur bagi satuan kerja UPT lingkup Ditjen KSDAE TA 2017. SKB Bidang KSDAE Tahun 2017 ditetapkan melalui Peraturan Dirjen KSDAE Nomor: P.7/KSDAE/SET/Ren.2/9/2016 tanggal 21 September 2016 yang memuat 98 SKB, dengan rincian persubbidangnya adalah sebagai berikut :

Tabel 11. Daftar Standar Kegiatan dan Biaya Bidang KSDAE Tahun 2017

No.	Sub Bidang	Jumlah
1	Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam	7 SKB
2	Kawasan Konservasi	23 SKB
3	Konservasi Keanekaragaman Hayati	35 SKB
4	Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi	17 SKB
5	Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial	5 SKB
6	Dukungan Manajemen	11 SKB
Total		98 SKB

Buku SKB Bidang KSDAE Tahun 2017 telah didaftarkan ke Perpustakaan Nasional dengan nomor ISBN 978-602-60595-3-6. Buku ini dicetak sebanyak 145 buku dan telah didistribusikan kepada Direktorat Teknis dan Unit Pelaksana Teknis lingkup Ditjen KSDAE. Untuk kegiatan ini realisasi anggaran yang digunakan adalah sebesar Rp. 56.550.000,- dan terealisasi Rp. 54.227.000,- atau 95,89 %.

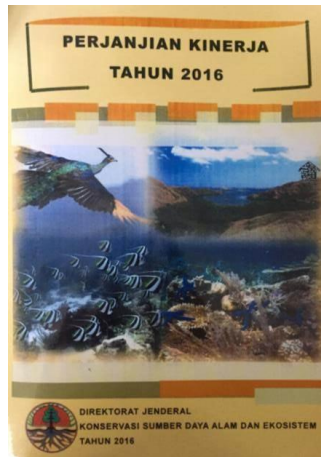
**Gambar 12. Cover SKB Bidang KSDAE Tahun 2017**

6) Penyusunan Perjanjian Kinerja Lingkup Ditjen KSDAE Tahun 2016

Perjanjian Kinerja disusun dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Perjanjian Kinerja Tahun 2016 merupakan tekad dan janji kinerja tahunan yang akan dicapai sebagai dasar penilaian dan evaluasi kinerja Ditjen KSDAE sesuai dengan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016 dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2016. Perjanjian Kinerja Tahun 2016 menggambarkan capaian kinerja yang akan Ditjen KSDAE sekaligus merupakan pertanggungjawaban kinerja Ditjen KSDAE pada Tahun 2016.

Perjanjian Kinerja yang disusun adalah Perjanjian Kinerja antara Direktur, Kepala Balai Besar KSDA/TN dan Kepala Balai KSDA/TN dengan Direktur Jenderal KSDAE sebanyak 83 Dokumen Perjanjian Kinerja, dan Perjanjian Kinerja Direktur Jenderal KSDAE dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 57.445.000,- dan terealisasi Rp. 54.240.000,- atau 94,42 %.



Gambar 13. Cover Perjanjian Kinerja Lingkup Ditjen KSDAE Tahun 2016

7) Penyusunan Anggaran Bidang KSDAE Tahun 2017

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka penyusunan anggaran bidang KSDAE Tahun 2017. Penyusunan perencanaan program dan anggaran pembangunan tahun 2017 dilaksanakan melalui rangkaian kegiatan yang dimulai dari rapat-rapat Trilateral, Pembahasan dan Persetujuan RUU APBN oleh DPR, Penetapan alokasi anggaran serta penyusunan dan pengesahan DIPA.



Gambar 14. Pembahasan Anggaran Bidang KSDAE Tahun 2017 di DPR RI

8) Pra Rakornis Lingkup Bidang KSDAE Tahun 2016

Kegiatan Pra Rakornis dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas RKA K/L bidang KSDAE tahun 2017. Dengan pelaksanaan Pra Rakornis ini diharapkan perencanaan dan penganggaran lingkup Direktorat KSDAE menjadi efektif dan efisien sehingga mampu mencapai keluaran yang diharapkan baik dalam penyerapan anggaran maupun dalam pencapaian kinerja yang telah ditetapkan.

Kegiatan Pra Rakornis Bidang KSDAE Tahun 2016 Regional Sumatera dilaksanakan di Hotel Novotel Batam selama 3 (tiga) hari, dari tanggal 30 Agustus 2016 s.d 1 September 2016. Peserta Pra-Rakornis Bidang KSDAE Tahun 2016 Regional Sumatera dihadiri sebanyak 65 peserta yang terdiri :

1. Balai Besar TN/KSDA lingkup Regional Sumatera : Kepala Sub Bagian Program dan Kerjasama dan operator
2. Balai TN/KSDA lingkup Regional Sumatera : Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan operator
3. Tim peneliti dari penanggung jawab kegiatan : 6 eselon II pusat

4. Narasumber : Bappenas

5. Panitia

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 244.450.000,- dan terealisasi Rp. 239.337.000,- atau 97,91 %.



Gambar 15. Kegiatan Pra-Rakornis Tahun 2016 Regional Sumatera

9) Rapat Koordinasi Teknis Bidang KSDAE Tahun 2016

Kegiatan Rapat Koordinasi Teknis bidang KSDAE tahun 2016 dilaksanakan sebagai dasar untuk memenuhi tahapan siklus penyusunan rencana kerja dan anggaran tahun 2017 terutama dalam rangka pelaksanaan Rencana Strategis Direktorat Jenderal KSDAE Periode 2015-2019 dan Rencana Kerja Tahun 2017 serta dapat mengkoordinasikan usulan-usulan kegiatan oleh Unit Pelaksana Teknis Ditjen KSDAE. Output kegiatan ini adalah RKA-KL satker lingkup Ditjen KSDAE berdasarkan pagu Indikatif tahun 2017.

Kegiatan Rakornis ini pada tanggal 28 September 2016, bertempat di Syariah Hotel, Jl. Adi Sucipto no.47, Kartasura dan dihadiri oleh 200 orang peserta, yang terdiri dari :

- a. Kepala Balai Besar KSDA/TN
- b. Kepala Balai KSDA/TN
- c. Direktur lingkup Ditjen KSDAE
- d. Kasubdit lingkup Ditjen KSDAE
- e. Narasumber
- f. Panitia

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 300.457.000,- dan terealisasi Rp. 294.681.000,- atau 98.08 %.



Gambar 16. Foto-foto Kegiatan Rapat Koordinasi Teknis Bidang KSDAE Tahun 2016

10) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2017 Bidang KSDAE Wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara.

Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2017 Bidang KSDAE Wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas RKA K/L bidang KSDAE tahun 2017. Dengan pelaksanaan kegiatan ini diharapkan perencanaan dan penganggaran lingkup Direktorat KSDAE menjadi efektif dan efisien sehingga mampu mencapai keluaran yang diharapkan baik dalam penyerapan anggaran maupun dalam pencapaian kinerja yang telah ditetapkan.

Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2017 Bidang KSDAE Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara dilaksanakan di Hotel Sahid Rich Jogja – Jl. Magelang KM 6 No. 18, Sleman, Yogyakarta selama 3 (tiga) hari, dari tanggal 17 s.d 19 Oktober 2016. Peserta Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2017 Bidang KSDAE Wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara dihadiri sebanyak 100 peserta yang terdiri :

1. Balai Besar TN/KSDA Wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara : Kepala Sub Bagian Program dan Kerjasama dan operator
2. Balai TN/KSDA lingkup Wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara : Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan operator
3. Tim peneliti dari penanggung jawab kegiatan : 6 eselon II pusat
4. Narasumber : Bappenas
5. Panitia

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 241.400.000,- dan terealisasi Rp. 240.453.000,- atau 99,61 %.



Gambar 17. Foto-foto Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2017 Bidang KSDAE

11) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2017 Bidang KSDAE Wilayah Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Papua

Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2017 Bidang KSDAE Wilayah Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Papua dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas RKA K/L bidang KSDAE tahun 2017. Dengan pelaksanaan kegiatan ini diharapkan perencanaan dan penganggaran lingkup Direktorat KSDAE menjadi efektif dan efisien sehingga mampu mencapai keluaran yang diharapkan baik dalam penyerapan anggaran maupun dalam pencapaian kinerja yang telah ditetapkan.

Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2017 Bidang KSDAE Wilayah Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Papua dilaksanakan di Salak Tower Hotel – Jl. Salak No. 38-40, Bogor selama 3 (tiga) hari, dari tanggal 12 s.d 14 Oktober 2016. Peserta Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2017 Bidang KSDAE Wilayah Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Papua dihadiri sebanyak 100 peserta yang terdiri :

1. Balai Besar TN/KSDA Wilayah Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Papua : Kepala Sub Bagian Program dan Kerjasama dan operator
2. Balai TN/KSDA lingkup Wilayah Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Papua : Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan operator
3. Tim peneliti dari penanggung jawab kegiatan : 6 eselon II pusat
4. Narasumber : Bappenas
5. Panitia

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 213.400.000,- dan terealisasi Rp. 210.697.000,- atau 98.73 %.



Gambar 18. Foto-foto Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2017 Bidang KSDAE Wilayah Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Papua

12) Pemantapan Penyusunan RKA KL Bidang KSDAE Tahun 2017

Rapat pemantapan penyusunan RKA-K/L KSDAE 2017 merupakan upaya Ditjen KSDAE untuk mendekatkan perencana/operator RKA-K/L di UPT dengan APIP terutama dalam penyusunan anggaran yang lebih baik dan berkualitas dengan berpedoman pada prinsip-prinsip Penganggaran *Money Follow Program* sesuai arahan Presiden Republik Indonesia dalam RKP Tahun 2017.

Dalam rapat pemantapan ini diharapkan akan lebih memantapkan kualitas perencanaan dan penganggaran pada seluruh satker lingkup Ditjen KSDAE serta menghasilkan dokumen RKA-K/L tahun 2017 lingkup Ditjen KSDAE sesuai dengan target dan sasaran masing-masing satker.

Kegiatan ini diselenggarakan selama empat hari dari tanggal 25 s.d 28 Oktober 2016, bertempat di Salak Tower Hotel, Jl. Salak no. 38-40 Bogor. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Sub Bagian TU/Program, perencana/operator RKA-KL seluruh satker lingkup KSDAE, tim APIP, Tim Peneliti Biro Perencanaan dan peneliti dari Direktorat Teknis KSDAE. Output kegiatan ini adalah RKA-KL satker lingkup Ditjen KSDAE berdasarkan pagu alokasi tahun 2017.

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 590.970.000,- dan terealisasi Rp.583.043.600,- atau 98,66 %.



Gambar 19. Foto-foto Kegiatan Pemantapan Penyusunan RKA KL Bidang KSDAE Tahun 2017

b. Sub Bagian Evaluasi Dan Pelaporan

Guna mempertanggung jawabkan anggaran yang di amanatkan kepada instansi pemerintah maka, kegiatan pada Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan terdiri dari :

1) Penyusunan LKj Ditjen KSDAE dan LKj Setditjen KSDAE Tahun 2015

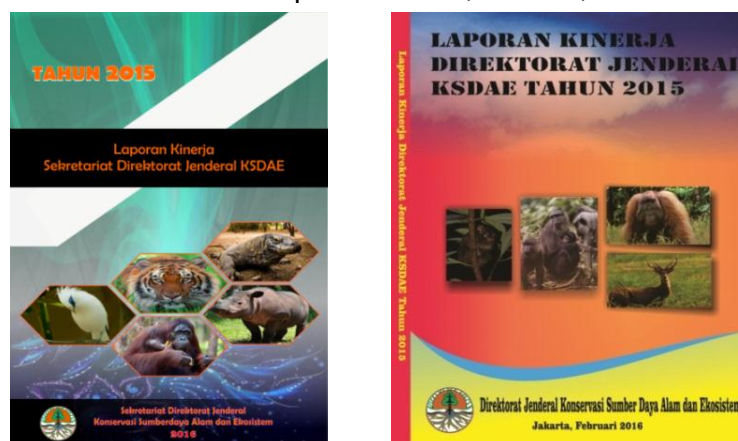
LKj merupakan laporan pertanggung jawaban kinerja instansi pemerintah mengenai keberhasilan dan kegagalan pencapaian target dan sasaran berdasarkan rencana strategis yang telah ditetapkan sebagaimana diatur dalam Permenpan no. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja mengacu pada pencapaian sasaran yang terdapat pada perjanjian kinerja.

LKj berisi tentang hasil pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi selama satu tahun, permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, serta langkah antisipatif atau upaya tindak lanjut yang akan dilaksanakan pada waktu yang akan datang agar kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi menjadi lebih optimal. Pada setiap tahunnya, ada dua macam LKj yang disusun oleh Sekretariat Ditjen KSDAE, yaitu LKj Sekretariat Ditjen KSDAE (Eselon II) dan LKj Ditjen KSDAE (Eselon I).

Dalam pembuatan LKj Ditjen KSDAE kendala yang dihadapi karena terdapat keterlambatan pengiriman laporan dari tiap direktorat lingkup setditjen KSDAE sehingga proses penyelesaian pembuatan LKj ini menjadi sedikit terhambat, sedangkan untuk pembuatan LKj Setditjen KSDAE kendala yang di hadapi karena adanya keterlambatan pengiriman laporan dari tiap-tiap subbagian Setditjen KSDAE namun LKj tersebut dapat diselesaikan tepat waktu.

Pada tahun 2016, telah disusun LKj Ditjen dan LKj Setditjen KSDAE tahun 2015. LKj Ditjen KSDAE dicetak sebanyak 50 buku dan LKj Setditjen KSDAE dicetak sebanyak 29 buku.

Alokasi anggaran untuk kegiatan Penyusunan LKj Ditjen KSDAE dan LKj Setditjen KSDAE Tahun 2015 sebesar Rp. 33.595.000., dan terealisasi Rp. 33.485.500., atau sebesar 99,67% teralokasikan dana untuk rapat baik rapat draft 0 sampai draft final sebesar Rp. 25.695.000., dan terealisasi sebesar Rp. 25.642.500., atau 99,80% sedangkan untuk pengadaan buku dialokasikan untuk sebesar Rp. 5.000.000., dan terealisasi sebesar Rp. 4.984.000., atau 99,68% untuk LKj Ditjen KSDAE, sebesar Rp. 2.900.000., dan terealisasi sebesar Rp. 2.859.000., atau 98,59%.



Gambar 20. Cover LKj Ditjen KSDAE dan cover LKj Setditjen KSDAE Tahun 2015

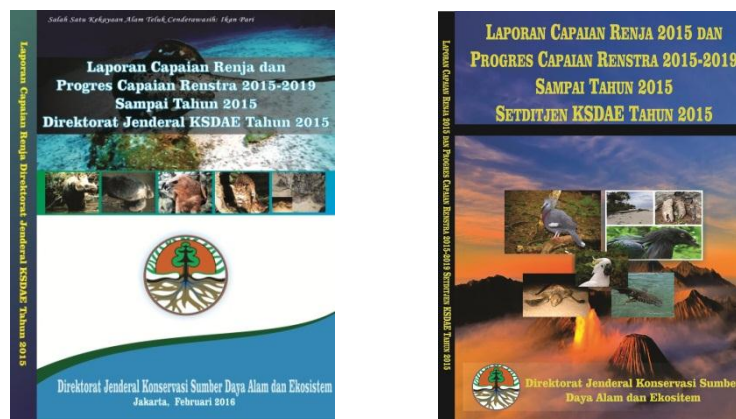
2) Penyusunan Laporan Capaian Renja Ditjen KSDAE dan Laporan Capaian Renja Setditjen KSDAE Tahun 2015

Laporan Capaian Renja (LCR) Ditjen dan Setditjen KSDAE disusun untuk mengetahui implementasi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan. Selain itu, Laporan Capaian Renja juga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dan merupakan pertanggung jawaban atas penggunaan anggaran selama setahun serta sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan rencana kegiatan pada tahun selanjutnya.

Dalam penyusunan Laporan Capaian Renja Ditjen dan Laporan Capaian Renja Setditjen KSDAE kendala yang dihadapi kurang lebih hampir sama dengan penyusunan LKj terdapat keterlambatan dalam pengiriman data untuk draft laporan dari Direktorat dan Subbagian Setditjen KSDAE sehingga pembuatan Laporan Capaian Renja Ditjen dan Laporan Capaian Renja Setditjen, namun baik LCR Ditjen maupun LCR Setditjen dapat diselesaikan tepat waktu.

Output yang dihasilkan berupa dua buah dokumen yaitu Laporan Capaian Renja Ditjen KSDAE tahun 2015 dan Laporan Capaian Renja Setditjen KSDAE tahun 2015. Laporan Capaian Renja Ditjen KSDAE dicetak sebanyak 40 buku dan Laporan Capaian Renja Setditjen KSDAE dicetak sebanyak 30 buku.

Alokasi untuk kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Renja Ditjen KSDAE dan Laporan Capaian Renja Setditjen KSDAE Tahun 2015 sebesar Rp. 26.805.000., dan terealisasi sebesar Rp. 26.640.500., atau 99,39% yang di alokasikan untuk rapat persiapan Draft 0 sampai Draft Final sebesar Rp.19.805.000., dan terealisasi sebesar Rp. 19.767.500., atau 99,81% sedangkan untuk pengadaan buku dialokasikan sebesar Rp. 4.000.000., dan terealisasi sebesar Rp. 3.969.000., atau 99,23% untuk pengadaan LCR Ditjen KSDAE. Dan sebesar Rp. 3.000.000., dan terealisasi sebesar Rp. 2.904.000., atau 96,80% untuk pengadaan LCR Setditjen KSDAE Tahun 2015.



Gambar 21. Cover LCR Ditjen KSDAE dan Cover LCR Setditjen KSDAE Tahun 2015

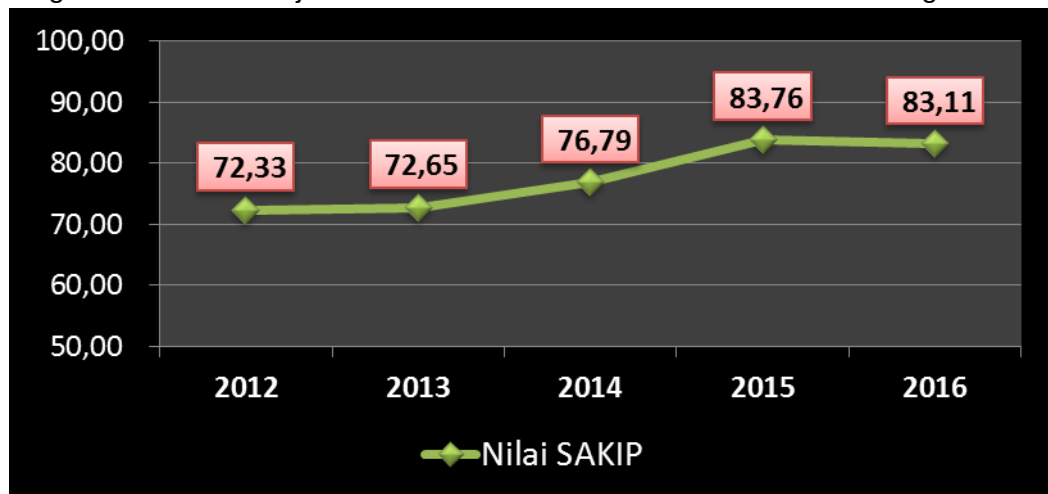
3) Penilaian SAKIP Ditjen dan Setditjen KSDAE

Dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja maka dilakukan serangkaian kegiatan sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor: 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam pelaksanaannya telah diterbitkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor: 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Evaluasi atas

implementasi SAKIP pada tingkat Eselon I Kementerian/Lembaga dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal.

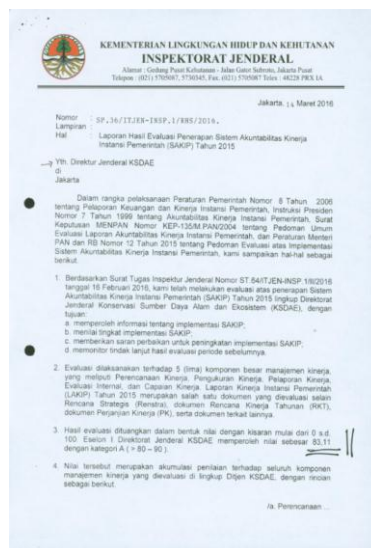
Kegiatan Penilaian SAKIP Ditjen dan Setditjen KSDAE dan Bimbingan Teknis Evaluasi SAKIP di UPT mempunyai maksud untuk mendukung kegiatan penilaian SAKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal KLHK. Kegiatan Penilaian SAKIP Ditjen dan Setditjen KSDAE dan Bimbingan Teknis Evaluasi SAKIP di UPT bertujuan untuk meningkatkan nilai SAKIP Ditjen KSDAE dan menyampaikan informasi terkait SAKIP Ditjen KSDAE kepada seluruh UPT Ditjen KSDAE. Pada tahun 2016 nilai SAKIP Ditjen KSDAE adalah 83,11, mengalami penurunan dari tahun 2015 yaitu 83,76 atau menurun sebesar 0,65 poin (0.776%). Penurunan nilai ini diantaranya disebabkan karena dokumen PK tidak mencantumkan target jangka menengah dan indikator dalam PK tidak sesuai dengan IKP yang telah ditetapkan dalam Renstra Ditjen KSDAE tahun 2015-2019. Perbandingan nilai SAKIP Ditjen KSDAE dari tahun 2012 – 2016 adalah sebagai berikut :



Gambar 22. Perbandingan Nilai SAKIP Ditjen KSDAE 2012-2016

Dengan kegiatan ini, diharapkan Ditjen KSDAE menjadi instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat berkinerja secara produktif, efektif, dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Alokasi anggaran untuk kegiatan Penilaian SAKIP Ditjen dan Setditjen KSDAE sebesar Rp. 93.700.000,- dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 92.070.900,- atau 98,26%.



Gambar 23. Rapat Hasil Penilaian SAKIP Ditjen KSDAE oleh Inspektorat Jenderal Kmenterian LHK

4) Monev Capaian Indikator Kinerja dan DIPA Satker Pusat

Dalam rangka implementasi Program Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan telah ditetapkan 6 (enam) kegiatan dengan penanggung jawab masing-masing Eselon II di pusat, dan 2 (dua) kegiatan di UPT yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Eselon II di Pusat. Capaian Kinerja kegiatan dan anggaran DIPA Ditjen KSDAE setiap triwulan dilaporkan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan kepada Bappenas melalui implementasi Peraturan-Peraturan Pemerintah Nomor. 39 Tahun 2006.

Monitoring dan evaluasi capaian indikator kinerja dan DIPA satker pusat dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan pencapaian kinerja dan pelaksanaan anggaran khususnya satker pusat (Direktorat Teknis dan Setditjen) serta mengetahui hambatan/kendala yang dihadapi.

Alokasi anggaran untuk kegiatan Monitoring dan Evaluasi Capaian Indikator Kinerja dan DIPA Satker pusat sebesar Rp. 68.375.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 68.222.400., atau 99,78%. Dimana alokasi dana ini digunakan untuk melakukan pembahasan di kantor sampai dengan akhir tahun sebesar Rp. 22.625.000., dan terealisasi sebesar Rp. 22.472.400., atau 99,33% dan untuk honor Pokja atau pengelola kinerja sebesar Rp. 45.750.000., dan terealisasi sebesar Rp. 45.750.000., atau 100%.

e-Monev 2016

1 e-monev.bappenas.go.id/pemantauan/form_kegiatan/029.05.08.4

1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283848586878889909192939495969798991001011021031041051061071081091101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951961971981992002012022032042052062072082092102112122132142152162172182192202212222232242252262272282292302312322332342352362372382392402412422432442452462472482492502512522532542552562572582592602612622632642652662672682692702712722732742752762772782792802812822832842852862872882892902912922932942952962972982993003013023033043053063073083093103113123133143153163173183193203213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953963973983994004014024034044054064074084094104114124134144154164174184194204214224234244254264274284294304314324334344354364374384394404414424434444454464474484494504514524534544554564574584594604614624634644654664674684694704714724734744754764774784794804814824834844854864874884894904914924934944954964974984995005015025035045055065075085095105115125135145155165175185195205215225235245255265275285295305315325335345355365375385395405415425435445455465475485495505515525535545555565575585595605615625635645655665675685695705715725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955965975985996006016026036046056066076086096106116126136146156166176186196206216226236246256266276286296306316326336346356366376386396406416426436446456466476486496506516526536546556566576586596606616626636646656666676686696706716726736746756766776786796806816826836846856866876886896906916926936946956966976986997007017027037047057067077087097107117127137147157167177187197207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987998008018028038048058068078088098108118128138148158168178188198208218228238248258268278288298308318328338348358368378388398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858868878888898908918928938948958968978988999009019029039049059069079089099109119129139149159169179189199209219229239249259269279289299309319329339349359369379389399409419429439449459469479489499509519529539549559569579589599609619629639649659669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949959969979989991000100110021003100410051006100710081009101010111012101310141015101610171018101910201021102210231024102510261027102810291030103110321033103410351036103710381039104010411042104310441045104610471048104910501051105210531054105510561057105810591060106110621063106410651066106710681069107010711072107310741075107610771078107910801081108210831084108510861087108810891090109110921093109410951096109710981099110011001110021100311004110051100611007110081100911010110111101211013110141101511016110171101811019110201102111022110231102411025110261102711028110291103011031110321103311034110351103611037110381103911040110411104211043110441104511046110471104811049110501105111052110531105411055110561105711058110591106011061110621106311064110651106611067110681106911070110711107211073110741107511076110771107811079110801108111082110831108411085110861108711088110891109011091110921109311094110951109611097110981109911000110011100211003110041100511006110071100811009110101101111012110131101411015110161101711018110191102011021110221102311024110251102611027110281102911030110311103211033110341103511036110371103811039110401104111042110431104411045110461104711048110491105011051110521105311054110551105611057110581105911060110611106211063110641106511066110671106811069110701107111072110731107411075110761107711078110791108011081110821108311084110851108611087110881108911090110911109211093110941109511096110971109811099110001100111002110031100411005110061100711008110091101011011110121101311014110151101611017110181101911020110211102211023110241102511026110271102811029110301103111032110331103411035110361103711038110391104011041110421104311044110451104611047110481104911050110511105211053110541105511056110571105811059110601106111062110631106411065110661106711068110691107011071110721107311074110751107611077110781107911080110811108211083110841108511086110871108811089110901109111092110931109411095110961109711098110991100011001110021100311004110051100611007110081100911010110111101211013110141101511016110171101811019110201102111022110231102411025110261102711028110291103011031110321103311034110351103611037110381103911040110411104211043110441104511046110471104811049110501105111052110531105411055110561105711058110591106011061110621106311064110651106611067110681106911070110711107211073110741107511076110771107811079110801108111082110831108411085110861108711088110891109011091110921109311094110951109611097110981109911000110011100211003110041100511006110071100811009110101101111012110131101411015110161101711018110191102011021110221102311024110251102611027110281102911030110311103211033110341103511036110371103811039110401104111042110431104411045110461104711048110491105011051110521105311054110551105611057110581105911060110611106211063110641106511066110671106811069110701107111072110731107411075110761107711078110791108011081110821108311084110851108611087110881108911090110911109211093110941109511096110971109811099110001100111002110031100411005110061100711008110091101011011110121101311014110151101611017110181101911020110211102211023110241102511026110271102811029110301103111032110331103411035110361103711038110391104011041110421104311044110451104611047110481104911050110511105211053110541105511056110571105811059110601106111062110631106411065110661106711068110691107011071110721107311074110751107611077110781107911080110811108211083110841108511086110871108811089110901109111092110931109411095110961109711098110991100011001110021100311004110051100611007110081100911010110111101211013110141101511016110171101811019110201102111022110231102411025110261102711028110291103011031110321103311034110351103611037110381103911040110411104211043110441104511046110471104811049110501105111052110531105411055110561105711058110591106011061110621106311064110651106611067110681106911070110711107211073110741107511076110771107811079110801108111082110831108411085110861108711088110891109011091110921109311094110951109611097110981109911000110011100211003110041100511006110071100811009110101101111012110131101411015110161101711018110191102011021110221102311024110251102611027110281102911030110311103211033110341103511036110371103811039110401104111042110431104411045110461104711048110491105011051110521105311054110551105611057110581105911060110611106211063110641106511066110671106811069110701107111072110731107411075110761107711078110791108011081110821108311084110851108611087110881108911090110911109211093110941109511096110971109811099110001100111002110031100411005110061100711008110091101011011110121101311014110151101611017110181101911020110211102211023110241102511026110271102811029110301103111032110331103411035110361103711038110391104011041110421104311044110451104611047110481104911050110511105211053110541105511056110571105811059110601106111062110631106411065110661106711068110691107011071110721107311074110751107611077110781107911080110811108211083110841108511086110871108811089110901109111092110931109411095110961109711098110991100011001110021100311004110051100611007110081100911010110111101211013110141101511016110171101811019110201102111022110231102411025110261102711028110291103011031110321103311034110351103611037110381103911040110411104211043110441104511046110471104811049110501105111052110531105411055110561105711058110591106011061110621106311064110651106611067110681106911070110711107211073110741107511076110771107811079110801108111082110831108411085110861108711088110891109011091110921109311094110951109611097110981109911000110011100211003110041100511006110071100811009110101101111012110131101411015110161101711018110191102011021110221102311024110251102611027110281102911030110311103211033110341103511036110371103811039110401104111042110431104411045110461104711048110491105011051110521105311054110551105611057110581105911060110611106211063110641106511066110671106811069110701107111072110731107411075110761107711078110791108011081110821108311084110851108611087110881108911090110911109211093110941109511096110971109811099110001100111002110031100411005110061100711008110091101011011110121101311014110151101611017110181101911020110211102211023110241102511026110271102811029110301103111032110331103411035110361103711038110391104011041110421104311044110451104611047110481104911050110511105211053110541105511056110571105811059110601106111062110631106411065110661106711068110691107011071110721107311074110751107611077110781107911080110811108211083110841108511086110871108811089110901109111092210932109421095210962109721098210992100021001210022100321004210052100621007210082100921010210112101221013210142101521016210172101821019210202102121022210232102421025210262102721028210292103021031210322103321034210352103621037210382103921040210412104221043210442104521046210472104821049210502105121052210532105421055210562105721058210592106021061210622106321064210652106621067210682106921070210712107221073210742107521076210772107821079210802108121082210832108421085210862108721088210892109021091210922109321094210952109621097210982109921000210012100221003210042100521006210072100821009210102101121012210132101421015210162101721018210192102021021210222102321024210252102621027210282102921030210312103221033210342103521036210372103821039210402104121042210432104421045210462104721048210492105021051210522105321054210552105621057210582105921060210612106221063210642106521066210672106821069210702107121072210732107421075210762107721078210792108021081210822108321084210852108621087210882108921090210912109221093210942109521096210972109821099210002100121002210032100421005210062100721008210092101021011210122101321014210152101621017210182101921020210212102221023210242102521026210272102821029210302103121032210332103421035210362103721038210392104021041210422104321044210452104621047210482104921050210512105221053210542105521056210572105821059210602106121062210632106421065210662106721068210692107021071210722107321074210752107621077210782107921080210812108221083210842108521086210872108821089210902109121092210932109421095210962109721098210992100021001210022100321004210052100621007210082100921010210112101221013210142101521016210172101821019210202102121022210232102421025210262102721028210292103021031210322103321034210352103621037210382103921040210412104221043210442104521046210472104821049210502105121052210532105421055210562105721058210592106021061210622106321064210652106621067210682106921070210712107221073210742107521076210772107821079210802108121082210832108421085210862108721088210892109021091210922109321094210952109621097210982109921000210012100221003210042100521006210072100821009210102101121012210132101421015210162101721018210192102021021210222102321024210252102621027210282102921030210312103221033210342103521036210372103821039210402104121042210432104421045210462104721048210492105021051210522105321054210552105621057210582105921060210612106221063210642106521066210672106821069210702107121072210732107421075210762107721078210792108021081210822108321084210852108621087210882108921090210912109221093210942109521096210972109821099210002100121002210032100421005210062100721008210092101021011210122101321014210152101621017210182101921020210212102221023210242102521026210272102821029210302103121032210332103421035210362103721038210392104021041210422104321044210452104621047210482104921050210512105221053210542105521056210572105821059210602106121062210632106421065210662106721068210692107021071210722107321074210752107621077210782107921080210812108221083210842108521086210872108821089210902109121092210932109421095210962109721098210992100021001210022

Gambar 24. Printscreen Pelaporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2016 dalam aplikasi e-monev.bappenas.go.id

5) Rakor Evaluasi Kinerja dan Sosialisai Evaluasi SAKIP Ditjen KSDAE

Rakor Evaluasi Kinerja dan sosialisai Evaluasi SAKIP Ditjen KSDAE Tahun 2016 bertujuan untuk mengetahui pencapaian kinerja tahun 2015 yang dilaksanakan oleh satker lingkup Ditjen KSDAE baik di level pusat maupun di level daerah (UPT) dalam rangka meningkatkan kegiatan pembangunan kehutanan bidang KSDAE. Kegiatan ini dilakukan di Hotel Royal Safari Garden, Jl. Raya Puncak, Cisarua, Bogor dari tanggal 31 Mei-3 Juni 2016. Keluaran yang di harapkan dari kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen hasil evaluasi pencapaian kinerja satker lingkup Ditjen KSDAE tahun 2015, teridentifikasinya berbagai permasalahan dan pencapaian kinerja lingkup Ditjen KSDAE di level pusat maupun di level daerah atau UPT, tersusunnya rumusan hasil rakor evaluasi

kinerja yang memuat langkah-langkah strategis dalam penyelesaian masalah dan kendala dalam pencapaian kinerja, tersusunnya rekomendasi atas pencapaian kinerja satker yang dapat digunakan sebagai umpan balik perencanaan dan penyusunan RKAKL untuk tahun berikutnya serta meningkatnya kinerja satker pada tahun berjalan yaitu tahun 2016 meningkatkan pengetahuan tentang SAKIP.

Kegiatan ini di ikuti oleh seluruh UPT Ditjen KSDAE (Balai Besar/Balai TN dan Balai Besar/Balai KSDA) yang mengirimkan 2 (dua) orang peserta yaitu Kepala Balai Besar/Balai KSDA atau Kepala Balai Besar/Balai Taman Nasional dan petugas yang menangani langsung evaluasi dan pembuatan laporan kinerja setiap UPT.

Rapat Koordinasi Evaluasi Kinerja dan Sosialisasi Evaluasi SAKIP Ditjen KSDAE 2016 yang dilaksanakan di Bogor pada tanggal 31 Mei – 3 Juni 2016 merumuskan hal-hal sebagai mana terlampir berikut:

1. Target pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) UPT lingkup Ditjen KSDAE pada Tahun 2015 sebagian besar telah tercapai namun terdapat kegiatan yang belum tercapai seperti kunjungan wisatawan asing, Izin Pemanfaatan Air, Izin Pemanfaatan Energi Air dan peningkatan 25 spesies prioritas terancam punah karena sejumlah kendala antara lain : kondisi alam, regulasi yang belum mendukung, Pedoman Pencapaian IKK belum lengkap, ketersediaan anggaran untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pariwisata, Sumber Daya Manusia terkait masih terbatas baik jumlah maupun kualitasnya serta kendala teknis dalam pelaksanaannya.
2. Revisi dalam rangka penajaman numenklatur dalam IKK untuk Renstra 2015-2019 perlu dilakukan untuk menghindari kesalahan tafsir dan efisiensi alokasi anggaran serta mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi Satker.
3. Dalam rangka sinkronisasi, monitoring dan evaluasi, perlu ditingkatkan kesepahaman melalui koordinasi yang lebih intensif antara UPT dan Direktorat Teknis Lingkup Ditjen KSDAE.
4. Perlunya dilakukan pemetaan secara komprehensif permasalahan dan potensi sumber daya alam yang strategis di masing-masing UPT paska evaluasi kinerja TA 2015 dalam rangka penentuan alokasi anggaran tahun 2017 berbasis valuasi.
5. Instrumen anggaran untuk merencanakan kegiatan UPT Tahun 2017 mengacu pada tema RKP 2017 dan Prioritas Nasional.
6. Beberapa hal yang perlu diperhatikan pada masa yang akan datang antara lain:
 - a. Prakondisi pengelolaan kawasan konservasi belum mantap khususnya di TN perairan.
 - b. Potensi obyek wisata di kawasan konservasi belum dimanfaatkan secara optimal dan perlu disusun standarisasi sarana dan prasarana wisata guna mendukung pelayanan prima bagi pengunjung, dengan mempertimbangkan aspek produk (alam), aspek promosi, dan aspek komunitas lokal (budaya).
 - c. Pemberdayaan masyarakat dan pemetaan potensi pada daerah penyangga dilakukan berdasarkan hasil identifikasi lapangan yang komprehensif.
 - d. Mengoptimalkan kerjasama pemerintah daerah dan mitra-mitra KLHK dalam pembangunan kawasan konservasi dan ekosistem esensial termasuk penyediaan sarpras wisata alam, SDM, serta anggaran.
 - e. Meningkatkan pengelolaan zona tradisional dengan memberikan akses pemanfaatan kepada masyarakat setempat.
 - f. Ditjen KSDAE perlu melakukan percepatan penyusunan regulasi beroperasinya KPHK untuk menjadi guideline beroperasinya KPHK di UPT.

7. Mengoptimalkan penyediaan sumberdaya dan anggaran untuk meningkatkan TN perairan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan TN perairan dan pemanfaatan wisata bahari secara optimal.
8. Dalam rangka mewujudkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah lingkup Ditjen KSDAE agar berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dan Peraturan Direktur Jenderal KSDAE Nomor P.8 Tahun 2015.
9. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi yang intensif antara Ditjen KSDAE, Biro Kepegawaian, Ditjen PHLHK dan Ditjen PPI dalam rangka pengelolaan Sumberdaya Manusia di Satker lingkup Ditjen KSDAE.
10. Setiap UPT lingkup Ditjen KSDAE dihimbau agar mempunyai icon hayati yang dilestarikan dan diberdayakan untuk dapat menjadi *Legacy* dalam pengelolaan kawasan konservasi.
11. Hasil Rapat koordinasi Evaluasi Kinerja dan Sosialisasi Evaluasi SAKIP Ditjen KSDAE Tahun 2016 digunakan sebagai umpan balik perencanaan tahun 2017.

Alokasi anggaran untuk kegiatan Rakor Evaluasi Kinerja Ditjen KSDAE sebesar Rp. 592.872.500,- yang terealisasi Rp. 591.807.500,- atau 99,82 %. Alokasi dana untuk rapat sebesar Rp. 53.592.500., dan terealisasi sebesar Rp. 53.462.500., atau 99,76%. Alokasi untuk honor panitia dan narasumber sebesar Rp. 83.650.000., dan terealisasi sebesar Rp. 83.350.000, atau 99,64%. Alokasi untuk Biaya penginapan selama acara sebesar Rp. 455.630.000., dan terealisasi sebesar Rp. 454.995.000., atau 99,86%.



Gambar 25. Peserta Rakor Evaluasi Kinerja Ditjen KSDAE

6) Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Anggaran UPT

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Direktorat Jenderal KSDAE memiliki anggaran belanja yang berasal dari sumber dana DIPA. Untuk melaksanakan kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Pada tahun 2016 Direktorat

Jenderal KSDAE melaksanakan 1 (satu) program dan ditetapkan 6 kegiatan dengan penanggung jawab masing-masing eselon II di pusat dan 2 kegiatan di UPT.

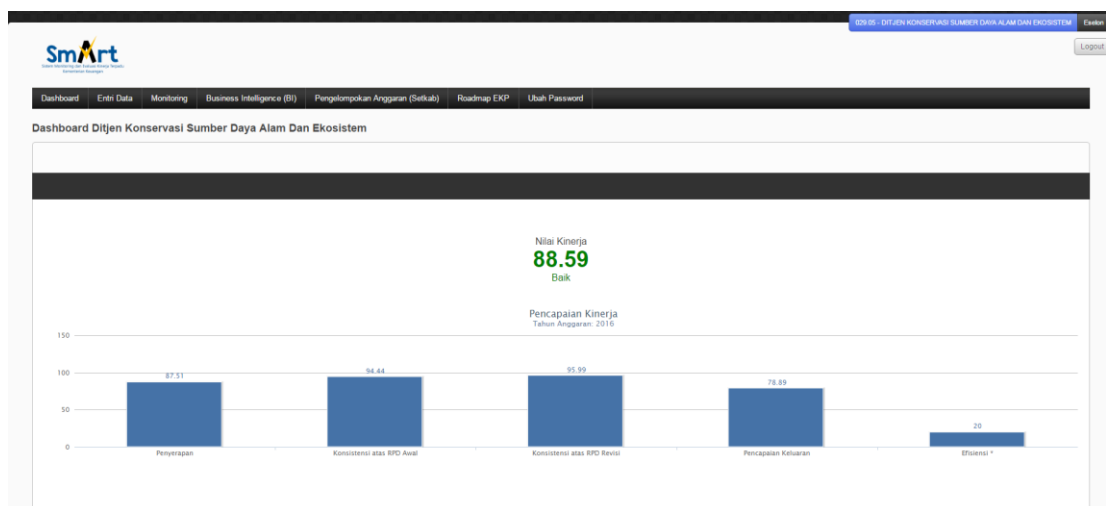
Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Anggaran UPT dimaksudkan untuk mengetahui atau menganalisa tingkat pencapaian anggaran dan kegiatan yang bersumber dari DIPA lingkup Ditjen KSDAE. Adapun tujuannya adalah untuk mengetahui permasalahan atau kendala yang dihadapi UPT dalam melaksanakan kegiatan yang dapat mempengaruhi penyerapan anggaran dan memberikan bimbingan teknis ke pada UPT. Output dari kegiatan ini adalah Laporan Bulanan yang berisi capaian anggaran dan output kegiatan.

Dari hasil Pemantauan, Evaluasi dan beberapa perjalanan dinas yang dilakukan ke UPT masih terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaan pelaporan yaitu :

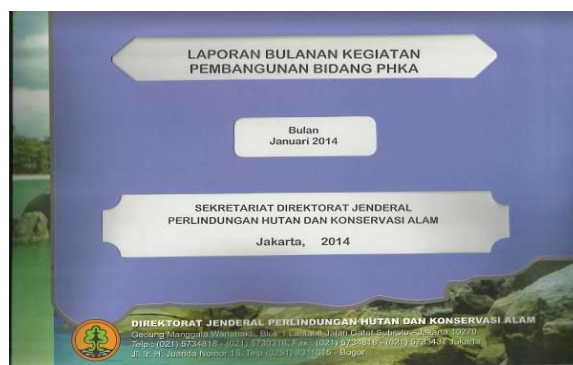
- kapasitas operator *e-monev.anggaran.co.id* dan *e-monev.bappenas.co.id* masih belum memadai terutama dalam mengisi capaian output kegiatan sehingga perlu bimbingan teknis khusus untuk operator pelaporan online.
- Beberapa data pendukung capaian kinerja yang valid dan terukur masih sulit untuk dikumpulkan sehingga menyebabkan operator kesulitan dalam penginputan capaian output, dimana hal ini memerlukan perhatian dan kerjasama yang baik pada semua level struktural dan staf teknis penanggung jawab kegiatan.

Untuk meningkatkan kapasitas SDM, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan maka perlu dilaksanakan Penyelenggaraan loklatih. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan dilakukan di 13 UPT yaitu, 1) BBTN Gunung Leuseur, 2) BBKSDA Jawa Barat, 3) BTN Gunung Halimun Salak, 4) BKSDA Bengkulu, 5) BKSDA Sumatera Barat, 6) BTN Siberut, 7) BBTN Gunung Gede Pangrango, 8) BTN Gunung Ciremai, 9) BKSDA Aceh, 10) BTN Baluran, 11) BKSDA Yogyakarta, 12) BTN Gunung Merapi, 13) BBKSDA Sumatera Utara.

Alokasi dana untuk kegiatan Pemantauan, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Bulanan Pelaksanaan Anggaran Bidang KSDAE sebesar Rp. 138.575.000., dan terealisasi sebesar Rp. 126.355.358., atau 91,18%. Alokasi dana untuk rapat di kantor sebesar Rp. 10.575.000., dan terealisasi sebesar Rp. 10.517.000., atau 99,45%. Alokasi yang digunakan untuk melakukan perjalanan dinas ke UPT sebesar Rp. 128.000.000., dan terealisasi sebesar Rp. 115.838.358., atau 90,50%.



Monitoring Partisipasi Satuan Kerja Tahun Anggaran 2016																			
Total ada 84 Record																			
No.	Kode K/L	Kode Unit	Nama Provinsi	Nama Kab Kota	Kode Satker	Nama Satker	Dipa Revisi Ke	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sep	Oktr	Nov	Des
1.	029	05	NUSA TENGGARA BARAT	KAB. DOMPU	230645	BALAI TAMAN NASIONAL TAMBORA	4	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
2.	029	05	DKI JAKARTA	KOTA JAKARTA PUSAT	236322	BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DKI JAKARTA RAYA	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3.	029	05	BANTEN	KAB. PANDEGLANG	236382	BALAI TAMAN NASIONAL UJUNG KULON	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4.	029	05	JAWA BARAT	KOTA BANDUNG	236399	BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM JAWA BARAT	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5.	029	05	JAWA TENGAH	KOTA SEMARANG	238411	BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM JAWA TENGAH	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6.	029	05	JAWA TIMUR	KOTA SURABAYA	238432	BALAI BESAR KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM JAWA TIMUR	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7.	029	05	JAWA TIMUR	KAB. BANYUWANGI	238446	BALAI TAMAN NASIONAL BALURAN	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8.	029	05	ACEH	KOTA BANDA ACEH	238487	BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM NANGROE ACEH DARUSSALAM	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9.	029	05	SUMATERA UTARA	KOTA MEDAN	238488	BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM SUMATERA UTARA	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10.	029	05	SUMATERA BARAT	KOTA PADANG	238500	BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM SUMATERA BARAT	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1
11.	029	05	RIAU	KOTA PEKANBARU	238514	BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM RIAU	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12.	029	05	JAMBI	KOTA JAMBI	238521	BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM JAMBI	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13.	029	05	SUMATERA SELATAN	KOTA PALEMBANG	238542	BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM SUMATERA SELATAN	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14.	029	05	LAMPUNG	KOTA BANDAR LAMPUNG	238560	BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM LAMPUNG	4	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	029	05	KALIMANTAN BARAT	KOTA PONTIANAK	238577	BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM KALIMANTAN BARAT	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
16.	029	05	KALIMANTAN TENGAH	KAB. KOTAWARINGIN BARAT	238581	BALAI TAMAN NASIONAL TANJUNG PUTING	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
17.	029	05	KALIMANTAN SELATAN	KOTA BANJARBARU	238598	BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM KALIMANTAN SELATAN	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
18.	029	05	KALIMANTAN TIMUR	KOTA BONTANG	238603	BALAI TAMAN NASIONAL KUTAI	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
19.	029	05	SULAWESI UTARA	KOTA MANADO	238610	BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM SULAWESI UTARA	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
20.	029	05	SULAWESI TENGAH	KOTA PALU	238624	BALAI KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM SULAWESI TENGAH	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
21.	029	05	SULAWESI SELATAN	KOTA MAKASSAR	238645	BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM SULAWESI SELATAN	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
22.	029	05	SULAWESI TENGGARA	KOTA KENDARI	238652	BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM SULAWESI TENGGARA	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
23.	029	05	MALUKU	KOTA AMBON	238666	BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM MALUKU	4	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
24.	029	05	BALI	KOTA DENPASAR	238687	BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM BALI	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
25.	029	05	NUSA TENGGARA BARAT	KOTA MATARAM	238691	BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM NUSA TENGGARA BARAT	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
26.	029	05	BENGKULU	KOTA BENGKULU	238713	BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM BENGKULU	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
27.	029	05	JAWA BARAT	KAB. CIANJUR	239807	BALAI BESAR TAMAN NASIONAL GUNJUNG GEDE PANORANGGO	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
28.	029	05	SUMATERA UTARA	KOTA MEDAN	239828	BALAI BESAR TAMAN NASIONAL GUNJUNG LEUSER	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
29.	029	05	LAMPUNG	KAB. TANGGAMUS	239853	BALAI BESAR TAMAN NASIONAL BUKIT BARISAN SELATAN	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
30.	029	05	NUSA TENGGARA TIMUR	KOTA KUPANG	239881	BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM NUSA TENGGARA TIMUR	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



Gambar 26. Output Kegiatan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan UPT Tahun 2016

7) Evaluasi Dokumen Laporan Kinerja UPT dan Asistensi Penyusunan Laporan Kinerja

Kegiatan Evaluasi Dokumen Laporan Kinerja UPT dan Asistensi Penyusunan Laporan Kinerja berpedoman pada Peraturan Dirjen KSDAE Nomor : P.8/KSDAE-SET/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) dan Review atas Dokumen Laporan Kinerja Lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Evaluasi ini mempertimbangkan beberapa aspek di dalam penilaiannya yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan. Beberapa kategori nilai untuk evaluasi Dokumen Laporan Kinerja UPT yaitu AA (Sangat Memuaskan), A (Memuaskan), BB (Sangat Baik), B (Baik), CC (Cukup (Memadai)), C (Kurang), dan D (Sangat Kurang). Untuk tahun 2016, 5 UPT yang mendapatkan nilai pelaporan kinerja terbaik seperti di dalam tabel :

Tabel 12. Nilai LKj 5 UPT Terbaik tahun 2015

No	UPT	Nilai	Interprestasi
1	BTN Kepulauan Seribu	96,75	AA
2	Direktorat PJLHK	94,75	AA
3	BKSDA Kalimantan Barat	93	AA
4	BTN Gunung Halimun Salak	91,75	AA
5	Setditjen KSDAE	91,50	AA

Sedangkan untuk 5 UPT dengan nilai kurang baik seperti dalam tabel

Tabel 13. Nilai LKj 5 UPT dengan nilai kurang baik

No	UPT	Nilai	Interprestasi
1	BTN Siberut	43	C
2	BKSDA Bengkulu	44	C
3	BKSDA Sumatera Utara	47,25	C
4	BTN Berbak	48	C
5	BTN Sembilang	52,25	CC

Untuk penilaian Dokumen LKj Tahun 2016 Dirjen KSDAE mentargetkan nilai LKj UPT Tahun 2016 diatas 81 poin.

Dalam beberapa perjalanan dinas ke beberapa UPT terdapat beberapa permasalahan dalam penyusunan LKj yaitu kurangnya koordinasi dan komunikasi yang baik dan intensif antara sub bagian perencanaan dan kerjasama serta sub bagian data, evaluasi, dan pelaporan, kapasitas dan pemahaman tim penyusun LKj di UPT masih perlu ditingkatkan karena merupakan personil baru dan belum memahami sepenuhnya tentang teknis penyusunan LKj, yang mengacu pada Permen PAN&RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

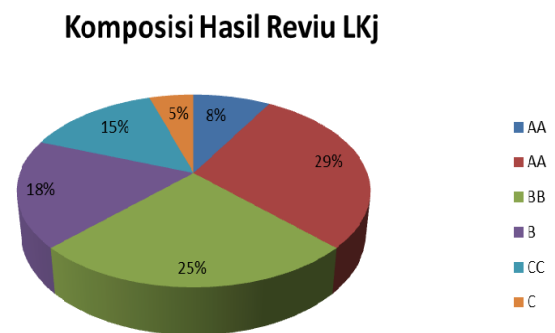
Sulitny memperoleh data dukung yang disebabkan tidak tertibnya seluruh level satker dalam melaporkan kinerjanya dan untuk itu perlu ditingkatkan tertib laporan kegiatan dan lokalatih peningkatan kapasitas SDM, penyegaran Evaluasi dan Pelaporan. UPT yang sudah didatangi untuk dilakukan Evaluasi Dokumen ke 9 UPT, yaitu : 1) BKSDA Yogyakarta, 2) BKSDA Sulawesi Selatan, 3) BTN Way Kambas, 4) BBTN Bukit Barisan Selatan, 5) BBKSDA Jawa Timur, 6) BKSDA Jawa Tengah, 7) BTN Ujung Kulon, 8) BTN Gunung Halimun Salak, 9) BTN Gunung Ciremai.

Alokasi dana untuk kegiatan Evaluasi Dokumen Laporan Kinerja UPT dan Asistensi Penyusunan Laporan Kinerja sebesar Rp. 139.455.000., dan terealisasi sebesar Rp. 137.99.203., atau 98,96%.



Gambar 27. Penilaian Review LKj UPT Tahun 2016

No	Grade	Jumlah Satker	%
1	AA	7	8.43
2	A	24	28.92
3	BB	21	25.30
4	B	15	18.07
5	CC	12	14.46
6	C	4	4.82
Jumlah		83	100



Keterangan:

No	Grade	Nilai	Interpretasi
1	AA	> 90 - 100	Sangat Memuaskan
2	A	> 80 - 90	Memuaskan
3	BB	> 70 - 80	Sangat Baik
4	B	> 60 - 70	Baik
5	CC	> 50 - 60	Cukup
6	C	> 30 - 50	Kurang
7	D	0 - 30	Sangat Kurang

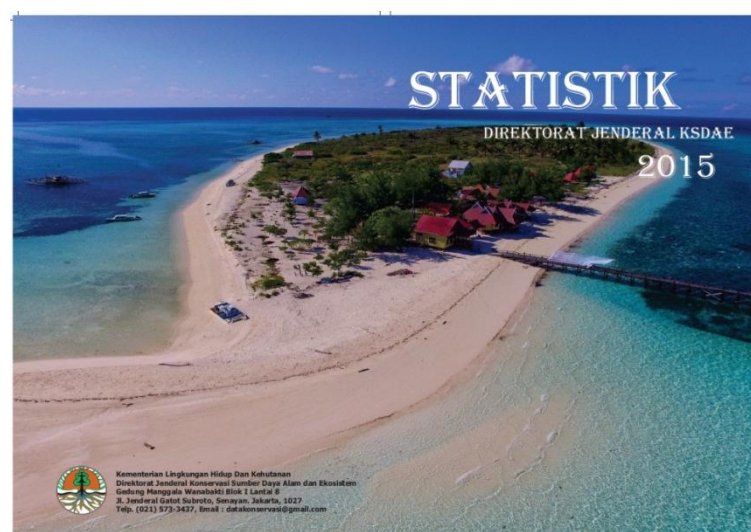
- Nilai tertinggi sebesar **96.75** poin
- Nilai terendah **43** poin

Gambar 28. Hasil Reviu Laporan Kinerja tahun 2016

c. Sub Bagian Data dan Informasi

1) Penyusunan Buku Statistik Ditjen Tahun 2015

Buku Statistik Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2015 berisi gambaran umum tentang Data dan Informasi Pembangunan Kehutanan Bidang KSDAE yang telah dilakukan sampai dengan Tahun 2015, yaitu Bidang Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam, Bidang Kawasan Konservasi, Bidang Konservasi Keanekaragaman Hayati, Bidang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi, Bidang Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial serta Bidang Kesekretariatan. Buku ini disusun berdasarkan hasil pengumpulan dan pengolahan data dari Direktorat teknis dan Unit Pelaksana Teknis lingkup Direktorat Jenderal KSDAE.



Gambar 29. Cover Buku Statistik Direktorat Jenderal Tahun 2015

Pada tahun 2016 telah disusun Buku Statistik Ditjen KSDAE sebanyak 100 Buku dan telah didistribusikan ke seluruh Eselon II Lingkup Direktorat Jenderal KSDAE, Unit Pelaksana Teknis lingkup Ditjen KSDAE dan stakeholder lainnya. Alokasi anggaran untuk penyusunan Statistik Ditjen KSDAE Tahun 2015 sebesar Rp. 94.778.000,- dan yang terealisasi sebesar Rp.94.207.500,- atau 99,40%.

2) Penyusunan Buku Statistik Setditjen KSDAE Tahun 2015

Buku Statistik Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2015 merupakan buku statistik yang disusun berdasarkan hasil pengumpulan data dari seluruh bagian lingkup Setditjen KSDAE. Buku Statistik ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran data dan informasi pada masing-masing bagian serta diharapkan menjadi masukan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan tugas-tugas lingkup Setditjen KSDAE.



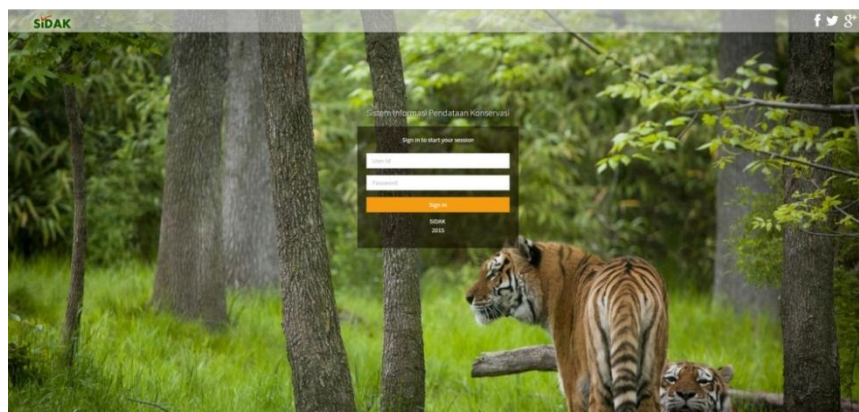
Gambar 30. Cover Buku Statistik Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE

Pada Tahun 2016 telah disusun Buku Statistik Setditjen KSDAE sebanyak 25 buku, dan telah didistribusikan ke setiap Bagian dan Sub Bagian lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE. Alokasi anggaran kegiatan ini adalah sebesar Rp.11.195.000,- dengan realisasi sebesar Rp.11.195.000,- atau 100%.

3) Pengelolaan Aplikasi Pendataan SIDAK KSDAE

Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam No.2 Tahun 2013 tentang Sistem Pendataan dan Pelaporan Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam dimaksudkan menjadi acuan dalam penyelenggaraan pendataan dan pelaporan untuk mendukung proses pengambilan keputusan.

Untuk mengimplementasikan peraturan tersebut diperlukan alat berupa Aplikasi SIDAK (Sistem Informasi Pendataan Konservasi) KSDAE yang mampu melaksanakan proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pemeliharaan, pemutakhiran dan penyajian data dan informasi pengelolaan kawasan konservasi secara menyeluruh. Alamat SIDAK KSDAE adalah <http://sidak.ksdae.menlhk.go.id/>



Gambar 31. Halaman depan WEBSITE SIDAK KSDAE

Aplikasi Pendataan SIDAK KSDAE terdiri dari beberapa menu yaitu Bidang PIKA (Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam), KK (Kawasan Konservasi), KKH (Konservasi Keanekaragaman Hayati), PJLHK (Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi), BPEE (Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial), Kesekretariatan, Data Pokok, Sistem, Monitoring Data, Statistik, dan Executive Summary. Menu PIKA, KK, KKH, PJLHK, BPEE, dan Kesekretariatan berisi tabel kegiatan masing-masing Satuan Kerja.

Pengelolaan Aplikasi Pendataan SIDAK KSDAE Tahun 2016 dilakukan dengan cara monitoring SIDAK ke UPT lingkup KSDAE. Dasar monitoring SIDAK dilihat dari prosentase pengisian SIDAK serta laporan beberapa UPT yang mengalami kesulitan dalam pengisian SIDAK. Pada tahun 2016 monitoring SIDAK dilaksanakan di 12 (dua belas) lokasi yaitu di BTN Gunung Ciremai, BTN Gunung Merbabu, BTN Ujung Kulon, BTN Gunung Halimun Salak, BTN Kerinci Seblat, BTN Kepulauan 1000, BBTN Gunung Gede Pangrango, BKSDA Jambi, BKSDA Jawa Tengah, BKSDA Kalimantan Barat, BKSDA Yogyakarta, dan BTN Gunung Merapi.

Pada tahun 2016 telah dilakukan Pengelolaan Aplikasi Pendataan SIDAK KSDAE. Alokasi anggaran untuk Pengelolaan Aplikasi Pendataan SIDAK KSDAE sebesar Rp. 110.378.000,- dan yang terealisasi sebesar Rp109.113.200,- atau 98,85 %.

4) Rekonsiliasi Pendataan Bidang KSDAE Tahun 2016

Maksud dilaksanakannya Rekonsiliasi Pendataan Bidang KSDAE Tahun 2016 adalah menjamin kebenaran dan kesesuaian data, menyamakan data yang ada di Pusat dan UPT serta sebagai sarana komunikasi dan koordinasi antar pengelola data dan informasi bidang KSDAE sehingga diperoleh persamaan persepsi dalam input data dan informasi.

Sedangkan Rekonsiliasi Pendataan Bidang KSDAE tahun 2016 ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan dan solusi pengelolaan data dan informasi pada unit kerja Ditjen KSDAE melalui aplikasi SIDAK, meningkatkan pemahaman, wawasan, dan kapasitas pengelola data dan informasi bidang KSDAE melalui pemaparan praktisi dan studi kasus, melakukan pengelolaan informasi, komunikasi dan kehumasan pada publik secara efektif dan efisien untuk perencanaan informasi publik yang lebih baik ke depan, menyusun Draft Statistik Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2015.



Gambar 32. Rekonsiliasi Pendataan Bidang KSDAE Tahun 2016

Pelaksanaan kegiatan Rekonsiliasi Pendataan Bidang KSDAE Tahun 2016 dilaksanakan selama 3 hari dari tanggal 22 s.d. 24 Maret 2016 bertempat di Hotel Grand Tjokro, Jl. Affandi No.37, Sleman – D.I. Yogyakarta.

Peserta kegiatan Rekonsiliasi Pendataan Bidang KSDAE Tahun 2016 adalah :

1. Wali data/operator pengelola pendataan dari seluruh Satuan Kerja Balai Besar KSDA/TN dan Balai KSDA/TN lingkup Direktorat Jenderal KSDAE.
2. Wali data lingkup Pusat, Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2016.
3. Kepala Balai KSDA/TN lingkup Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta.

Berdasarkan rekapitulasi daftar hadir jumlah peserta yang mengikuti Rekonsiliasi Pendataan Bidang KSDAE Tahun 2016 berjumlah 130 orang.

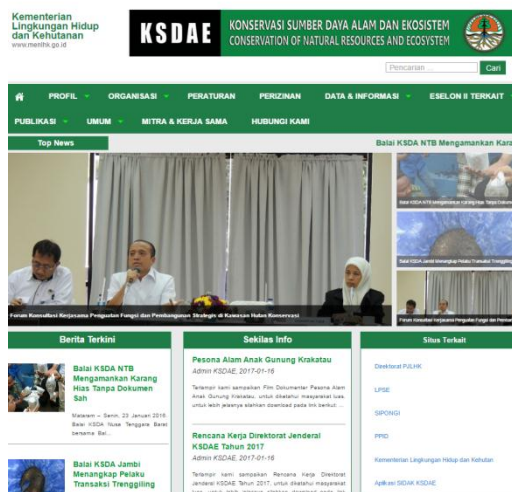
Pada tahun 2016 telah dilakukan Rekonsiliasi Pendataan Bidang KSDAE. Alokasi anggaran untuk Pengelolaan Aplikasi Pendataan SIDAK KSDAE sebesar Rp. 260.816.000,- dan yang terealisasi sebesar Rp 260.802.600,- atau 99,99 %.

5) Pengelolaan Website

Perkembangan teknologi telah menjadi komponen yang sangat penting bagi keberhasilan suatu instansi maupun organisasi baik swasta maupun negeri. Teknologi informasi, termasuk website, memainkan peranan penting dalam suatu instansi sebagai media informasi, dan teknologi informasi juga dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses kolektifitas instansi tersebut. Karena website termasuk media informasi yang cukup murah di banding dengan media informasi lainnya, dan jangkauan informasinya sangat luas. Ditjen KSDAE telah memiliki website namun masih memiliki beberapa kekurangan. Seperti dalam tampilan serta penyajian berita/ informasi masih secara manual tidak menggunakan database, data sebelumnya berupa file world kemudian akan diubah kedalam file database. Oleh karena itu dibutuhkan fungsi baru untuk menangani penyajian berita/ informasi yang bertujuan untuk memudahkan admin dalam mengelola berita/ informasi tersebut.

Sedangkan tujuan kegiatan ini adalah :

1. Mengembangkan tampilan website (web presence) yang berisi informasi dasar yang dibutuhkan masyarakat;
2. Mengembangkan isi informasi yang ditampilkan lebih bervariasi, seperti fasilitas download dan komunikasi email dalam website; dan
3. Mempermudah admin dalam pengelolaan konten seperti berita/ informasi.

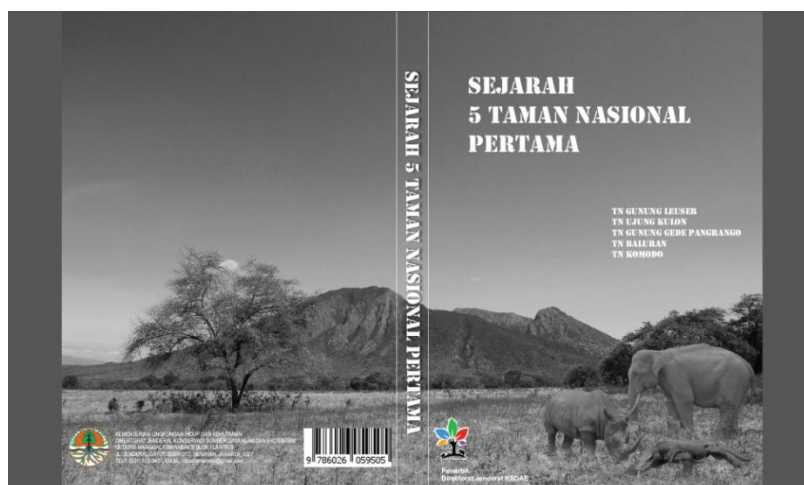


Gambar 33. Halaman Muka WEBSITE Ditjen KSDAE

Alamat website Ditjen KSDAE adalah <http://ksdae.menlhk.go.id/>. Adapun jumlah berita di website Ditjen KSDAE selama Tahun 2016 yang telah ditayangkan sebanyak 125 berita dan informasi, 10 Buku, daftar nama pejabat lingkup Ditjen KSDAE, alamat UPT KSDAE, peraturan (8 Undang-Undang, 1 Peraturan Pemerintah, 8 Peraturan Menteri, 4 Peraturan Dirjen dan 4 Keputusan Dirjen), booklet dan foto-foto Lingkup KSDAE. Menurut mesin penghitung jumlah pengunjung website KSDAE sampai dengan 31 Desember 2016 mencapai 95.859 kunjungan dengan rata-rata perhari 255 pengunjung. Pengelola website ditetapkan melalui SK Dirjen Nomor:SK.36/KSDAE/SET/Ren.2/2/2016 tanggal 23 Februari 2016 (terlampir). Alokasi anggaran untuk kegiatan Pengelolaan Website sebesar Rp. 53.348.000,- yang terealisasi sebesar Rp. 52.724.400,- atau 98,83%.

6) Penyusunan Buku Sejarah Lima Taman Nasional Pertama

Penyusunan Buku Sejarah Lima Taman Nasional Pertama ditujukan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai kawasan konservasi mulai dari kesejarahan dan status awal pengelolaannya. Lebih khusus lagi, untuk memotret taman nasional, terutama pada lima taman nasional yang pertama kali ditetapkan di Indonesia, yaitu Gunung Leuser, Ujungkulon, Gunung Gede Pangrango, Baluran dan Komodo. Buku Sejarah Lima Taman Nasional Pertama disusun oleh Bapak Panji Yudistira serta Tim Penyusun yang ditetapkan melalui SK Dirjen Nomor:173/SET/PROEV/REN.0/11/2016 Tanggal 28 November 2016.



Gambar 34. Cover Buku Sejarah 5 Taman Nasional Pertama

Pada tahun 2016 telah disusun Buku Buku Sejarah Lima Taman Nasional Pertama sebanyak 100 Buku dan telah didistribusikan ke Unit Pelaksana Teknis lingkup Ditjen KSDAE dan stakeholder lainnya. Alokasi anggaran untuk penyusunan Statistik Ditjen KSDAE Tahun 2015 sebesar Rp. 54.580.000,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 47.194.200,- atau 86,47%.

7) Penyajian Informasi Pembangunan LHK

Ketersediaan data dan informasi merupakan salah satu komponen yang penting dalam pengelolaan kelembagaan, khususnya dalam hal perumusan kebijakan dan peraturan. Dengan demikian, data dan informasi diharapkan dapat tersedia secara terintegrasi, terstruktur, terukur dan terbarukan untuk digunakan sebagai bahan pengukuran terhadap program kegiatan bidang KSDAE serta sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan yang relevan sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

Penyajian informasi pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan bidang KSDAE dilakukan dengan berpartisipasi dalam pameran pembangunan dan peliputan tematik. Pada Tahun 2016 bahan partisipasi pameran yang diadakan yaitu goodie bag, payung, tumbler dan kemeja, dan telah didistribusikan ke Seluruh Unit Pelaksana Teknis serta stakeholder lainnya. Pada Tahun 2016 peliputan tematik dilaksanakan di 14 lokasi yaitu di BKSDA Kalimantan Tengah, BBKSDA Riau, BTN Komodo, BTN Kepulauan Seribu, BKSDA Jawa Tengah, BTN Gunung Merapi, BTN Gunung Ciremai, BKSDA Yogyakarta, BTN Bali Barat, BBKSDA Jawa Barat SKW III Soreang, Rapat Koordinasi Teknis, Dies Natalis UGM, dan BKSDA Bengkulu. Alokasi anggaran untuk kegiatan Penyajian Informasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bidang KSDAE sebesar Rp. 179.690.000,- yang terealisasi sebesar Rp. 179.095.227,- atau 99,67 %.



Gambar 35. Contoh Personal use untuk bahan informasi Pembangunan LHK

8) Workshop Penyelesaian Masalah Strategis Bidang KSDAE

Maksud dilaksanakannya Workshop Penyelesaian Isu Strategis Bidang KSDAE (Wilayah DIY-Jawa Tengah) adalah mengetahui jenis permasalahan strategis yang ada di 3 (tiga) UPT di Wilayah DIY-Jawa yaitu (Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta, Balai Taman Nasional Gunung Merapi dan Balai Taman Nasional Gunung Merbabu) sehingga diperoleh solusi/alternatif pemecahan permasalahan yang tidak kunjung selesai.

Sedangkan tujuan workshop Penyelesaian Isu Strategis Bidang KSDAE (Wilayah DIY-Jawa Tengah) ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan strategis sesuai tipologinya, mencari solusi permasalahan strategis, melakukan kerjasama dan koordinasi lintas sektor eselon 1 secara efektif dan efisien untuk penanganan permasalahan strategis yang lebih baik ke depan, serta menyusun hasil rekapitulasi tipologi permasalahan strategis. (Rumusan terlampir).



Gambar 36. Wokrshop Penyelesaian Masalah Strategis bidang KSDAE

Workshop Penyelesaian Isu Strategis Bidang KSDAE (Wilayah DIY-Jawa Tengah) dilaksanakan selama 3 (tiga) hari dimulai pada tanggal 22 s/d 24 Juli 2016 dan diselenggarakan di Hotel Grand Tjokro, Jalan Affandi dan Wanagama, Yogyakarta. Berdasarkan rekapitulasi daftar hadir jumlah peserta yang mengikuti Workshop Penyelesaian Isu Strategis Bidang KSDAE (Wilayah DIY-Jawa Tengah) berjumlah 50 orang. Pelaksanaan Workshop Penyelesaian Isu Strategis Bidang KSDAE (Wilayah DIY-Jawa Tengah) terdiri dari pembukaan, paparan dan diskusi, perumusan masalah, serta penutupan. Alokasi anggaran untuk kegiatan Workshop Penyelesaian Isu Strategis Bidang KSDAE sebesar Rp. 111.135.000,- yang terealisasi sebesar Rp.110.897.945,- atau 99,79%.

2. Bagian Kepegawaian, Organisasi Dan Tata Laksana

Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana terbagi dalam tiga sub bagian v yaitu Administrasi Kepegawaian, Administrasi Jabatan Fungsional serta Organisasi dan Tata Laksana. Kegiatan tahun 2016 per subbagian tersaji sebagai berikut :

a. Sub Bagian Administrasi Kepegawaian

Komponen kegiatan Sub Bagian Administrasi Kepegawaian terdiri dari :

1) Monev Data SIMPEG dan SAPK

Berdasar Peraturan Kepala BKN nomor 25 Tahun 2013, pemberian persetujuan teknis kenaikan pangkat reguler PNS golongan IV/b ke bawah, mulai Oktober 2014 dilakukan secara otomatis dengan mengacu kepada data Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK). Demi menghindari kesalahan pada proses kenaikan pangkat yang

dapat berakibat merugikan bagi PNS, maka data PNS harus sesuai keadaan sebenarnya dan selaras antara data yang ada pada SIMPEG maupun pada SAPK.

Karena semua urusan administrasi kepegawaian yang dilakukan di BKN mengacu pada data SAPK dan harus sesuai dengan data SIMPEG, maka peremajaan data pada kedua aplikasi tersebut mutlak harus dilakukan secara terus menerus oleh masing-masing operator SIMPEG di setiap Satuan Kerja.

Dengan Kegiatan Penyegaran Operator SIMPEG, diharapkan ada keselarasan data kepegawaian antara Data SIMPEG dengan Data SAPK dengan output kegiatan :

- a. Tersedianya data kepegawaian yang valid bagi seluruh Pegawai di Pusat dan UPT
- b. Terselenggaranya Pelayanan administrasi kepegawaian dengan baik
- c. Informasi Kepegawaian diberikan dengan cepat dan akurat
- d. Diketahui permasalahan kepegawaian, sehingga dapat segera dilakukan upaya penyelesaian masalah.

Kegiatan Penyusunan data dan Monev SIMPEG dan SAPK tahun 2016 ke UPT lingkup Ditjen KSDAE sebanyak sepuluh (9) lokasi yaitu : BKSDA Bali, BKSDA Bengkulu, BTN Kutai, BKSDA Sulawesi Tenggara, BBTN Bromo Tengger Semeru, BKSDA Sumatera Barat, BBTN Gunung Leuser, BKSDA DKI Jakarta dan BTN Kepulauan Seribu. Disamping itu juga dilakukan kegiatan rapat-rapat pembahasan sebanyak dua (2) kali.

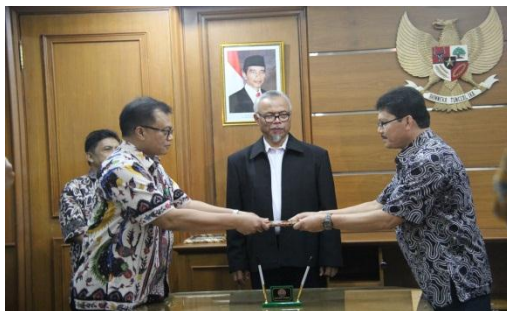
Alokasi anggaran untuk kegiatan ini yaitu Rp. 87,922,000,- dengan realisasi sebesar Rp. 87,539,650,- dan presentasi tercapai 99,565%.

2) Pelantikan/serah Terima Jabatan Pejabat Struktural

Tahun 2016 ini pelantikan dilaksanakan oleh Biro Kepegawaian dan Organisasi Setjen Kemen LHK. Untuk kegiatan serah terima jabatan selama tahun 2016 diadakan sebanyak enam (6) kali yaitu :

- Tanggal 19 Januari 2016 sebanyak 2 orang pejabat Eselon II bertempat di ruang rapat Setditjen KSDAE Blok I Lt.8
- Tanggal 18 Maret sebanyak 4 orang pejabat Eselon III dan IV bertempat di ruang rapat Setditjen KSDAE Blok I Lt.8
- Tanggal 21 Maret 2016 sebanyak delapan belas (18) orang Pejabat Eselon III dan IV Pusat bertempat di ruang rapat Setditjen KSDAE Blok I Lt.8
- Tanggal 31 Maret 2016 sebanyak 109 orang pejabat Eselon IIB, IIIA UPT/Pusat dan IVA Pusat bertempat di ruang rapat Setditjen KSDAE Blok I Lt.8
- Tanggal 8 Agustus 2016 sebanyak 2 orang Pejabat Eselon IIB bertempat di ruang rapat Setditjen KSDAE Blok I Lt.8
- Tanggal 30 Desember 2016 sebanyak 5 Orang bertempat di ruang rapat Sekjen Blok I Lt. 3.

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini yaitu Rp. 40.755.00.-, dengan realisasi sebesar Rp. 36.658.400,- dan presentasi tercapai 89.948%.





Gambar 37. Serah Terima Jabatan Struktural Lingkup Ditjen KSDAE

3) Formasi/Analisis Kebutuhan Pegawai

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, untuk perencanaan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap instansi wajib melakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja untuk menetapkan peta jabatan dan menghitung kebutuhan pegawai ASN.

Dengan ketentuan tersebut di atas setiap Instansi Pemerintah wajib melakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja yang disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan. Analisis jabatan dan analisis beban kerja tersebut dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi yang bersifat elektronik (e-formasi) yang memuat data antara lain :

Peta jabatan, yang sesuai dengan hasil analisis jabatan;

- a. Jumlah kebutuhan pegawai, berdasarkan hasil analisis beban kerja;
- b. Jumlah riil PNS yang saat ini tersedia;
- c. Perkiraan PNS yang akan berhenti mencapai batas usia pensiun (BUP) setiap tahunnya;
- d. Jumlah PNS yang mutasi pindah instansi;
- e. Jumlah PNS yang meninggal dunia dan berhenti di tahun sebelumnya;
- f. Jumlah kekurangan/kelebihan pegawai;

Tahun 2016 telah dilaksanakan kegiatan penyusunan Formasi Pegawai dengan melakukan perjalanan dinas ke 9 lokasi UPT KSDAE yaitu : BBKSDA Riau, BKSDA Kalimantan Selatan, BTN Bukit Tigapuluh, BTN Tanjung Puting, BTN Meru Betiri, BBTN Gunung Leuser, BKSDA DKI Jakarta, BTN Baluran dan BTN Gunung Halimun Salak. Untuk rapat penyusunan formasi dilaksanakan sebanyak tiga (3) kali

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini yaitu Rp. 90,100.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 89,958.350,- dan presentasi tercapai 99.843%.

4) Pemberkasan Kenaikan Pangkat Reguler (2 periode)

Kenaikan pangkat reguler adalah penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat yang ditentukan tanpa terikat pada jabatan. Kenaikan pangkat pilihan adalah kepercayaan dan penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atas prestasi kerjanya yang tinggi.

Masa Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil ditetapkan pada tanggal 1 April dan 1 Oktober setiap tahun, kecuali kenaikan pangkat anumerta dan kenaikan pangkat pengabdian. Masa kerja untuk kenaikan pangkat pertama Pegawai Negeri Sipil dihitung sejak pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.

Kegiatan dilakukan melalui rapat pembahasan, dengan membuat matriks usulan KP dari unit kerja lingkup Ditjen KSDAE yang mengusulkan berkas untuk KP, kemudian melakukan pengecekan kelengkapan dan keabsahan. Telah dilakukan pemberkasan

Kenaikan Pangkat sebanyak enam (6) kali serta rapat pembahasan sebanyak tujuh (7) kali. Selama Tahun 2016 sudah diusulkan kenaikan pangkat sebanyak tiga ratus enam puluh dua (362) orang dalam dua (2) periode yaitu April 223 orang dan Oktober sebanyak 139 orang.

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini yaitu Rp. 35,600,000,- dengan realisasi sebesar Rp . 35,399,750,- dan presentasi tercapai 98.92%.

5) Penataan Pejabat Struktural dan Non Struktural Lingkup KSDAE

Sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang serta merta berpengaruh terhadap pengisian jabatan struktural dan non struktural dimasing-masing organisasi. Kegiatan ini dilakukan dengan pertemuan/rapat yang dihadiri oleh Pejabat Struktural Eselon I dan II Lingkup Ditjen KSDAE.

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini yaitu Rp. 74,300,000,- dengan realisasi sebesar Rp .73,058,500,- dan presentasi tercapai 98,329%.

6) Bantuan Biaya Pindah

Kegiatan bertujuan membantu biaya pindah bagi pejabat struktural yang dimutasikan ketempat tugas yang baru berdasarkan SK Muatsi Pejabat Struktural Eselon IV dan III pada tahun 2016 sebanyak 5 orang pejabat Eselon III dan IV lingkup Ditjen KSDAE Pusat dan UPT. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini yaitu Rp. 23,200,000,- dengan realisasi sebesar Rp . 20,431,591,- dan presentasi tercapai 88,067%.

7) Koordinasi dan Konsultasi Kepegawaian

Kepegawaian merupakan masalah mendasar yang perlu dibenahi sehingga hak dan kewajiban pegawai dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada. Beberapa ketentuan kepegawaian telah diterbitkan namun belum seluruh pegawai memahami sehingga dalam proses kepegawaiannya sering mengalami hambatan. Kegiatan Koordinasi dan konsultasi kepegawaian dilaksanakan dalam dua bentuk kegiatan yaitu perjalanan dinas ke enam belas (16) UPT lingkup Ditjen KSDAE yaitu : BTN Alas Purwo, BKSDA Jawa Tengah, BKSDA Lampung, BTN Gunung Rinjani, BTN Kepulauan Seribu, BTN Gunung Halimun Salak, BTN Karimunjawa, BKSDA Yogyakarta, BTN Ujung Kulon, BBTN Gunung Gede Pangrango, BKSDA Bengkulu, BTN Gunung Merbabu, BKSDA Sulawesi Utara, BTN Tanjung Putting, BTN Gunung Merapi, BKSDA Bali dan perjalanan pendek.

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini yaitu Rp. 191,000,000,- dengan realisasi sebesar Rp. 189,320,933,- dan presentasi tercapai 99,121%.

8) Pemberian Penghargaan/penyelesaian kasus kepegawaian

Ada 2 Jenis Pemberian Penghargaan yang difasilitasi oleh Bagian Kepegawaian dan Ortala terhadap PNS yaitu :

1. Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010, Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai masa kerja sepuluh tahun, dua puluh tahun, atau tiga puluh tahun atau lebih secara terus menerus dan menunjukkan kesetiaan, kecakapan, kejujuran dan kedisiplinannya, serta tidak dalam menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang dan tingkat berat dalam masa kerja tersebut sehingga dapat dijadikan teladan bagi setiap pegawai lainnya.

Jumlah usulan calon penerima Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem pada Hari Ulang Tahun Korpri yang Ke 44 tanggal 29 November 2015 sebanyak 149 Orang, Hari Proklamasi Republik Indonesia Ke 71 Tanggal 17 Agustus 2016 sebanyak 365 Orang, Hari Bakti Rimbawan Yang Ke 34 Pada Tanggal 16 Maret 2017 sebanyak 53 Orang.

2. Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010, Warga Negara Indonesia yang berjasa dalam memberikan dharma baktinya yang besar kepada bangsa dan negara Indonesia dalam bidang tertentu, sehingga bermanfaat bagi lingkungannya dan dapat dijadikan teladan bagi orang lain.

Yang dimaksud berjasa dalam memberikan darmabaktinya adalah:

- a. Mereka yang melaksanakan pengabdian yang besar dalam bermanfaat bagi Bangsa dan Negara
- b. Hasil karya/ Prestasi yang disumbangkan, dapat bermanfaat bagi masyarakat/ lingkungannya, bangsa dan Negara.
- c. Pengabdian/ Hasil karya/ Prestasi yang disumbangkan dapat dijadikan teladan bagi orang lain dan diakui dan mempunyai dampak positif secara luas dilingkungan instansi atau daerahnya.

Jumlah usulan calon penerima Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem pada Hari Proklamasi Republik Indonesia Ke 71 Tanggal 17 Agustus 2016 sebanyak 1 Orang.

3. Penyelesaian Kasus Kepegawaian

Berdasarkan PP. Nomor 53 Tahun 2010 pasal 1 angka 1 dinyatakan bahwa Disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.

Pelanggaran disiplin merupakan setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak mentaati kewajiban atau melanggar ketentuan disiplin PNS baik yang dilakukan di luar maupun didalam jam kerja. Terkait dengan hal tersebut di atas, Sesuai Pasal 7 PP Nomor 53 tahun 2010 dinyatakan Tingkat Hukuman Disiplin yaitu;

- a. Hukuman disiplin ringan
- b. Hukuman disiplin Sedang
- c. Hukuman disiplin berat

Terhadap PNS yang melanggar PP.Nomor 53 tahun 2010 telah diproses sesuai aturan oleh Bagian kepegawaian Sekretaris Ditjen KSDAE (tingkat sanksi ringan dan sedang, sedangkan tingkat berat merupakan kewenangan Biro Kepegawaian dan untuk PNS yang telah memenuhi unsur sanksi berat akan diusulkan kepada Biro Kepegawaian untuk segera dibahas oleh tim sanksi disiplin, sebagai berikut;

1. Proses Tindak Lanjut Hasil Audit Inpektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ;
 - a. Sanksi disiplin ringan berupa teguran tertulis ; 13 orang
 - b. Sanksi disiplin sedang berupa penundaan KGB ; 12 orang
 - c. Sanksi disiplin berat Berupa penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun, Pembebasan dari Jabatan, Pemberhentian dengan Hormat sebagai PNS dan Pemberhentian tidak dengan horma sebagai PNS terdapa ; 12 orang, sedangkan 1 orang masih dalam proses.

2. Sanksi Disiplin PNS yang tidak melaksanakan tugas / melanggar PP. Nomor 53 tahun 2010;
 - a. Sanksi Ringan ; 8 orang
 - b. Sedang ; 4 orang
 - c. Berat ; 32 orang
3. Proses Pemberian Ijin Perceraian /Penolakan Ijin Perceraian bagi PNS sesuai PP Nomor 45 tahun 1990
 - a. Pemberian Ijin Perceraian PNS yang sesuai aturan ; 7 orang
 - b. Penolakan Ijin Perceraian karena tidak sesuai aturan, tidak memenuhi syarat / ketentuan PP.45 tahun 1990 ; 7 orang
 - c. Masih dalam proses Biro Kepegawaian dan Organisasi KLHK dan proses UPT ; 21 orang

Kegiatan Perjalanan Dinas dalam Rangka Penyelesaian Kasus Kepegawaian ke empat (4) lokasi UPT Ditjen KSDAE yaitu : BTN Bukit Baka Bukit Raya, BTN Gunung Ciremai, BBKSDA Sumatera Utara, BKSDA Kalimantan Timur serta tiga belas (13) kali rapat pembahasan. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini yaitu Rp. 77,250,000,- dengan realisasi sebesar Rp. 76,921,450,- dan presentasi tercapai 99,575%.

9) **Penyegaran Operator SIMPEG**

Kegiatan Penyegaran Operator SIMPEG Tahun 2016 ini dilaksanakan pada Hari Rabu s/d Jum'at tanggal 24 s/d 26 Agustus 2016 Bertempat di Papyrus Tropicall Hotel, Jl. Perdana Raya Kav.12 Komplek Budi Agung, Bogor.

Peserta kegiatan adalah Operator SIMPEG lingkup Ditjen KSDAE pusat dan UPT berjumlah 92 orang, dengan mengundang 5 orang Narasumber dari Sub Bagian Data dan Informasi Biro Kepegawaian dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini yaitu Rp. 248,750,000,- dengan realisasi sebesar Rp. 242,111,000,- dan presentasi tercapai 97,331%.

Operator SIMPEG KSDAE mendapat penghargaan Operator terbaik 1, 2, dan 3 dalam kegiatan Rapat Konsultasi Kepegawaian dan Evaluasi Kinerja yang diadakan Biro Kepegawaian dan Organisasi pada tanggal 1-3 Desember 2016.



Gambar 38. Kegiatan Penyegaran Operator SIMPEG Tahun 2016

10) **Penyusunan Data/Monev LHKASN lingkup Ditjen KSDAE**

Sesuai amanat Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.19 Tahun 2015 Kepala Bagian Kepegawaian dan Ortala selaku Koordinator Pengelola LHKPN dan LHKSN lingkup Ditjen KSDAE yang salah satu tugasnya adalah untuk menyusun Daftar nama Pejabat Wajib Lapor LHKPN / LHKASN dan menyusun daftar perubahan nama Pejabat Wajib Lapor LHKPN / LHKASN di masing-masing unit kerjanya untuk

disampaikan kepada Koordinator Pengelola LHKPN/LHKASN lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dalam rangka Monev / Penyusunan Penyelenggara Negara / Asn Wajib lapor LHKPN/LHKASN dilakukan melalui kegiatan rapat-rapat pembahasan sebanyak dua (2) kali, penyediaan ATK dan bahan komputer, Pengadaan bahan serta pengambilan data ke dua belas (12) UPT yaitu : BBTN BBS, BTN Way Kambas, BKSDA DKI Jakarta, BKSDA Jawa Tengah, BKSDA Sumbar, BKSDA Kalimantan Timur, BTN Gunung Merbabu, BTN Gunung Rinjani, BKSDA NTB, BKSDA Kalimantan Barat, BBTN Gunung Gede Pangrango, dan BBKSDA Jawa Barat.

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini yaitu Rp. 58,100,000,- dengan realisasi sebesar Rp. 57,709,600,- dan presentasi tercapai 97,331%.

11) Penyusunan Peta Jabatan Pegawai

Dengan ditetapkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 perjalanan reformasi birokrasi khususnya di bidang SDM Aparatur akan semakin jelas arahnya yang pada akhirnya dapat mendukung pembangunan dan cita-cita bangsa. Kaitannya dengan perencanaan kebutuhan pegawai, disebutkan dalam Pasal 55 bahwa tahapan pertama dalam majemen ASN adalah penyusunan dan penetapan kebutuhan pegawai.

Peta jabatan adalah susunan nama dan tingkat Jabatan Struktural dan Fungsional yang tergambar dalam suatu struktur unit organisasi dari tingkat paling rendah sampai dengan yang tinggi. Peta Jabatan menjadi salah satu syarat penting yang harus dibuat oleh setiap instansi sebelum mengajukan formasi. Dari pemetaan jabatan dapat diketahui kebutuhan serta pembagian yang jelas di suatu instansi

Penyusunan peta jabatan mencakup kegiatan yang memetakan kondisi PNS pada setiap Unit kerja sesuai dengan jabatan yang dipangku pada masing-masing Unit Kerja lingkup Ditjen KSDAE. Untuk tahun 2016 kegiatan melalui rapat-rapat pembahasan sebanyak empat (4) kali dan perjalanan dinas dalam rangka penyusunan Peta Jabatan Pegawai pada 9 UPT KSDAE yaitu : BKSDA Kalimantan Selatan, BTN Bukit Tigapuluh, BTN Tanjung Puting, BTN Meru Betiri, BBTN Gunung Leuser, BKSDA DKI Jakarta, BBTN Bromo Tengger Semeru, BBKSDA Riau, BKSDA Yogyakarta.

Alokasi Anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp. 64,600.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 64,163,050,- dan presentasi tercapai 99,324%.

b. Sub Bagian Administrasi Jabatan Fungsional

Komponen kegiatan pada Sub Bagian Administrasi Jabatan Fungsional terdiri dari :

1) Penilaian DUPAK

Kegiatan penilaian DUPAK bertujuan untuk melayani secara administratif karir jabatan fungsional. Pada tahun 2016 Subbag Administrasi Jabatan Fungsional telah melaksanakan 7 kali rapat pembahasan pleno tim penilai pusat dan melaksanakan sosialisasi bagi tim penilai DUPAK yang dilakukan pada 15 UPT. Pada tahun 2016, Pejabat fungsional Polhut dan PEH yang mengajukan usulan DUPAK sebanyak 1844 orang dengan jumlah DUPAK sebanyak 3093 buku. Dari proses penilaian dan penetapan terhadap usulan DUPAK tersebut menghasilkan keluaran (*output*) sebanyak 2187 yang terdiri dari 1082 PAK dan 1005 HAPAK. Kendala yang masih sering dialami yaitu perbedaan persepsi antara Tim Penilai yang berada di UPT dan Tim Penilai Pusat dalam Penilaian DUPAK., sehingga perlu adanya sosialisasi ke UPT terkait hal tersebut. Untuk mendukung kegiatan penilaian DUPAK, dialokasikan anggaran kegiatan sebesar Rp.

169.900.000,- dengan perolehan realisasi anggaran kegiatan sebesar Rp. 167.596.550.- atau sebesar 98.64%.



Gambar 39. Kegiatan Penilaian DUPAK

2) Monitoring Jabatan Fungsional Lingkup Ditjen KSDAE

Kegiatan monitoring jabatan fungsional bertujuan untuk memantau dan memetakan karakteristik pemangku jabatan fungsional per unit kerja baik berdasarkan jumlah, pangkat, jabatan dan periode penilaian DUPAK. Pada tahun 2016, Subbag Administrasi Jabatan Fungsional telah melaksanakan kegiatan monitoring jabatan fungsional lingkup Ditjen KSDAE ke 10 lokasi/ UPT dengan menghasilkan keluaran (output) berupa data terbaru/update data jabatan fungsional. Diantaranya :

1. Polisi Kehutanan sejumlah 2323 Orang;
2. Pengendali Ekosistem Hutan sejumlah 1131 Orang;
3. Penyuluh Kehutanan sejumlah 246 Orang;
4. Pranata Komputer sejumlah 14 Orang;
5. Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa sejumlah 21 Orang;
6. Analis Kepegawaian sejumlah 6 Orang.

Untuk mendukung kegiatan Monitoring Jabatan Fungsional Lingkup Ditjen KSDAE, dialokasikan anggaran kegiatan sebesar Rp. 225.200.000,- dengan perolehan realisasi anggaran kegiatan sebesar Rp. 223.193.500.- atau sebesar 99.11 %.

3) Pembinaan Jabatan Fungsional Lingkup Ditjen KSDAE

Kegiatan pembinaan jabatan fungsional dilakukan melalui metode paparan materi, motivasi dan sosialisasi peraturan jabatan fungsional terhadap UPT yang mengalami kendala dalam pengelolaan administrasi jabatan fungsional.

Pada tahun 2016, Subbag Administrasi Jabatan Fungsional telah melaksanakan kegiatan pembinaan jabatan fungsional ke 18 lokasi/UPT dengan menghasilkan keluaran (output) berupa dokumen pembinaan jabatan fungsional. Kegiatan tersebut dilaksanakan selain untuk menyampaikan beberapa aturan yang baru tetapi guna menambah pengetahuan teman - teman di daerah terkait kebijakan dan aturan kepegawaian sehingga tidak terjadi miss komunikasi atau miss informasi.

Untuk mendukung kegiatan Pembinaan Jabatan Fungsional Lingkup Ditjen KSDAE, dialokasikan anggaran kegiatan sebesar Rp. 121.300.000,- dengan perolehan realisasi anggaran kegiatan sebesar Rp. 119.875.200.- atau sebesar 98,82%.



Gambar 40. Kegiatan Pembinaan Jabatan Fungsional

4) Kegiatan Penunjang Pengembangan Fungsional

Kegiatan ini yaitu Sertifikasi Kompetensi Jabatan Fungsional yang dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Hutan Indonesia (LSPHI) di beberapa wilayah baik Balai KSDA maupun Balai Taman Nasional. Tahun 2016 LSPHI melaksanakan uji kompetensi bagi Polisi Kehutanan, Pengendali Ekosistem Hutan dan Penyuluh Kehutanan sejumlah 56 Orang.

Diantaranya :

1. Balai Besar KSDA Riau 13 Orang;
2. Balai Besar KSDA Jawa Barat 19 Orang;
3. Balai Taman Nasional Tesso Nilo 7 Orang;
4. Balai Taman Nasional Bukit Tigapuluh 8 Orang;
5. Balai Taman Nasional Gunung Ciremai 9 Orang.

Untuk mendukung Kegiatan Penunjang Pengembangan Fungsional, dialokasikan anggaran kegiatan sebesar Rp. 101.100.000,- dengan perolehan realisasi anggaran kegiatan sebesar Rp. 99.808.800.- atau sebesar 98,72%.



Gambar 41. Kegiatan Penunjang Pengembangan Fungsional UPT

5) Pemberkasan Kenaikan Pangkat Fungsional

Kegiatan Pemberkasan Kenaikan Pangkat Fungsional dilakukan sebanyak 2 periode dalam satu tahun anggaran yaitu periode April 2016 dan Oktober 2016. Kegiatan ini dikhususkan untuk jabatan fungsional tertentu dalam pelayanan administrasi kepegawaian. Jumlah Pejabat Fungsional yang diproses untuk kenaikan pangkat sebanyak periode April sebanyak 305 orang dan periode Oktober sebanyak 358 Orang. Untuk mendukung kegiatan Pemberkasan Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional, dialokasikan anggaran kegiatan sebesar Rp. 58.050.000,- dengan perolehan realisasi anggaran kegiatan sebesar Rp. 56.967.000.- atau sebesar 98,13%.

6) Pembinaan Pegawai Lingkup Ditjen KSDAE

Kegiatan pembinaan pegawai lingkup Ditjen KSDAE dilakukan 3 kali dalam satu tahun yaitu Senam sehat setiap hari jumat pagi, acara pembinaan Pegawai oleh Bapak Direktur Jenderal KSDAE di Ruang Auditorium Gedung Manggala Wanabhakti dalam bentuk pembinaan rohani dan pembinaan jasmani, serta pembinaan yang dilaksanakan pada acara Buka Bersama antara Jajaran Pejabat Lingkup Direktorat Jenderal KSDAE bersama seluruh Staffnya. Bentuk Pembinaan rohani dilakukan dengan cara mengundang seluruh pegawai lingkup Ditjen KSDAE dan diberikan materi motivasi kerja dan siraman rohani oleh narasumber yang berkompeten dibidangnya, sedangkan pembinaan jasmani dilakukan melalui senam bersama yang diselenggarakan setiap hari jumat di kantor Bogor sehingga membuat kebersamaan dan kerjasama yang baik diantara Pegawai Lingkup Direktorat Jenderal KSDAE. Untuk mendukung kegiatan Pembinaan Pegawai Lingkup

Ditjen KSDAE, dialokasikan anggaran kegiatan sebesar Rp. 118.350.000,- dengan perolehan realisasi anggaran kegiatan.



Gambar 42. Pembinaan Pegawai Lingkup Setditjen KSDAE Tahun 2016

c. Sub Bagian Organisasi dan Tata Laksana

Komponen kegiatan pada Sub Bagian Organisasi dan Tata Laksana terdiri dari:

1) Penyusunan Analisis Jabatan

Perubahan organisasi Kementerian Kehutanan menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-2/2015, menjadikan 3 (tiga) Eselon II yang sebelumnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ditjen PHKA sekarang Ditjen KSDAE, berkembang menjadi 3 (tiga) unit Eselon I yaitu: Ditjen Gakkum LHK, Ditjen PPI dan Ditjen PSKL. Hal ini berdampak beralihnya sebagian tugas dan fungsi pada Ditjen KSDAE dan 3 (tiga) unit Eselon I tersebut.

Implikasi atas perubahan organisasi telah ditetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-2/2015 dan diikuti dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 7/MenLHK/Setjen/OTL.0/1/2016 jo P. 47/Menlhk/Setjen/OTL.0/5/2016 dan No. 8/MenLHK/Setjen/OTL.0/1/2016 sebagai pengganti atas 2 (dua) Permenhut sebelumnya. Berkenaan dengan hal tersebut, perlu dilakukan penyusunan analisis jabatan UPT lingkup Ditjen KSDAE sebagai dasar untuk melaksanakan tugas dan fungsi jabatan, mutasi pegawai, promosi, pelatihan, penilaian kinerja dan kompensasi pegawai.

Tujuan penyusunan analisis jabatan adalah untuk menyediakan informasi jabatan sebagai fondasi/dasar bagi program manajemen kepegawaian, kelembagaan, ketatalaksanaan dan pengawasan UPT Ditjen KSDAE. Kegiatan ini perlu dilaksanakan untuk memberikan gambaran tentang tugas dan tanggung jawab setiap pelaksanaan pekerjaan staf. Manfaat dari kegiatan analisis jabatan antara lain dapat diperolehnya data jabatan yang akurat, tersusun secara sistematis dan terorganisir yang nantinya dapat digunakan sebagai informasi jabatan dalam melakukan rekrutmen, seleksi dan penempatan pegawai.

Pelaksanaan penyusunan analisis jabatan dilakukan menggunakan metode pengumpulan data dan informasi yang bersumber dari data primer dan sekunder yang dihimpun melalui mekanisme telaahan terhadap peraturan terkait analisis jabatan, rencana kerja, struktur organisasi dan tata kerja, informasi kepegawaian lainnya serta wawancara terhadap pemegang jabatan, pimpinan unit kerja, nara sumber lainnya yang berhubungan dengan analisis jabatan. Lokasi tujuan yang dijadikan pengambilan data dan informasi kegiatan penyusunan analisis jabatan adalah: 1) BKSDA NTB, 2) BBKSDA NTT, 3) BTN Gunung Merbabu, 4) BBKSDA Jawa Barat, dan 5) BBTN Gunung Gede Pangrango.

Capaian/output penyusunan analisis jabatan terdiri dari:

1. Rekapitulasi kegiatan rutinitas UPT KSDA dan TN yang telah diinventarisir;
2. Telah ditetapkan nama jabatan fungsional umum yang berada dibawah jabatan struktural yang mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P. 36/MenLHK/Setjen/KUM.1/3/2016 dan format peta jabatan yang menggambarkan susunan seluruh jabatan yang ada dan kedudukannya dalam unit organisasi Balai Besar KSDA tipe A, Balai Besar KSDA tipe B, Balai TN tipe A dan Balai TN tipe B yang telah di informasikan ke seluruh UPT lingkup Ditjen KSDAE melalui surat Setditjen KSDAE No. S.81/SET.KOTL/OTL.0/1/2017.
3. Telah disusun informasi jabatan pejabat struktural Unit Pelaksana Teknis lingkup Ditjen KSDAE yang mengacu pada tugas dan fungsi UPT KSDA dan TN berdasarkan Peraturan Menteri No P.8 dan P.7/Menlhk /Setjen /OTL.0/1/2016;

Capaian tersebut dituangkan dalam Surat Edaran Setditjen KSDAE No. S.81/SET.KOTL/OTL.0/1/2017 penetapan nama jabatan dan format peta jabatan ke seluruh UPT lingkup Ditjen KSDAE dan draft pedoman analisis jabatan struktural Balai Besar KSDA, Balai Besar TN, Balai KSDA dan Balai TN. Output pedoman analisa jabatan ditargetkan baru terealisasi pada tahun 2017 disebabkan pejabat yang berwenang menandatangani, baru ditetapkan definitif pada akhir tahun 2016 (30 Desember 2016).

Tindak lanjut penyusunan analisis jabatan setelah penetapan nama jabatan fungsional, format peta jabatan dan penyusunan informasi jabatan struktural UPT lingkup Ditjen KSDAE, pada tahun anggaran 2017 akan dilaksanakan penyusunan Informasi Jabatan Fungsional Umum UPT Ditjen KSDAE.

Pagu dana yang dianggarkan sesuai dengan Anggaran DIPA BA 29 Sekretariat Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Tahun 2016 sebesar Rp. 131. 948.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 131.406.400,- atau 99,59%.



Gambar 43. Pembahasan Penyusunan Analisis Jabatan

2) Penataan Organisasi dan Wilayah Kerja

Kegiatan Penataan Organisasi dan Wilayah Kerja dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor Peraturan Menteri LHK Nomor P.7/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional dan Peraturan Menteri LHK Nomor P.8/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya. Namun, pada tataran implementasi, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana tersebut di atas, tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan, hal ini disebabkan karena terdapat beberapa kendala atau permasalahan antara lain eksistensi lokasi kantor Balai/Bidang Konservasi Sumber Daya Alam/ Balai/Bidang Pengelolaan Taman Nasional yang saat ini dinilai sudah tidak efektif karena letaknya berjauhan dengan lokasi kantor, yang berimbas terhadap pengawasan maupun penilaian kinerja terhadap bawahannya. Sebagai upaya untuk mengatasi

permasalahan tersebut, beberapa UPT mengajukan usulan perubahan lokasi kantor dan wilayah kerja

Pada PermenLHK Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terdapat perubahan organisasi Kementerian Kehutanan menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menjadikan 2 (dua) Unit Eselon II, yang sebelumnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal PHKA, saat ini menjadi berubah nomenklatur dan berkembang menjadi 3 (tiga) unit Eselon I yaitu Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (GAKKUM LHK), Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) dan Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL).

Maksud dilaksanakannya kegiatan penataan organisasi dan wilayah kerja UPT Ditjen KSDAE adalah untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi organisasi Ditjen KSDAE dalam mengelola kawasan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya.

Tujuannya adalah untuk merumuskan konsep/kerangka kebijakan berkaitan dengan Penataan Organisasi dan Wilayah Kerja UPT Ditjen KSDAE dalam mewujudkan efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan kawasan konservasi.

Lokasi kegiatan Penataan Organisasi dan Wilayah Kerja pada tahun anggaran 2016 adalah:

1. Balai Besar KSDA Jawa Barat
2. Balai Besar KSDA NTT
3. Balai KSDA Jawa Tengah
4. Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat
5. Balai Taman Nasional Way Kambas
6. Balai Taman Nasional Berbak Sembilang
7. Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung
8. Balai Taman Nasional Kayan Mentarang.

UPT KSDAE yang mengajukan perubahan lokasi kantor dan wilayah kerja sebanyak 23 UPT yang terdiri dari 13 (tigabelas) UPT Balai Besar/Balai TN dan 10 (sepuluh) Balai Besar/Balai KSDA. Target dari kegiatan penataan organisasi dan wilayah kerja adalah :

1. Terbentuknya Tim Kecil yang bertugas mempersiapkan Naskah Akademis;
2. Tersusunnya Naskah Akademis sebagai salah satu syarat perubahan lokasi kantor dan wilayah kerja;
3. Draft perubahan PermenLHK Nomor P.7/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional, yang telah dirubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.47/Menlhk/Setjen/OTL.0/5/2016
4. Draft Perubahan PermenLHK Nomor : P.8/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam.

Dari lokasi yang mengajukan perubahan lokasi kantor dan wilayah kerja belum semua ditinjau ke lapangan karena terkendala oleh anggaran yang tersedia dan diharapkan dapat dilanjutkan pada anggaran tahun berikutnya. Lokasi yang telah ditinjau lapangan adalah :

1. BTN Way Kambas;
2. BTN Sembilang;
3. BTN Bantimurung;
4. BBKSDA NTT;
5. BTN Kerinci Seblat;

6. BTN Kayan Mentarang;

Dari target tersebut telah dicapai :

1. Telah terbentuk Tim Penataan Organisasi dan Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem berdasarkan Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem No. SK.153/Set/KOTL/OTL.0/8/2016 tanggal 23 Agustus 2016 ;
 2. Draft Naskah Akademis Penataan Organisasi dan Wilayah Kerja;
 3. Draft perubahan PermenLHK Nomor P.7/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional, yang telah dirubah dengan PermenLHK No.P.47/Menlhk/Setjen/OTL.0/5/2016;
 4. Draft perubahan PermenLHK Nomor : P.8/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam.
- Anggaran Penataan Organisasi dan Wilayah Kerja sebesar Rp.298.100.000.- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.296.017.400 atau 99,30%.



Gambar 44. Kegiatan rapat pembahasana Penataan Organisasi

3) Penyusunan Tata Hubungan Kerja

Kegiatan Penyusunan Tata Hubungan Kerja bertujuan untuk memberikan arahan, pedoman dan gambaran unit-unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi unit lain sehingga dimungkinkan terjadinya tumpang tindih dan saling melengkapi. Untuk itu diperlukan suatu penataan tentang pelaksanaan tugas fungsi dan kerjasama antar unit dimaksud. Tata Hubungan Kerja diharapkan akan lebih memperjelas batas tugas pekerjaan dan batas wewenang antar unit kerja. Tata Hubungan Kerja disusun sesuai dengan urutan langkah-langkah kegiatan agar dapat menggambarkan prosedur kerja yang jelas dari kegiatan tersebut.

Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk rapat pembahasan baik rapat di dalam kantor maupun di luar kantor dan meminta masukan kepada beberapa Unit Pelaksana Teknis yaitu BBTN Bukit Barisan Selatan, BBKSDA Jawa Timur, BBKSDA Sulawesi Selatan, BBTN Kerinci Seblat, BBTN Gunung Gede Pangrango, BBKSDA Jawa Barat dan BTN Ujung Kulon.

Kegiatan penyusunan tata hubungan kerja dilaksanakan dalam bentuk penyusunan draft peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem tentang Pedoman Tata Hubungan Kerja Organisasi lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.

Output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah tersusunnya draft peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem tentang Pedoman Tata Hubungan Kerja Organisasi lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.

Hingga akhir tahun 2016 telah disusun draft peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem tentang Pedoman Tata Hubungan Kerja Organisasi lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.

Pada tahun 2016, Subbagian Organisasi dan Tata Laksana telah melaksanakan kegiatan Penyusunan Tata Hubungan Kerja ke lokasi/UPT. Untuk mendukung kegiatan Penyusunan Tata Hubungan Kerja, dialokasikan anggaran kegiatan sebesar Rp. 145.500.000.- dengan perolehan realisasi anggaran kegiatan sebesar Rp. 140.068.750.- atau sebesar 96,29 %.

Sampai akhir tahun 2016, penyusunan draft peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem tentang Pedoman Tata Hubungan Kerja Organisasi lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem masih belum final, sehingga masih perlu dilakukan pembahasan pada tahun 2017.



Gambar 45. Rapat Pembahasan dan Kunjungan ke Lapangan Tata Hubungan Kerja

4) Evaluasi Kinerja Organisasi lingkup Ditjen KSDAE

Dalam rangka mendukung upaya evaluasi kinerja organisasi di Lingkup Ditjen KSDAE diperlukan suatu alat ukur kinerja yang benar-benar dapat menggambarkan kondisi riil capaian kinerja organisasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan dijadikan bahan umpan balik (*feedback*) yang tepat sasaran bagi perbaikan kinerja organisasi secara komprehensif. Oleh karena itu pada tahun 2016 sedang disusun suatu *tools* evaluasi kinerja organisasi Lingkup Ditjen KSDAE.

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memastikan bahwa Ditjen KSDAE dapat melakukan evaluasi kinerja organisasi Unit Pelaksana Teknis, dalam rangka memberikan gambaran tingkat keberhasilan organisasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya maupun tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan dalam rangka mendukung peningkatan kinerja organisasi UPT Lingkup Ditjen KSDAE.

Kegiatan ini berlangsung dalam bentuk rapat pembahasan baik di dalam kantor maupun di luar kantor dan juga meminta masukan kepada beberapa UPT sampel diantaranya BTN Way Kambas, BKSDA Yogyakarta, BBTN Gunung Gede Pangrango, BTN Berbak dan Sembilang, Balai KSDA NTB, BTN Alas Purwo, BTN Halimun Salak, BTN Ciremai.

Kegiatan evaluasi kinerja organisasi dilaksanakan dalam bentuk penyusunan draf pedoman evaluasi kinerja organisasi UPT Lingkup Ditjen KSDAE. Draf kemudian dibahas secara berjenjang mulai dari internal Subbagian Ortala, Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana. Output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah tersusunnya draf pedoman evaluasi kinerja organisasi UPT Lingkup Ditjen KSDAE.

Sasaran Kegiatan

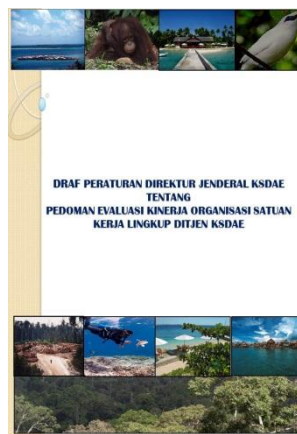
- a. Mendapatkan masukan atas draf pedoman evaluasi kinerja organisasi UPT lingkup Ditjen KSDAE.
- b. Menyamakan persepsi berbagai kriteria dan indikator evaluasi kinerja organisasi
- c. Memperdalam pemahaman terkait kriteria dan indikator yang digunakan
- d. Disepakatinya draf pedoman evaluasi kinerja organisasi UPT lingkup Ditjen KSDAE.

Output kegiatan yang dicapai hingga akhir 2016, draf pedoman evaluasi kinerja lingkup Ditjen KSDAE telah dibahas beberapa kali, dan akhirnya disepakati menjadi draf pedoman evaluasi kinerja satuan kerja lingkup Ditjen KSDAE. Adanya masukan dari Itjen pada akhir pembahasan pada tahun 2016, terkait perlunya draf pedoman evaluasi kinerja organisasi diterapkan bukan hanya untuk UPT, namun juga untuk satuan kerja di pusat lingkup Ditjen KSDAE maka pembahasan kriteria dan indikator belum dapat dibahas secara mendetail, hal ini dikarenakan terbatasnya alokasi dana yang tersedia.

Sampai dengan akhir 2016, draf pedoman evaluasi masih belum final, sehingga masih perlu dilakukan pembahasan pada tahun 2017, untuk menyepakati kriteria dan indikator evaluasi kinerja organisasi baik di pusat maupun pada tingkat UPT. Dalam rangka mendukung penyusunan draf pedoman evaluasi ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 117.370.00,- dengan realisasi anggaran Rp.114.969.915,- atau sebesar 97,96%.



Gambar 46. Pembahasan Draft Pedoman Evaluasi Kinerja Organisasi



Gambar 47. Cover Buku Draft Peraturan Dirjen KSDAE tentang Pedoman Evaluasi

2. Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik

Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik terbagi dalam tiga sub bagian yaitu Kerjasama Teknik, Peraturan Perundang-Undangan serta Pertimbangan dan Advokasi Hukum. Kegiatan tahun 2016 per sub bagian tersaji sebagai berikut :

a. Sub Bagian Kerjasama Teknik

Komponen kegiatan pada Sub Bagian Kerjasama Teknik terdiri dari:

1) Penelaahan Proposal dan Perjanjian Kerjasama

Penelaahan proposal dan kerjasama dilaksanakan dengan melakukan penelaahan terhadap proposal terkait dengan kerjasama baik dalam negeri dan luar negeri yang bersifat bilateral maupun multilateral, penelaahan terkait dengan hibah dalam negeri dan luar negeri yang bersifat bilateral maupun multilateral.

Telah tercatat beberapa kerjasama dan hibah yang melewati proses negosiasi dan akan disusun Rencana Pelaksanaan Program antara lain Forest Program III dan Forest Program IV yang merupakan kerangka kerjasama bilateral antara Pemerintah Indonesia dan Jerman. Adapun tindaklanjut pelaksanaan proyek dan rencana pembahasan anggaran hibah luar negeri di antaranya pembahasan rencana kerja untuk komponen R1 dan pembahasan usulan anggaran 2016 dan 2017. Forest Program IV merupakan integrasi upaya PLTA Bakaru I dan pembangunan Bakaru II dengan peningkatan pengelolaan DAS Mamasa dengan total dana hibah dari Pemerintah Jerman sebesar Euro 23,5 juta. Selain itu, penelaahan proposal dan perjanjian kerjasama dilakukan terhadap rencana kerjasama antara Unit Pelaksana Teknis bersama masing-masing mitra dengan berbagai ruang lingkup kerjasama.

Dalam hal kerjasama multilateral, telah dimulai diskusi lingkup ASEAN dalam kerangka ASEAN Centre of Biodiversity (ACB) yang masuk dalam tahap Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengesahan Perjanjian Pendirian Pusat ASEAN untuk Keanekaragaman Hayati. Penelaahan perjanjian kerjasama dengan NGO Internasional dilaksanakan terhadap perjanjian kerjasama dengan NGO Internasional dilaksanakan terhadap 7 (tujuh) lembaga yaitu The Aspinall Foundation, Frankfurt Zoological Society (FZS), Orangutan Foundation (OF UK), Rare Animal Effort (RARE), Zoological Society of London (ZSL), Wildlife Conservation Society (WCS), dan Flora Fauna Indonesia (FFI).

Untuk entitas lain yaitu Host Country Agreement (HCA) IUCN. Adapun prosesnya adalah penyiapan naskah urgensi sebagai pertimbangan penerbitan Keputusan Presiden untuk pelaksanaan Pemerintah Indonesia sebagai Host Country IUCN serta pertimbangan pendirian kantor perwakilan IUCN di Indonesia. Progres yang telah dicapai adalah persetujuan Presiden RI dalam hal izin prakarsa untuk penyusunan Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan IUCN tentang Pendirian kantor IUCN di Indonesia. Berikut contoh tabel penelaahan proposal kerjasama yang telah dilakukan antara UPT dengan mitra.

Tabel 14. Penelaahan Proposal Perjanjian Kerjasama

Penelaahan Proposal dan Perjanjian Kerjasama	Hasil Penelaahan Proposal
Nota Kesepahaman Sementara antara Dirjen KSDAE dengan PT. Kelian Equatorial Minin tentang Pembangunan Suaka Badak Sumatera di Kalimantan	Perlu perhatian terhadap P.85/Menhut-II/2014
Permohonan Perpanjangan PKS Tahap III Pengelolaan SM Paliyan Yogyakarta oleh Mitsui Sumitomo Insurance Co.Ltd	Terdapat penyesuaian terhadap P/85/Menhut-II/2014

PKS antara KSDA Kalteng – Genting Plantation	Diperlukan penyempurnaan <i>draft</i> PKS melalui penyesuaian dengan P.85/Menhut-II/2014.
Naskah kerjasama antara BBTNBBBS dengan PT Telekomunikasi Indonesia	Perlunya perpanjangan PKS
PKS antara Balai TN Wasur dengan Universitas Musamus	Sudah terdapat penyesuaian konsep PKS dengan P.85/2014.
PKS antara BTNK dengan PT PLN (Persero)	BTNK segera menyusun arahan program dan ToR sebagai pedoman PT PLN (Persero) dalam melaksanakan kerjasama
PKS antara TN Gunung Ciremai dengan PT. Yamaha Musik (Distributor)	Draft pada dasarnya merupakan perpanjangan PKS antara TN Gunung Ciremai dengan JICA dan PT . Yamaha Musik (Distributor), sehingga perlu penyempurnaan pada draft seperti penyesuaian dengan P/85/Menhut-II/2014.

Adapun anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.67.650.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.66.783.050 (96,88%).



Gambar 48. Kegiatan Penelaahan Proposal dan Perjanjian Kerjasama

2) Pemantauan dan Evaluasi Kerjasama

Pemantauan dan evaluasi kerjasama bertujuan untuk memonitoring kegiatan yang menjadi fokus kerjasama mitra agar sesuai dengan ruang lingkup kerjasama yang telah disepakati oleh Ditjen KSDAE dengan mitra kerjasama. Selain monitoring, Ditjen KSDAE juga melakukan evaluasi kerjasama dengan mitra, yang dilakukan paling lama setiap tahunnya untuk memperoleh informasi apakah kerjasama dengan mitra dapat diteruskan atau dihentikan.

Kegiatan pemantauan dan evaluasi kerjasama telah dilakukan dengan berbagai mitra kerjasama, salah satu mitra yaitu Yayasan Penyelamatan Orangutan Borneo (BOS). Mengingat kegiatan Yayasan BOS sesuai dengan ruang lingkup perjanjian kerjasama, maka tindak lanjut yang didasari pada evaluasi yang telah dilakukan adalah melanjutkan kemitraan dengan Yayasan BOS.

Tabel 15. Rekap Data yang telah dipantau dan dievaluasi

Lokasi	Dalam Rangka
BTN Sebangau	Koordinasi Kerjasama/Kemitraan pada BTN Sebangau dan TN Tanjung Puting
BTN Sebangau & BTN T.Puting	
BTN Sebangau	
BKSDA Yogyakarta	Pemantauan dan Evaluasi Kerjasama Project Optimalisasi The Management of Paliyan Sanctuary
BTNG Rinjani dan BKSDA Jawa Tengah	Pemantauan dan Evaluasi Kerjasama
Yogyakarta	Koordinasi Kerjasama dan Rekonsiliasi Data Ditjen Tahun 2016 di Yogyakarta
BBKSDA Sumatera Utara	Pemantauan Evaluasi Kerjasama
BTN Karimun Jawa	Penelaahan Proposal dan Perjanjian Kerjasama
BBTNG Gede Pangrango	Fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama
Sambi Resort Jalan Kaliurang Km.19,2 Desa Wisata Sambi, Sleman Yogyakarta	Penelaahan Proposal dan Perjanjian Kerjasama Naskah Urgensi Serta Penyusunan Draft Perpres Tentang Pengesahan AFOCO dan ACB
Pontianak, Kalimantan Barat	Persiapan Pelaksanaan Regional Workshop on Transboundary Biodiversity Conservation Involving Forestry Communities and Women
TN Lore Lindu, Palu, Sulawesi Tengah	Koordinasi Sinkronisasi Kegiatan E-Pass dan Forestry Program III
BBTN Bromo Tengger Semeru	Penyusunan SOP Kerjasama Bidang KSDAE
BTN Ujung Kulon Labuhan, Banten	Fasilitasi Kerjasama Bidang KSDAE
BKSDA Kalimantan Timur	Fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama Monitoring Tindak Lanjut LHA/BPK RI/BPKP dan Itjen
BTN Halimun Salak	Koordinasi Kerjasama
BTNG Gede Pangrango	Koordinasi Kerjasama/Kemitraan
Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah	Koordinasi Kerjasama/Kemitraan dengan USDOITAP
Aceh dan Sumatera Utara	Koordinasi Kerjasama Kemitraan dengan PanEco Foundation
BTN Kepulauan Seribu	Penelaahan Proposal dan Perjanjian Kerjasama
BKSDA NTB, Mataram, Prov.NTB	Koordinasi Kerjasama/Kemitraan
BKSDA Jawa Tengah	Koordinasi Kerjasama/Kemitraan pada BKSDA Jawa Tengah
BTNG Ciremai	Penelaahan Proposal dan Perjanjian Kerjasama pada BTNG Ciremai
BBKSDA Jawa Barat	Penelaahan Proposal dan Perjanjian Kerjasama pada BBKSDA Jawa Barat

Lokasi	Dalam Rangka
Jambi	Dinas Kelompok Kerja Mitra Kerjasama dalam Rangka Evaluasi Kerjasama PT.Indah Kiat Tbk.
PT.Indah Kiat	
BBTN Bromo Tengger Semeru	Fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama Terkait Pelaporan Hibah Bidang KSDAE di BBTN BTS.
BKSDA Kalimantan Tengah	Fasilitasi Kerjasama Yayasan Kalaweit di BKSDA Kalimantan Tengah
BTNG Gede Pangrango	Fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama Terkait Pelaporan Hibah Bidang KSDAE
BBKSDA Jawa Barat	Fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama

Adapun anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.132.325.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.128.658.039,- (97,23%).



Gambar 49. Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi di Yayasan BOS, Kalimantan Timur

3) Koordinasi Kerjasama/Kemitraan

Koordinasi kerjasama dilakukan untuk mengintegrasikan kegiatan yang telah tertera di ruang lingkup perjanjian kerjasama. Selain itu, koordinasi kerjasama juga dilakukan untuk saling berbagi informasi terkait dengan kerjasama yang sedang atau akan dilakukan oleh Ditjen KSDAE dengan mitra dan calon mitra. Output yang diharapkan dengan adanya koordinasi kerjasama ini adalah agar terjadi sinkronisasi antara Ditjen KSDAE dengan mitra dalam hal tujuan pembuatan kerjasama ataupun tindak lanjut kerjasama sehingga tercapai tujuan yang telah disepakati sebelumnya.

Telah dilakukan koordinasi kerjasama dengan mitra kerjasama, di antaranya adalah dengan UPT BBTN Gunung Gede Pangrango dan PT Lido Parahyangan. Output yang dicapai dalam koordinasi ini adalah terlaksananya Perjanjian Kerjasama antara BTNGGP dengan PT Lido di bawah Dirjen KSDAE. Selain dengan PT Lido, koordinasi juga telah dilakukan oleh Sub Bag Kerjasama Teknik dengan BTNGGP dalam tindak lanjut rencana kerjasamanya dengan Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya-LIPI tentang Penelitian, Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Koordinasi kerjasama juga telah dilakukan dengan BB KSDA NTT dengan Yayasan Komodo Survival dalam hal pembahasan perpanjangan PKS 2016-2021.

Dalam hal koordinasi kerjasama/kemitraan, terdapat kendala yang penting untuk diselesaikan, salah satunya adalah dalam hal penyampaian informasi bersama dengan mitra. Hal yang telah diupayakan untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan tetap menjangkau UPT dan mitra yang terlibatnya di dalamnya agar koordinasi tetap dapat dilakukan. Kendala lain adalah kegiatan kerjasama hanya ditangani oleh beberapa satuan kerja (Sub Dit Pemanfaatan Kawasan Strategis, Dit PIKA, Sekditjen KSDAE), sehingga

upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi kendala koordinasi kerjasama adalah adanya kejelasan tupoksi sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.

Adapun anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.118.950.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.117.974.450,- (99,18%).

Berikut merupakan salah satu bentuk tabel koordinasi kerjasama/kemitraan antara BBTNGGP dengan PT Lido Parahyangan.

Tabel 16. Tabel Koordinasi Kerjasama BBTNGGP dengan PT Lido

Tanggal	Penjelasan	Hasil	Keterangan
		1. Kepala Balai Besar; atas arahan Dirjen KSDAE bahwa pengembangan pariwisata alam di BBTNGGP akan dialihkan ke wilayah Bogor, karena pintu masuk Cibodas sudah kredit. 2. Dalam rangka mendukung ini, KSDAE mengajak mitra untuk membantu promosi wisata alam di TNGGP. 3. PT. Lido Nirwana Parahyangan sudah akan mengembangkan wisata miliknya, sehingga kemungkinan pintu masuk wilayah Bodogol akan tertutup. 4. Antisipasi hal ini, maka harus segera dilakukan kerjasama dengan PT. Lido Nirwana Parahyangan.	Segera tindak lanjut kerjasama untuk promosi wisata alam TNGGP.
27/11/2015	Penandatanganan Nota Kesepakatan (NK) antara BBTNGGP dengan PT. Lido Nirwana Parahyangan yang diketahui oleh Dirjen KSDAE.		Harus segera ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama (PKS).
13/1/ 2016	Kepala Balai Besar mengintruksikan untuk segera membuat draft PKS sebagai tindak lanjut NK dengan arahan: PKS dijabarkan sesuai isi ruang lingkup NK dimana kegiatan difokuskan pada tahap perencanaan.	Draft PKS sudah disusun sesuai arahan, namun perlu dimatangkan lebih lanjut, khususnya menerjemahkan kegiatan-kegiatan perencanaan dalam konteks ruang lingkup kegiatan.	Harus segera ditindaklanjuti dengan pembahasan draft PKS tersebut.
25/8/ 2016	Rapat Pembahasan Draft PKS di Direktorat KK		
6/10/ 2016	Nota Dinas dari Direktur Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam kepada Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE nomor ND.611/PIKA/PKS/SA	Nota Kesepahaman antara BBTNGGP dengan PT. Lido telah ditandatangani tanggal 27 Oktober 2015, perlu ditindaklanjuti dan draft telah dipresentasikan di Ditjen KSDAE pada 25 Agustus 2016.	



Gambar 50. Rapat pembahasan koordinasi dengan mitra kerjasama

4) Kelompok Kerja Mitra Kerjasama

Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.85/Menhut-II/2014, kerjasama adalah kegiatan bersama antara para pihak yang dibangun atas kepentingan bersama untuk optimalisasi dan efektivitas pengelolaan kawasan atau karena adanya pertimbangan khusus bagi penguatan ketahanan nasional. Selanjutnya pengertian kerjasama menurut PerMenLHK Nomor P.78/Menlhk-Setjen/2015 adalah kesepakatan antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Mitra yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mendukung kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Kelompok kerjasama ditetapkan melalui SK Dirjen Nomor SK 135/KSDAE/SET/KLN.3/5/2016 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Kerjasama Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2016 Tanggal 12 Mei 2016. Adapun output dari kegiatan ini adalah (1) tersusunnya petunjuk teknis mekanisme pelaksanaan kerjasama yang meliputi perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan; (2) Tersinkronisasikannya program/rencana kerja dengan rencana prioritas (Renstra) Direktorat Jenderal KSDAE; (3) terpantaunya telaah kinerja pelaksanaan kerjasama yang masih berjalan dan tenaga ahli asing yang diperlukan; serta (4) terlaksananya penelaahan *draft* kerjasama baru dan atau perpanjangan.

Sehubungan dengan pembentukan kelompok kerjasama ini, terdapat beberapa kerjasama yang perlu mendapat perhatian, antara lain:

- 1) Migas dalam kawasan (Kerjasama antara BBKSDA Riau tentang Optimalisasi Pengelolaan Suaka Margasatwa Dana Pulau Besar/Danau Bawah, Kabupaten Siak Provinsi Riau), dan BTN Kutai
- 2) Kerjasama penguatan fungsi dengan Badan Usaha Dalam Negeri di 10 lanskap
- 3) Kerjasama antara Badan Usaha Luar Negeri dengan Pemerintah (Kerjasama BBTN Bromo Tengger Semeru dan BKSDA Yogyakarta)
- 4) Kerjasama strategis (Kerjasama antara BBTN Betung Kerihun dan Danau Sentarum tentang Pembangunan Jalan dan Sekolah; kerjasama BTN Bukit Duabelas tentang Pembangunan Fasilitas Umum untuk Suku Kubu seluar 50 Ha; dan kerjasama BBKSDA Riau tentang Pembangunan Jaringan Listrik dalam Kawasan Pemukiman Illegal).

Adapun anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.61.345.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.61.007.600,- (99,45%).



Gambar 51. Rapat Kelompok Kerja Mitra Kerjasama

5) Fasilitas Dan Koordinasi Dengan Instansi Terkait

Fasilitas dan koordinasi dengan instansi terkait dilakukan dengan tujuan untuk memperlancar segala kegiatan yang berhubungan dengan kerjasama dengan mitra lingkup Direktorat Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem pada khususnya dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada umumnya.

Output yang diharapkan dari adanya fasilitas ini adalah tercapainya tujuan yang diharapkan oleh Ditjen KSDAE dengan instansi terkait. Salah satu fasilitas dengan instansi yang telah dilakukan adalah menjadi Dirjen KSDAE menjadi narasumber dalam pelaksanaan Lokakarya Kontribusi Proyek Kerjasama Luar Negeri dalam Rangka Pencapaian National Determined Contribution (NDC).

Salah satu bentuk kegiatan fasilitas dan koordinasi adalah presentasi dan pembahasan profil dari 40 proyek kerjasama luar negeri, kemudian masing-masing EA berupaya melakukan identifikasi peluang kontribusi kepada NDC, baik dalam kategori adaptasi, mitigasi perubahan iklim maupun aktivitas penunjang seperti *co-benefits*, *capacity building* dan *policy measures*. Dalam kegiatan tersebut, dibahas juga mengenai Sistem Registri Nasional (SRN). SRN dibangun bukan hanya untuk merekam upaya NDC di KLHK, tetapi juga untuk sektor nasional lainnya (Kementerian ESDM, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian dsb). Perlu dilakukan koridorisasi proyek KLN di sektor lain.

Adapun anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.375.055.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.365.209.023,- (97,37%).



Gambar 52. Fasilitas dengan Instansi Terkait

6) Penyusunan Data Base Kerjasama

Dukungan jaringan komunikasi untuk pembangunan data base kerjasama di lingkup Ditjen KSDAE, antara Ditjen KSDAE dengan UPT, mitra Ditjen KSDAE baik di dalam maupun di luar negeri dan pihak lainnya. Output kegiatan ini adalah pelengkapan data kerjasama dan terbentuknya jaringan komunikasi data base kerjasama yang dapat diakses secara *online*.

Dalam hal penyusunan data base kerjasama, kendala yang dihadapi adalah data kerjasama oleh mitra yang belum ter-*update* serta pembentukan data base secara *online* yang masih dalam proses dikarenakan perlunya kelengkapan data kerjasama yang valid di lingkup Ditjen KSDAE dengan mitra. Untuk mengatasi kendala tersebut, sub bagian kerjasama teknik telah melakukan upaya penjangkauan masing-masing mitra agar melengkapi data sesuai format yang telah diberikan, dan telah membuat pengolahan database secara *online* dalam bentuk *trial*.

Adapun anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.11.200.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.11.141.000,- (99,47%).



Gambar 53. Rapat pembahasan penyusunan data base kerjasama

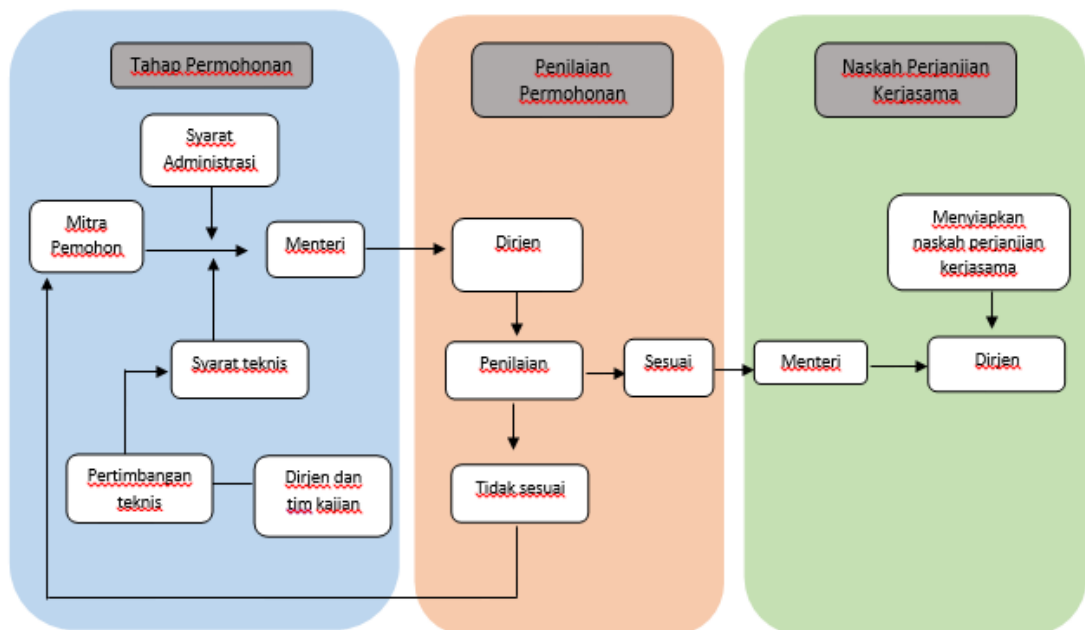
7) Review/Penyusunan SOP Kerjasama

Review peraturan terkait dengan kerjasama di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan khususnya Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.85/Menhut-II/2014 tentang tata cara kerjasama pada KSA dan KPA. Untuk itu, kegiatan ini melakukan review SOP kerjasama agar sesuai dengan P.85/Menhut-II/2015 tersebut, sehingga secara komprehensif dan terinci dalam konteks kerjasama yang meliputi:

- A. Perencanaan
- B. Monitoring dan Evaluasi
- C. Pelaporan
- D. Penatausahaan Hibah

Adapun anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.21.300.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.12.509.100,- (58,73%).

Alur Permohonan Kerjasama oleh Mitra dalam rangka Pembangunan Strategis yang Tidak Dapat Dielakkan



Gambar 54. Tata Cara Kerjasama dalam rangka Pembangunan Strategis yang Tidak Dapat Dielakkan

b. Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan

Komponen kegiatan pada Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan terdiri dari:

1) Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan

Penyusunan peraturan dimaksud dilakukan untuk terselenggaranya pelaksanaan pengelolaan Kawasan Konservasi dengan baik, sehingga dapat tersusun rancangan pembangunan sarana yang sesuai peta desain tapak pengelolaan pariwisata alam sesuai kaidah, prinsip dan fungsi konservasi alam. Dalam rangka pengkayaan materi muatan penyusunan peraturan perundangan dimaksud, masih diperlukan masukan dari berbagai pihak.

Realisasi Anggaran 75,50% belum termasuk pengurangan (self bloking) dari Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan Output kegiatannya menghasilkan Peraturan Menteri LHK sebanyak 9 peraturan, Surat Keputusan Menteri LHK sebanyak 5 SK, Peraturan Dirjen KSDAE sebanyak 14 Buah, Surat Keputusan Dirjen KSDAE sebanyak 141 Buah (data-data terlampir).

2) Perubahan Undang-undang nomor 5 tahun 1990 dan Konsultasi Publik Perubahan UU Nomor 5 Tahun 1990

Untuk merespon perkembangan, kebutuhan, dan permasalahan hukum terkait keberlakuan UU KSDAHE, DPR bersama-sama dengan Pemerintah telah menyepakati bahwa UU KSDAHE masuk dalam agenda Program Legislasi Nasional Tahun 2015-2019, dengan menempatkan RUU KSDAHE masuk dalam urutan nomor 65 untuk segera dilakukan penyempurnaan. Hal ini pun ditindaklanjuti oleh Komisi IV DPR RI dengan menugaskan Pusat Perancangan Badan Keahlian DPR RI untuk segera melakukan penyusunan NA dan RUU Perubahan Atas UU KSDAHE.

Realisasi anggaran 90,62% untuk perubahan UU No. 5 Tahun 1990 Outputnya draft Daftar Inventarisasi Masalah Rancangan UU No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Keanekaragaman Hayati pengganti UU No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Draft UU KKH Inisiatif KLHK tentang Konservasi Keanekaragaman Hayati.

3) Konsultasi Publik Perubahan UU No. 5 Tahun 1990

Upaya revisi Undang-undang No. 5 Tahun 1990 sudah mulai diinisiasi sejak tahun 2003 hingga kemudian disepakati DPR RI bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 25 Mei 2015 untuk didorong dalam Prolegnas Prioritas 2016. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pun kemudian membentuk Tim Penyusun RUU untuk menyempurnakan UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya tersebut.

Tim Penyusun RUU telah bekerja dan menghasilkan Draft RUU tentang Konservasi Keanekaragaman Hayati. Draft RUU tersebut tidak saja merupakan penyempurnaan dari UU No. 5 Tahun 1990 tetapi juga penggabungan substansi dari RUU Sumber Daya Genetik. Tim Penyusun merencanakan Konsultasi Publik sebagai media sosialisasi secara langsung Draft RUU Konservasi Keanekaragaman Hayati sekaligus menjangkau input dari masyarakat atas draft tersebut.

Realisasi Konsultasi Publik Perubahan UU No.5 Th 1990 yang telah dilaksanakan sebesar 99,43% adapun konsultasi publik yang telah dilaksanakan bersama mitra pada tahun 2016 :

1. Konsultasi Publik Regional Sumatera yang dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 2016 yang dilaksanakan di Hotel Madina Medan bekerjasama dengan mitra FKMM dan POLIGG;
 2. Konsultasi Publik Regional Sulawesi yang dilaksanakan pada tanggal 26 Desember 2016 yang dilaksanakan di Hotel Graha Paudni Makassar bekerjasama dengan mitra BURUNG INDONESIA;
 3. Konsultasi Publik Regional Papua Maluku yang dilaksanakan pada tanggal 3 Maret 2016 yang dilaksanakan di Hotel Horizon Jayapura bekerjasama dengan mitra USAID;
 4. Konsultasi Publik Regional Kalimantan yang dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2016 yang dilaksanakan di Hotel Santika Pontianak bekerjasama dengan mitra WWF;
- Konsultasi Publik Regional Bali Nusa Tenggara yang dilaksanakan pada tanggal 8 April 2016 yang dilaksanakan di Hotel Sanur Paradise Denpasar oleh Ditjen KSDAE.



Gambar 55. Konsultasi Publik di UPT regional Papua, Kalimantan dan Bali

c. Sub Bagian Pertimbangan Bantuan Hukum

Berdasarkan Pasal 284 ayat (2) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE Cq Sub

Bagian Pertimbangan dan Advokasi Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, penelaahan dan penanganan permasalahan, pertimbangan dan bantuan permasalahan hukum, yang dituangkan dalam komponen kegiatan sebagai berikut :

1) Penanganan Perkara Perdata dan Perkara TUN

Penyelesaian berbagai konflik kepentingan, perselisihan maupun sengketa pengelolaan KSDAE, dapat dilakukan diluar pengadilan (*nonlitigasi*) melalui upaya mediasi, rekonsiliasi maupun perdamaian yang melibatkan semua pemangku kepentingan dan *stakeholder*, namun pada kenyataannya berbagai upaya penyelesaian diluar pengadilan (*nonlitigasi*) sering menemui jalan buntu, sehingga perselisihan maupun sengketa harus diselesaikan melalui peradilan (*litigasi*) secara perdata maupun Tata Usaha Negara (TUN).

Berdasarkan hal tersebut di atas, perlu dialokasikan anggaran untuk kegiatan penanganan perkara perdata dan Tata Usaha Negara (TUN) agar setiap perkara yang dihadapi baik ditingkat pusat maupun daerah (UPT) dapat ditangani secara cepat, tepat dan profesional pada setiap tingkatan peradilan sampai adanya keputusan hukum tetap (*inkrah*).

Penanganan perkara perdata dan TUN dilaksanakan oleh kuasa hukum yang berasal Bagian Hukum dan Kerjasama Teknis Setditjen KSDAE, Biro Hukum Sekjen Kemen LHK, Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional/KSDA setempat dan atau Kuasa Hukum lain yang ditunjuk (Jaksa Pengacara Negara/Advokat).

Pada Tahun 2016 dengan pagu anggaran Rp. 187.500.000 dan capaian realisasi Rp. 179.000.300 atau 95,47%, telah dilakukan penanganan perkara perdata sebanyak 6 (enam) perkara, dimana 2 (dua) perkara merupakan lanjutan perkara tahun 2015 dan 4 (empat) perkara merupakan perkara baru. Sedangkan untuk perkara Tata Usaha Negara (TUN) sebanyak 4 (empat) perkara dimana 1 (satu) perkara lanjutan tahun 2015 dan 3 (tiga) perkara baru.

Tabel 17. Rekapitulasi Penanganan Perkara Perdata dan TUN tahun 2016

NO	NOMOR PERKARA	LOKASI	POSISI PERKARA
1	2	3	4
1.	No.20/PDT.G/2015/PN.Jpa Pengadilan Negeri Jepara	Taman Nasional Karimun Jawa, Jawa Tengah	Perkara dibatalkan
2.	No.27/PDT.G/2015/PN.Lbj PN. Labuan Bajo	Taman Nasional Komodo Nusa tenggara Timur	Inkrah (gugatan ditolak untuk seluruhnya)
3.	No.4/PDT.G/2016/PN.LBJ PN. Labuan Bajo	Taman Nasional Komodo Nusa tenggara Timur	Gugatan dicabut
4.	No.166/Pdt.G/2015/PN.Kpn PN. Kepanjen	Taman Nasional Gunung Bromo Tengger	Banding di Pengadilan Tinggi Surabaya
5.	No.6/PDT.G/2016/PN.LBJ PN. Labuan Bajo	Taman Nasional Komodo Nusa tenggara Timur	Banding di Pengadilan Tinggi Kupang
6.	No.127/Pdt.G/2016/PN.Mak PN. Makale	BBKSDA Sulawesi Selatan	Proses Mediasi
7.	No.9/G/2015/PTUN.Pbr Pengadilan TUN Pekanbaru	BBKSDA Riau	Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI menolak seluruh gugatan
8.	No.57/G/LH/2016/PTUN-Jkt Pengadilan TUN Jakarta	Jakarta/Surabaya	Proses Banding di Pengadilan Tinggi TUN Jakarta
9.	No.110/G/2016/PTUN-Jkt Pengadilan TUN Jakarta	Jakarta	Proses Banding di Pengadilan Tinggi TUN Jakarta
10.	No.233/G/LH/2016/PTUN.Jkt	Jakarta	Proses Persidangan di Pengadilan TUN Jakarta Timur



Gambar 56. Pelaksanaan sidang Setempat di Taman Nasional Komodo dan rapat penyusunan kesimpulan penanganan perdata di TN Komodo



Gambar 57. Tim Kuasa Hukum Kemen LHK dalam penanganan perkara perdata di BBKSDA Sulsel

2) Asistensi Penyelesaian Kasus-kasus bidang KSDAE

Penyelesaian suatu kasus atau perkara dibidang pengelolaan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya sangat ditentukan oleh faktor kemampuan dan keterampilan individu pelaksana dalam melakukan negosiasi dan atau beracara dipengadilan, pemahaman dan pengetahuan hukum serta didukung dengan ketersediaan bukti-bukti yang memadai.

Mengingat keterbatasan personil dan anggaran yang ada di Sub Bagian Pertimbangan dan Advokasi Hukum Setditjen KSDAE, maka tidak semua kasus atau perkara dapat ditangani langsung oleh Pusat, oleh karenanya hampir sebagian besar kasus-kasus atau perkara yang ada langsung ditangani sendiri oleh Unit Pelaksana Teknis.

Meskipun tidak dapat menangani langsung semua kasus atau perkara, untuk menjamin terselesaikannya kasus atau perkara yang ditangani UPT, maka Sub Bagian Pertimbangan dan Advokasi Hukum Setditjen KSDAE bersama Biro Hukum Sekjen LHK dan pejabat pusat lainnya tetap melakukan pendampingan dan asistensi baik secara substantif maupun langkah strategis yang harus dilakukan oleh UPT dalam penyelesaian kasus atau perkara yang ditangani.

Pada Tahun 2016 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 172.325.000,- dan capaian realisasi sebesar Rp. 163.487.700,- atau 94,92%, telah dilakukan asistensi dan atau pendampingan sebanyak 17 (tujuh belas) pendampingan yang berlokasi di Provinsi Jawa Barat, Provinsi Bali, Provinsi NTB, Provinsi Yogyakarta, Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Nusa Tenggara Timur (TN Komodo)



Gambar 58. Rapat pembahasan permasalahan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi di TN Gunung Halimun salak



Gambar 59. Rapat pembahasan kasus perambahan di TWA. Pantai Panjang BKSDA Bengkulu

3) Fasilitasi dan Koordinasi Pertimbangan dan Advokasi Hukum

Dalam menyelesaikan suatu kasus atau perkara dalam pengelolaan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, selain ditentukan oleh pemahaman dan pengetahuan hukum serta kemampuan dan keterampilan mediasi atau beracara, hal lain yang sangat menentukan adalah ketersediaan dokumen/surat sebagai alat bukti, saksi-saksi dan keterangan ahli sebagai bahan penyusunan materi dan strategi dalam rangka mediasi maupun beracara dipengadilan.

Dalam rangka pengumpulan dokumen/surat, saksi-saksi dan keterangan ahli, seringkali UPT mengalami hambatan yang disebabkan faktor jarak yang jauh, komunikasi dan koordinasi dengan instansi terkait, oleh karena itu sesuai dengan tupoksinya, maka Sub Bagian Pertimbangan dan Advokasi Hukum diberikan alokasi biaya fasilitasi dan koordinasi berupa kegiatan rapat-rapat pembahasan, perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dengan instansi terkait, pengumpulan dokumen/surat/ keterangan ahli, menghadirkan saksi atau ahli.

Pada Tahun 2016 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 137.500.000,- dan capaian realisasi Rp. 133.555.800,- atau 97,13%, telah dilakukan kegiatan fasilitasi dan koordinasi pertimbangan dan advokasi hukum berupa kegiatan rapat pembahasan, pengumpulan dokumen dan surat serta perjalanan dinas sebanyak 10 (sepuluh) kali yang berlokasi di Provinsi Jawa Barat, Balai TN Komodo, Provinsi Sumatera Utara.



Gambar 60. Rapat koordinasi pengembangan pariwisata alam di TWA. Kawah Ijen Kab. Banyuwangi Jawa Timur



Gambar 61. Rapat Koordinasi refitalisasi Lembaga Konservasi di Provinsi Jawa tengah dan Padang

4) Monitoring dan Evaluasi SIMAKSI/Perizinan Bidang KSDAE

Penyelenggaraan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya memiliki tiga pilar utama yaitu perlindungan penyangga kehidupan, pengawetan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Dalam pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara lestari dan berkelanjutan, perizinan merupakan salah satu instrumen hukum yang dimiliki pemerintah untuk melakukan pengendalian dan pengawasan.

Secara garis besar pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dibagi kedalam 2 (dua) kelompok yaitu pemanfaatan sumber daya alam hayati (Tumbuhan dan satwa liar) dan sumber daya genetik baik untuk kepentingan komersil maupun non komersil (penelitian dan pengembangan) dan pemanfaatan jasa lingkungan untuk kepentingan energi dan pariwisata alam.

Dalam rangka tertib hukum proses penerbitan dan pelaksanaan perizinan dibidang KSDAE maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi untuk mengetahui apakah proses penerbitan perizinan telah sesuai prosedur, dan apakah perizinan yang telah diberikan dilaksanakan sesuai ketentuan sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat dan negara.

Pada Tahun 2016, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 199.000.000,- dan capaian realisasi Rp. 198.886.400,- atau 99,94%, telah dilakukan monitoring dan evaluasi Simaksi/perizinan bidang KSDAE sebanyak 21 (dua puluh satu) kali yang berlokasi diantaranya pada Balai TN Karimun Jawa, Balai TN Gunung Gede Pangrango, Balai KSDA Jawa Barat, Balai KSDA Bengkulu Lampung.

Tabel 18. Rekapitulasi perizinan yang diproses tahun 2016

No	Jenis Izin	Progres Permohonan	
		Persetujuan Prinsip	Izin Definitif
1	Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam	4	8
2	Lembaga Konservasi	9	5
3	Penangkaran		11
4	Peredaran TSL Komersil		52
5	Peredaran TSL Non Komersil		15
6	<i>Breeding Loan</i>		2
7	SIMAKSI		6



Gambar 62. Monitoring penangkaran koral/karang hias di Bayuwangi



Gambar 63. Monitoring dan evaluasi Lembaga Konservasi Kebun Binatang Bandung



Gambar 64. Peninjauan lokasi pengembangan pariwisata alam di TN. Bali Barat

5) Sosialisasi dan Pembinaan Hukum Pemanfaatan TSL, Jasa Lingkungan dan Pariwisata Alam

Pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistem dalam kerangka konservasi sumber daya alam memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dari pemanfaatan sumber daya alam secara umum. Hal ini dikarenakan dalam konteks konservasi, pemanfaatan tidak dapat dilepaskan dari kepentingan pengawetan. selain itu, permasalahan konservasi bukan hanya permasalahan skala nasional namun sudah merupakan permasalahan yang bersifat internasional, sehingga tidaklah mengherankan apabila peraturan perundang-undangan dibidang KSDAE sangat dinamis dan sangat kompleks.

Kurangnya pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan bidang KSDAE baik oleh aparatur negara (UPT) maupun masyarakat dan dunia usaha akan menghambat tercapainya tujuan pemanfaatan lestari dan berkelanjutan dan bahkan dalam hal tertentu seiring perkembangan pembangunan dan perekonomian akan menimbulkan banyak perselisihan dan sengketa. Salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peraturan perundang-undangan bidang KSDAE adalah melalui sosialisasi dan pembinaan hukum baik secara internal struktural maupun eksternal kelompok masyarakat dan dunia usaha.

Pada Tahun 2016 dengan pagu sebesar Rp. 60.500.000,- dengan capaian realisasi Rp. 59.397.600,- atau 98,18% telah dilakukan sosialisasi dan pembinaan hukum sebanyak 5 (lima) kali yang berlokasi di Balai KSDA Jawa Barat, Balai KSDA Kalimantan Barat, Balai TN Teluk Cendrawasih.



Gambar 65. Sosialisasi dan pembinaan hukum pemanfaatan TSL dan Pariwisata Alam di TN. Bali Barat



Gambar 66. Pelepasliaran Burung Jalak Bali di TN. Bali Barat bersama pejabat pemda

4. Bagian Keuangan dan Umum

Bagian Keuangan dan Umum terbagi dalam tiga sub bagian yaitu Tata Usaha, Administrasi Keuangan serta Perlengkapan. Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2016 per sub bagian disajikan sebagai berikut :

a. Sub Bagian Administrasi Keuangan

Komponen kegiatan pada Sub Bagian Keuangan dan Umum terdiri dari :

1) Penyusunan Laporan Keuangan Ditjen dan Setditjen KSDAE Tahun 2015

Kegiatan ini merupakan siklus manajemen pemerintah pusat dalam rangka penyusunan laporan keuangan Direktorat Jenderal KSDAE yang berupa catatan informasi keuangan untuk periode akuntansi tahun 2015. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 19-21 Januari 2016 di Hotel Royal Padjajaran di Bogor. Kegiatan ini diisi juga dengan pemaparan materi oleh narasumber dari Biro Keuangan Kementerian LHK dan Kementerian Keuangan. Secara teknis rekonsiliasi penyusunan Laporan Keuangan meliputi persamaan data antara satuan kerja dengan eselon 1. Data tersebut antara lain Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca Per Satker, LRA Belanja, LRA Pengembalian, LRA Pendapatan, PHLN, Rekonsiliasi Internal Barang Milik Negara, dan penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan.

Output dari kegiatan ini adalah tersajinya Laporan Keuangan Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2015 yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standard Akuntansi Pemerintah (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah

pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintah. Sementara sasarannya adalah kompilasi data laporan keuangan setiap satuan kerja yang berjumlah 78 satuan kerja terdiri dari 77 satuan kerja daerah dan 1 satuan kerja pusat.

Kendala dan permasalahan dalam pencapaian output pada kegiatan ini adalah dukungan anggaran yang sangat terbatas, sehingga waktu yang dapat dialokasikan untuk kegiatan rekonsiliasi sangat terbatas sementara data yang harus dihimpun dan cocokkan sangat beragam baik melalui aplikasi SAIBA (E-Rekon) dan SIMAK-BMN maupun langsung yang kepada petugas satker.

Dimasa yang akan datang agar dialokasikan dana yang cukup memadai, agar cukup waktu mengakomodir permasalahan satuan kerja dalam rekonsiliasi data pada tingkat eselon I KSDAE. Alokasi dan realisasi anggaran Rp.260.125.000,- dengan realisasi Rp. 258.235.360,- (99,27%).



Gambar 67. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Ditjen KSDAE Tahun 2015 di Hotel Royal Padjadjaran Bogor

2) Penyusunan Laporan Keuangan Ditjen dan Setditjen KSDAE semester I Tahun 2016

Penyusunan laporan keuangan Direktorat Jenderal KSDAE yang berupa catatan informasi keuangan untuk periode akuntansi pertengahan tahun atau semester I tahun 2015, Kegiatan ini dilaksanakan di Jakarta dengan jenis kegiatan seperti rekonsiliasi Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca Per Satker, LRA Belanja, LRA Pengembalian, LRA Pendapatan, PHLN, Rekonsiliasi Internal Barang Milik Negara, dan penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan.

Output kegiatan ini adalah tersusun dan tersajinya laporan keuangan yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standard Akuntansi Pemerintah (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintah, sementara sasarannya adalah data laporan keuangan setiap satuan kerja yang berjumlah 80 satuan kerja terdiri dari 74 satuan kerja daerah dan 6 satuan kerja pusat.

Kendala dan permasalahan dalam pencapaian output pada kegiatan ini adalah dukungan anggaran yang sangat terbatas, sehingga waktu yang dapat dialokasikan untuk kegiatan rekonsiliasi sangat terbatas sementara data yang harus dihimpun dan cocokkan sangat beragam baik melalui aplikasi SAIBA (E-Rekon) dan SIMAK-BMN maupun langsung yang kepada petugas satker.

Dimasa yang akan datang agar dialokasikan dana yang cukup memadai, agar cukup waktu mengakomodir permasalahan satuan kerja dalam rekonsiliasi data pada tingkat eselon I KSDAE. Alokasi dan realisasi anggaran Rp.236.000.000,- dengan realiasi Rp.233.391.820,- (98,89%).



Gambar 68. Foto Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Ditjen KSDAE Semester I Tahun 2016 di Hotel Grand Mercure Kemayoran Jakarta

3) Laporan SAK UAKPA Triwulan I dan Triwulan III Tahun 2016

Penyusunan laporan keuangan Direktorat Jenderal KSDAE yang berupa catatan informasi keuangan untuk periode akuntansi Triwulanan sepanjang tahun 2015, Kegiatan ini dilaksanakan di Jakarta dengan jenis kegiatan seperti rekonsiliasi Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca Per Satker, LRA Belanja, LRA Pengembalian, LRA Pendapatan, PHLN, Rekonsiliasi Internal Barang Milik Negara, dan penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan.

Kegiatan merupakan kegiatan deteksi dini permasalahan dalam penyusunan laporan keuangan, untuk meminimalisir akumulasi kesalahan dalam penyajian data laporan keuangan semester dan tahunan. Alokasi dan realisasi anggaran 57.500.000 realiasi Rp.56.764.800 (98,72%)

4) Pembinaan Pengelolaan PNBP bidang KSDAE

Kegiatan ini sebagai upaya meningkatkan pemahaman dan kemampuan di bidang administrasi Keuangan Negara, bagi Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE, yang berdasarkan ketersediaan anggaran yang ada kegiatan ini dilaksanakan di 6 satuan kerja, dengan jenis kegiatan seperti penyusunan Target, Rekonsiliasi Target dan Penerimaan, bimbingan penerapan aplikasi SIMPONI dan TRPNBP, dengan harapan terlaksananya administrasi PNBP sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, meminimalisir penyimpangan dan potensi kerugian negara di bidang PNBP. Sumber daya manusia dan dukungan sarana dalam pengelolaan PNBP di satuan kerja sebagai satker pemungut, relatif kurang dari sisi penguasaan aplikasi sehingga hal ini menjadi kendala dalam optimalisasi pengelolaan PNBP.

Memberikan saran dan masukan kepada satuan kerja untuk melakukan regenerasi petugas pengelolaan PNBP, memberikan dukungan sarana yang memadai kepada petugas untuk dapat melaksanakan administrasi pengelolaan PNBP yang tepat waktu dengan data yang akurat.

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp.100.500.000,- dengan realiasi Rp.94.568.908,- (94,10%), terbatasnya anggaran untuk kegiatan ini mengakibatkan kurangnya satuan kerja yang dapat dikunjungi untuk dilakukan pembinaan, dan sebagian besar satuan kerja mengharapkan adanya kegiatan penyegaran bendahara penerimaan sebagai wadah pembaruan informasi terkait peraturan dan kebijakan terbaru terkait pengelolaan PNBP.



Gambar 69. Pembinaan Pengelolaan PNBP bidang KSDAE

5) Pembinaan Keuangan bagian Pelaksana Anggaran Satker

Dalam rangka meningkatkan kualitas tenaga pelaksana keuangan, Sub Bagian Adminsittrasi Keuangan Bagian Keuangan dan Umum Sekretariat Direktorat KSDAE mengalokasikan anggaran Pembinaan Keuangan bagian Pelaksana Anggaran Satker, Bimbingan Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Satker ini dilaksanakan melalui kegiatan kunjungan ke 5 satuan kerja sesuai anggaran yang tersedia, Alokasi dan realisasi anggaran Rp.117.050.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 112.458.407,- (96,08%),-



Gambar 70. Kegiatan Pembinaan Keuangan di UPT

6) Satuan Pengawas Internal Pemerintah

Sistem Pengendalian Intern diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE, melalui anggaran yang tersedia Sub Bagian Administrasi Keuangan melaksanakan SPIP untuk menjaga Integritas, nilai etika dan komitmen khususnya dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara berjalan tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan.

Bentuk kegiatannya, dengan melakukan monitoring ke berbagai satuan kerja sebagai uji petik, sebanyak 5 satuan kerja, dengan mengevaluasi pelaksanaan anggaran dan pertanggung jawaban setiap jenis kegiatan. Sasaran kegiatan SPIP adalah pertanggung jawaban setiap jenis kegiatan dalam DIPA satuan kerja. Alokasi anggaran Rp.65.000.000 dengan realisasi Rp.62.262.409,- atau (95,79%).

7) Monitoring tindak lanjut LHA/BPK RI/BPKP dan Itjen

Monitoring Tindaklanjuti atas temuan dan rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI/BPKP/Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dimana output yang diharapkan adalah tercapainya proses tindaklanjuti LHP secara langsung dari Pusat dan Daerah, sehingga temuan dan rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan tahun berjalan dapat segera ditindaklanjuti secara tuntas. Kendala dalam pelaksanaan kegiatan ini sering kali LHP diterima sangat terlambat dan penyampaian dokumen pendukung hasil tindak lanjut belum tertib.

Upaya meminimalisir permasalahan dalam pengolahan data yaitu dengan melakukan perjalanan dinas monitoring data tindaklanjuti BPK-RI/BPKP/ dan Itjen, melakukan rapat-rapat pembahasan untuk pemutakhiran data terkait.

Output kegiatan ini berupa laporan perjalanan dinas dan termonitornya jumlah hasil temuan dan rekomendasi BPR-RI/BPKP/Inspektorat Jenderal Kementerian LHK, sehingga dapat diketahui jumlah temuan dan rekomendasi. Alokasi anggaran Rp.101.000.000 dan realisasi sebesar Rp. 98.750.100,- (97,77%).

8) Monitoring tindak lanjut kerugian Negara

Guna meningkatkan efisiensi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian Negara di lingkup Direktorat Jenderal KSDAE, maka dengan anggaran yang tersedia melaksanakan kegiatan monitoring Tindaklanjuti Kerugian Negara, dengan bentuk kegiatan, pengarahan pelaksanaan kewajiban proses administrasi, penandatanganan SPKTJM, penyetoran dan pelaporan kerugian negara.

Sepanjang tahun 2016, Sub Bagian Administrasi Keuangan melakukan monitoring terhadap 11 kasus kerugian Negara yang terjadi di 8 satuan kerja Ditjen KSDAE. Adapun kasus yang menyebabkan ganti kerugian negara (TGR) antara lain disebabkan pencurian kendaraan bermotor dinas, kehilangan uang negara, kelalaian pengelolaan uang negara, penyelewengan uang negara dan sisa uang UP/TUP belum dipertanggung jawabkan.

Kendala yang dihadapi pada kegiatan Monitoring tindak lanjut kerugian negara yaitu belum adanya progress penyelesaian yang spesifik dari masing – masing satuan kerja, kasus yang masuk kategori sulit untuk dituntaskan, serta dokumen pendukung penyelesaian kasus yang tidak lengkap. Untuk menghadapi kendala tersebut, diperlukan kontribusi aktif dari masing-masing satuan kerja dengan secara rutin memantau dan melaporkan progres penyelesaian kasus kerugian tersebut kepada Setditjen KSDAE. Alokasi anggaran Rp. 68.750.000 dengan realisasi Rp. 66.493.200 (96,72).

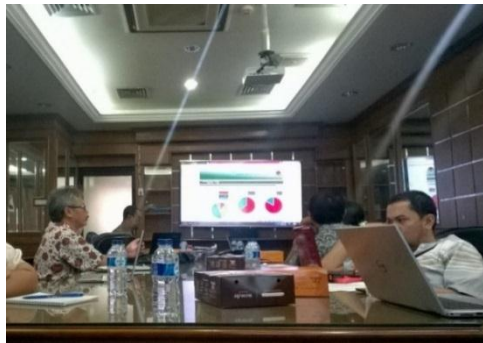
9) Upgrade database LHA Ditjen PHKA

Kegiatan ini merupakan upaya peningkatan kapasitas dan kualitas Laporan Hasil Audit (LHA) lingkup Ditjen KSDAE, untuk mewujudkan proses tindaklanjuti LHP BPK-RI/BPKP/Inspektorat Jenderal Kementerian LHK secara cepat dan akurat. Semetara sasaran kegiatannya adalah Data tindak lanjut LHP secara langsung dari UPT pusat dan daerah, sehingga diharapkan temuan dan rekomendasi laporan hasil pemeriksaan tahun berjalan dapat segera tuntas.

Kendala dan permasalahan yang seringkali ditemui adalah LHP terlambat diterima satuan kerja dan penyampaian dokumen pendukung tindaklanjuti belum tertib, sehingga perlu rapat-rapat pembahasan untuk pemutakhiran data BPK-RI/BPKP/Itjen antara Eselon I dan Satuan kerja sebagai auditan. Sebagai output kegiatan adalah termonitornya jumlah hasil temuan dan rekomendasi BPK-RI/BPKP/Itjen Kementerian LHK, sehingga tersaji tentang jumlah temuan dan rekomendasi yang cepat dan akurat, sebagai bahan proses pengambilan keputusan pimpinan. Alokasi dan realisasi anggaran Rp. 59.000.000,-

realisasi Rp. 54.344.100,- (92,11%) %). Adapun poin update Aplikasi Database LHA Ditjen KSDAE pada tahun 2016 antara lain yaitu :

- 1) Menu tampilan pada ADMIN mengenai jumlah total LHP, temuan, rekomendasi, tindak lanjut berdasarkan data dari Itjen. Menu tampilan tersebut dapat dilihat dengan variable Tahun Audit dan Wlayah Pemeriksaan
- 2) Menu tampilan pada SATKER yang memperingatkna (otomatis) tentang mengenai jumlah total LHP, temuan, rekomendasi yang belum mereka input
- 3) Menu validasi monitoring Admin terhadap inputan LHP dari Satker
- 4) Menu *Upload* surat/bukti tindak lanjut (jenis file gambar dengan resolusi terendah)
- 5) Menu history tanggal/inputan/update/ubah LHP satker
- 6) Menu history admin



Gambar 71. Presentasi hasil Upgrade Aplikasi Database LHA

10) Koordinasi dan Pendampingan Audit BPK RI

Kegiatan ini berupa pendampingan dan arahan kepada satuan kerja yang menjadi uji petik audit BPK RI, agar satuan kerja lebih siap secara materi pemeriksaan dan kecukupan bukti fisik sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran, administrasi perencanaan hingga proses evaluasi dan pelaporan kegiatan. Bentuk kegiatannya dalam bentuk bimbingan dan arahan serta penyampaian materi pemeriksaan. Alokasi anggaran Rp.16.500.000,-dengan realisasi Rp. 14.906.000,- (90,34%).

11) Koordinasi dan Bimbingan Teknis Bidang Keuangan

Kegiatan ini sifatnya mendukung kelancaran pelaksanaan anggaran di lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE, kegiatannya dalam bentuk koordinasi internal dan eksternal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau Kementerian Keuangan, dan jajarannya. Dengan output terselenggaranya pelaksanaan anggaran secara tertib, tepat waktu dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Alokasi dan realisasi anggaran Rp.55.000.000 dengan realisasi Rp. 54.570.500,- (99,22%).



Gambar 72. Kegiatan Menghadiri Diseminasi Hibah Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

12) Administrasi Pengelola DIPA Setditjen KSDAE Tahun 2016

Kegiatan administrasi pengelola DIPA bertujuan untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan dan anggaran Setditjen KSDAE Tahun 2016 dapat berjalan dengan baik dan tertib guna mencapai output-output yang telah direncanakan. Alokasi anggaran untuk kegiatan Administrasi Pengelola DIPA Setditjen KSDAE adalah Rp.23.340.000,- dengan realisasi Rp. 22.111.300,- (99,74%).

b. Sub Bagian Perlengkapan

Komponen kegiatan pada Sub Bagian Perlengkapan terdiri dari:

1) Penyusunan Laporan BMN Ditjen dan Setditjen KSDAE tahun 2015

Kegiatan Penyusunan Laporan BMN Ditjen dan Setditjen KSDAE Tahun 2015 dilaksanakan pada tanggal 20 sampai dengan 23 Januari 2016 di Hotel Royal Pajajaran, Bogor yang bertujuan untuk meningkatkan keandalan Laporan Barang Milik Negara (BMN) Ditjen dan Setditjen KSDAE Tahun Anggaran 2015, dengan peserta yang berasal dari seluruh Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) lingkup Ditjen KSDAE dan mendatangkan narasumber dari Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi (PKNSI) Kementerian Keuangan, Direktorat Barang Milik Negara Kementerian Keuangan dan Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian pelaksanaan penatausahaan BMN yang digunakan untuk menyusun dan menyampaikan data dan informasi terkait posisi neraca BMN dan mutasi barang yang terjadi pada tahun anggaran 2015 di semua Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) lingkup Ditjen KSDAE serta mencocokkan dan membandingkan data transaksi keuangan berdasarkan dokumen sumber yang sama sehingga dapat dipastikan bahwa nilai aset dan semua belanja terkait aset yang disajikan neraca SIMAK BMN sesuai dengan neraca SAIBA. Peranan kegiatan ini sangat penting, karena dapat meminimalisir terjadinya perbedaan pencatatan yang akan berdampak pada validitas dan akurasi data yang disajikan dalam Laporan Keuangan.

Alokasi anggaran untuk kegiatan Penyusunan Laporan BMN Ditjen dan Setditjen KSDAE Tahun 2015 sebesar Rp. 271.650.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), dengan realisasi sebesar Rp. 263.355.000,00 (dua ratus enam puluh tiga juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) atau sebesar 96,95 %.

2) Penyusunan Laporan BMN Ditjen dan Setditjen Semester I Tahun 2016

Kegiatan Penyusunan Laporan BMN Ditjen dan Setditjen KSDAE Semester I Tahun 2016 dilaksanakan pada tanggal 25 sampai dengan 27 Juli 2016 di Hotel Grand Mercure, Kemayoran, Jakarta Pusat yang bertujuan untuk meningkatkan keandalan Laporan Barang Milik Negara (BMN) Ditjen dan Setditjen KSDAE Semester I Tahun Anggaran 2016, dengan peserta yang berasal dari seluruh Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) lingkup Ditjen KSDAE dan mendatangkan narasumber dari Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi (PKNSI) Kementerian Keuangan, Direktorat Barang Milik Negara Kementerian Keuangan dan Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian pelaksanaan penatausahaan BMN yang digunakan untuk menyusun dan menyampaikan data dan informasi terkait posisi neraca BMN dan mutasi barang yang terjadi pada semester I tahun anggaran 2016 di semua Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) lingkup Ditjen KSDAE serta mencocokkan dan membandingkan data transaksi keuangan berdasarkan dokumen sumber yang sama sehingga dapat dipastikan bahwa nilai aset dan semua belanja terkait

aset yang disajikan neraca SIMAK BMN sesuai dengan neraca SAIBA. Peranan kegiatan ini sangat penting, karena dapat meminimalisir terjadinya perbedaan pencatatan yang akan berdampak pada validitas dan akurasi data yang disajikan dalam Laporan Keuangan.

Alokasi anggaran untuk kegiatan Penyusunan Laporan BMN Ditjen dan Setditjen KSDAE Tahun 2015 sebesar Rp. 234.800.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah), dengan realisasi sebesar Rp. 233.140.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah) atau sebesar 99,29 %.

3) Pemutakhiran Data Barang Milik Negara

Pemutakhiran data BMN adalah kegiatan memutakhirkan data dan laporan BMN dengan cara melengkapi unsur-unsur data BMN, terkait adanya penambahan atau pengurangan nilai dan informasi lainnya tentang pengelolaan BMN yang berada dalam penguasaan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) lingkup Direktorat Jenderal KSDAE. Kegiatan ini dilakukan untuk menjaga keakuratan dan keandalan data BMN yang disajikan dalam Laporan BMN dan neraca pemerintah pusat.

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 58.700.000,00 (lima puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 48.852.500,00 (empat puluh delapan juta delapan ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) atau sebesar 83,22 %.

4) Inventarisasi Barang Milik Negara

Inventarisasi BMN adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan BMN. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengetahui jumlah, harga, nilai dan kondisi serta lokasi keberadaan BMN yang berada dalam penguasaan Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE. Dengan dilaksanakannya kegiatan ini diharapkan dapat terwujud tertib hukum, tertib fisik dan tertib administrasi dalam pengelolaan BMN.

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 30.950.000,00 (tiga puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 30.950.000,00 (tiga puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) atau sebesar 100 %.

5) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Terbaru terkait Pengelolaan BMN

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman petugas pengelolaan BMN terhadap peraturan dan perundang-undangan terbaru terkait pengelolaan BMN.

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 45.200.000,00 (empat puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 45.127.200,00 (empat puluh lima juta seratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) atau sebesar 99,84 %.

6) Asistensi Pengelolaan BMN

Karena semakin berkembang dan kompleksnya pengelolaan BMN, salah satu permasalahan yang dihadapi adalah masih adanya persepsi dan pemahaman yang berbeda dalam menjalankan suatu prosedur, sehingga implementasinya belum dapat dilaksanakan secara optimal. Dengan latar belakang tersebut, maka dipandang perlu untuk melaksanakan kegiatan ini, sehingga dapat tercipta persepsi dan pemahaman yang sama terhadap prosedur pengelolaan BMN. Selain itu, kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pendampingan dalam melaksanakan pengelolaan BMN.

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp96.200.000,00 (sembilan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp96.197.800,00 (sembilan puluh enam juta seratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) atau sebesar 100 %.

7) Pembinaan dan Pengkajian Penghapusan/Pemindahtanganan BMN

Penghapusan merupakan rangkaian akhir dari pelaksanaan pengelolaan BMN. Proses penghapusan sering menjadi masalah dalam pelaksanaannya. Dengan adanya kegiatan pembinaan dan pengkajian penghapusan/pemindahtanganan BMN diharapkan dapat meminimalisir kesalahan prosedur dan berkas pengajuan usulan penghapusan/pemindahtanganan BMN telah sesuai dengan asas-asas pengelolaan BMN sehingga dapat mempercepat proses penghapusan/pemindahtanganan BMN dan tidak menjadi masalah dikemudian hari.

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 86.200.000,00 (delapan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 86.075.000,00 (delapan puluh enam juta tujuh puluh lima ribu rupiah) atau sebesar 99,85 %.

8) Supervisi Penanganan kasus-kasus BMN

Supervisi penanganan kasus-kasus BMN adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka membantu penyelesaian kasus – kasus terkait BMN yang terjadi di Satuan Kerja lingkup Direktorat Jenderal KSDAE. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan dapat mempercepat penyelesaian sengketa – sengketa atas BMN yang banyak terjadi.

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 108.750.000,00 (seratus delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 94.149.600,00 (sembilan puluh empat juta seratus empat puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) atau sebesar 86,57 %.

9) Monitoring dan Evaluasi Hibah BMN

Kegiatan monitoring dan evaluasi BMN hibah/kemitraan dilaksanakan untuk melakukan pembinaan dan penyelesaian masalah terkait pencatatan aset yang berasal dari hibah langsung. Kegiatan ini perlu dilaksanakan karena selama ini banyak permasalahan aset yang berasal dari hibah belum ditatausahakan dengan benar.

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 39.950.000,00 (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 36.516.100,00 (tiga puluh enam juta lima ratus enam belas ribu seratus rupiah) atau sebesar 91,40 %.

10) Monitoring Optimalisasi Pemanfaatan Radio Komunikasi (SKRT)

Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) merupakan sarana komunikasi radio milik Kementerian Kehutanan sebagai upaya menunjang pembangunan kehutanan, terutama untuk mendukung pelaksanaan kebijakan dalam perlindungan dan pengamanan hutan. Dengan terlaksananya kegiatan ini, diharapkan pemanfaatan penggunaan radio komunikasi di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal KSDAE dapat termonitor dengan baik.

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 36.500.000,00 (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 36.495.000,00 (tiga puluh enam juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) atau sebesar 99,99 %.

11) Penyelenggaran Penghapusan/ Pemindahtanganan BMN

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan penghapusan/pemindahtanganan BMN lingkup Sekretariat Ditjen KSDAE. Hal ini dilatarbelakangi oleh semakin banyaknya BMN yang rusak berat, kadaluarsa dan tidak produktif yang masih tercatat sebagai aset yang perlu segera dikeluarkan dari pembukuannya.

Pada tahun anggaran 2016, Satuan Kerja Sekretariat Ditjen KSDAE melaksanakan kegiatan penghapusan/pemindahtanganan terhadap 7 (tujuh) unit kendaraan dinas roda 4 dan 5 (lima) unit kendaraan dinas roda 2 dengan nilai PNBP sebesar Rp. 169.622.100,00 (seratus enam puluh sembilan juta enam ratus dua puluh dua ribu seratus rupiah).

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 34.250.000,00 (tiga puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 28.150.000,00 (Dua puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah) atau sebesar 82,19 %.

12) Pembinaan dan Monitoring Penyelenggaraan Perpustakaan

Pembinaan dan monitoring penyelenggaraan perpustakaan bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu perpustakaan serta meningkatkan daya guna dan hasil guna perpustakaan yang berada di Satker lingkup Ditjen KSDAE. Selain itu, kegiatan ini bertujuan untuk memelihara kondisi lingkungan dan kondisi fisik bahan pustaka di perpustakaan Ditjen KSDAE.

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 36.500.000,00 (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 28.100.000,00 (dua puluh delapan juta seratus ribu rupiah) atau sebesar 76,99 %.

13) Pengawetan Bahan Pustaka

Kegiatan pengawetan bahan pustaka dilaksanakan dalam rangka melindungi bahan pustaka dari sebab-sebab yang mengakibatkan kerusakan dengan cara pemeliharaan kondisi lingkungan bahan pustaka dan pemeliharaan kondisi fisik bahan pustaka.

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) atau sebesar 100 %.

14) Pengadaan Obat-obatan dan bahan Poliklinik Ditjen KSDAE

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan obat-obatan poliklinik Direktorat Jenderal KSDAE pada Tahun 2017, dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada pasien.

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 129.653.200,00 (seratus dua puluh sembilan juta enam ratus lima puluh tiga ribu dua ratus rupiah) atau sebesar 99,73 %.

15) Operasional ULP Unit Pusat Ditjen KSDAE

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2012, bahwa kementerian/Lembaga wajib membentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP). Direktorat Jenderal KSDAE pada tahun 2014 telah menetapkan ULP unit pusat melalui Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor SK.181/IV-SET/2014 tentang Penetapan Unit Layanan Pengadaan Unit Pusat Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional ULP dalam melaksanakan tugasnya.

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 93.520.000,00 (sembilan puluh tiga juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 84.556.000,00 (delapan puluh empat juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah) atau sebesar 90,41 %.

16) Penyusunan Rencana Kebutuhan BMN Ditjen dan Setditjen KSDAE

Perencanaan kebutuhan BMN adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan BMN untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 31.450.000,00 (tiga puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), namun kegiatan ini tidak dapat terealisasi karena termasuk kedalam objek penghematan anggaran.

c. Sub Tata Usaha

Komponen kegiatan pada Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari:

1) Pengumpulan, Penyortiran Arsip, Retensi Arsip Dan Penghapusan Arsip Lingkup Ditjen KSDAE

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai realisasi pelaksanaan atas Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.45/Menhut-II/2013 tentang Jadwal Retensi Arsip Kementerian Kehutanan dan meningkatkan kinerja para staf/ personil yang bertugas melakukan pengelolaan kearsipan lingkup Direktorat Jenderal KSDAE, mulai dari pengumpulan, penyortiran, retensi arsip dan penghapusan arsip. Supaya terwujudnya keterpaduan pengelolaan tata kearsipan dengan unsur lainnya dalam lingkup administrasi umum, berkurangnya tumpang tindih, salah tafsir, dan pemborosan penyelenggaraan tata kearsipan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ketersediaan informasi (arsip) yang benar-benar bernilai guna, efisiensi dan efektifitas pengelolaan arsip, dan pemusnahan arsip sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta menjamin keselamatan bahan pertanggungjawaban nasional.

Kegiatan ini dilaksanakan selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran, berupa pengelolaan arsip mulai dari pengumpulan, penyortiran arsip, retensi arsip sampai dengan penghapusan arsip, dan pengangkutan arsip ke Unit Pusat Kearsipan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dalam proses penyimpanan ini memerlukan jadwal retensi arsip yang digunakan untuk menyusutkan arsip yang dilakukan dengan melihat urgensi dari arsip tersebut sampai dengan penghapusan arsip lingkup Ditjen KSDAE. Namun demikian, penghapusan arsip belum bisa dilakukan karena perlu pencermatan khusus dengan pihak Unit Pusat Kearsipan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

Output dari kegiatan ini adalah Daftar Pertelaan Arsip yang diretensi dari hasil pengumpulan dan penyortiran arsip berdasarkan permasalahan/perihal dokumen dinas berdasarkan Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya digunakan sebagai dasar penghapusan arsip.

Kendala yang dialami dalam melaksanakan kegiatan ini adalah tidak adanya tempat pengumpulan dan penyortiran arsip, sehingga pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan diluar jam kerja dan tidak mengganggu kegiatan pegawai Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan pelayanan.

Alokasi anggaran yang digunakan dalam kegiatan ini sebesar Rp. 43.700.000,- dan realisasi dari anggaran tersebut sebesar Rp. 43.699.000,- (99,99%).

2) Sosialisasi Pedoman Tata Kearsipan lingkup Ditjen KSDAE di UPT

Kegiatan ini dilaksanakan untuk menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan bahwa dalam menghadapi tantangan globalisasi dan mendukung terwujudnya penyelenggaraan negara dan khususnya pemerintahan yang

baik dan bersih, serta peningkatan kualitas pelayanan publik, penyelenggaraan kearsipan di Lembaga Negara, Pemerintah Daerah, Lembaga Pendidikan dan lain-lain dilakukan dalam suatu sistem penyelenggaraan kearsipan nasional yang komprehensif dan terpadu.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan menyebutkan pengertian Arsip sebagai berikut :

“Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”

Sebagai tindak lanjut dari UU Nomor 43 tahun 2009, maka Kementerian Kehutanan menerbitkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Tata Kearsipan Kementerian Kehutanan. Penetapan peraturan tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan keseragaman dan kelancaran pelaksanaan kegiatan kearsipan, serta mendukung terlaksananya penyelenggaraan tata kearsipan dalam rangka menyelamatkan dan mengamankan bahan bukti hasil kegiatan di seluruh satuan kerja lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dalam peraturan tata kearsipan dinamis terdapat tahapan hidup arsip yaitu tahap penciptaan, penggunaan dan pemeliharaan serta tahap penyusutan. **Tahap penciptaan** meliputi beberapa sub yaitu desain formulir, manajemen formulir, tata persuratan, manajemen pelaporan, sistem informasi manajemen. **Tahap penggunaan dan pemeliharaan** meliputi *filing system*, penemuan kembali, pengurusan surat, program arsip vital dan pengelolaan pusat arsip, sedangkan **Tahap penyusutan** meliputi, identifikasi dan deskripsi arsip, Jadwal Retensi Arsip, Penilaian Arsip, Pemindahan Arsip, Pemusnahan Arsip dan Penyerahan Arsip.

Dari ketiga tahapan tersebut terbukti bahwa optimalisasi peran kearsipan melalui pengelolaan arsip yang benar ternyata cukup kompleks. Dalam rangka efektifitas dan efisiensi pengelolaan arsip diperlukan kegiatan sosialisasi pedoman tata kearsipan di UPT, agar mampu memiliki daya dukung bagi manajemen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berkesinambungan.

Guna mewujudkan tertib pengelolaan arsip dan kesamaan pemahaman dalam mengimplementasikan pedoman tata kearsipan dengan baik di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ditjen KSDAE melaksanakan kegiatan sosialisasi Permenhut No. P.51/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Tata Kearsipan Kementerian Kehutanan di lingkup Unit Pelaksana Teknis Ditjen KSDAE Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui uji petik pada beberapa UPT KSDAE, untuk memberikan Sosialisasi Pedoman Tata Kearsipan Lingkup Ditjen KSDAE, sehingga petugas kearsipan Unit Pelaksana Teknis bisa lebih mengaplikasikan pedoman tata kearsipan dalam pelaksanaan tugas sehari-harinya.

Sosialisasi ini dilaksanakan di UPT lingkup Direktorat Jenderal KSDAE sebanyak 8 (delapan) UPT yaitu BTN Sebangau, BTN Gunung Rinjani, BKSDA Sulawesi Tenggara, BKSDA Sumatera Selatan, BBKSDA Jawa Barat, BTN Gunung Halimun Salak, BBTN Gunung Gede Pangrango dan BTN Karimun Jawa.

Pada pelaksanaan kegiatan ini tidak ditemukan kendala/permasalahan yang dapat menghambat dalam mencapai tujuan kegiatan dimaksud.

Alokasi anggaran yang digunakan dalam kegiatan ini sebesar Rp. 88.000.000,- dan realisasi dari anggaran tersebut sebesar Rp. 87.638.000,- (99,59%).

3) Asistensi Tata Persuratan Dinas Ditjen KSDAE di UPT

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan asistensi dalam melaksanakan pengelolaan surat/dokumen dinas, sehingga petugas pengelola surat/dokumen dinas bisa melaksanakan kegiatannya sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.63/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 24 November 2015 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Asistensi ini dilaksanakan di Unit Pelaksana Teknis lingkup Direktorat Jenderal KSDAE sebanyak 8 (delapan) UPT yaitu BTN Gunung Ciremai, BTN Ujung Kulon, BTN Gunung Merapi, BTN Gunung Merbabu, BKSDA Yogyakarta, BTN Gunung Halimun Salak, BBKSDA Jawa Barat dan BBTN Gunung Gede Pangrango.

Kendala/permasalahan dalam kegiatan ini adalah penghematan anggaran sehingga menyebabkan tidak adanya kegiatan pembahasan hasil kegiatan asistensi.

Alokasi anggaran yang digunakan dalam kegiatan ini sebesar Rp. 99.000.000,- dan realisasi dari anggaran tersebut sebesar Rp. 98.875.500,- (99,87%).

4) Sosialisasi Pedoman Tata Persuratan KLHK dan JRA KLHK

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mensosialisasikan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.51/Menhut-II/ 2011 tentang Pedoman Tata Kearsipan Kementerian Kehutanan dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.145/Menhut-II/2004 tanggal 21 Mei 2004 tentang Jadwal Retensi Arsip Departemen Kehutanan, serta Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.63/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 24 November 2015 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Adapun tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kinerja para staf/personil di UPT yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melakukan pengelolaan tata persuratan naskah dinas hingga pada pengelolaan kearsipan lingkup Direktorat Jenderal KSDAE. Kegiatan ini dimulai dari pengelolaan surat masuk untuk segala klasifikasi, penyimpanan, pemindahan, dan pemusnahan arsip untuk menjamin tersedianya informasi (arsip) yang benar-benar bernilai guna dan efisiensi dan efektifitas pengelolaan arsip, serta memusnahkan arsip sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sosialisasi ini dilaksanakan di UPT lingkup Direktorat Jenderal KSDAE sebanyak 7 (tujuh) UPT yaitu BKSDA Sumatera Barat, BTN Siberut, BKSDA Kalimantan Barat, BKSDA Sulawesi Tengah, BBKSDA Jawa Timur, BTN Ujung Kulon dan BBKSDA Jawa Barat.

Pada pelaksanaan kegiatan ini tidak ditemukan kendala/permasalahan yang dapat menghambat dalam mencapai tujuan kegiatan dimaksud.

Alokasi anggaran yang digunakan dalam kegiatan ini sebesar Rp. 88.000.000,- dan realisasi dari anggaran tersebut sebesar Rp. 87.992.700,- (99,99%)

5) Pelaksanaan rumah tangga dan operasional pimpinan

Untuk mewujudkan ketertiban dan kelancaran kegiatan sehari-hari pimpinan, maka pada Sub Bagian Tata Usaha juga melaksanakan pelayanan rumah tangga pimpinan seperti perjalanan dinas, langganan surat kabar, majalah dll dan operasional pimpinan Ditjen KSDAE.

6) Pengelolaan Surat/Dokumen Dinas

Selain kegiatan tersebut di atas, Sub Bagian Tata Usaha melaksanakan kegiatan Pengelolaan Surat/Dokumen Dinas sebagai pendukung pelaksanaan kegiatan

ketatausahaan termasuk dalam proses penciptaan surat, penyortiran surat dan penyimpanan surat serta penggandaan dan distribusi surat.



Gambar 73. Log in Sistem Informasi Kearsipan



Gambar 74. Salah satu menu dalam Sistem Informasi Kearsipan

B. CAPAIAN RENSTRA 2015-2019 SAMPAI DENGAN TAHUN 2016

Sasaran : Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE

Sasaran tersebut hanya memiliki satu indikator kinerja. Pencapaian kinerja atas sasaran ini dilakukan dengan Indikator Kinerja (IK) sebagai berikut:

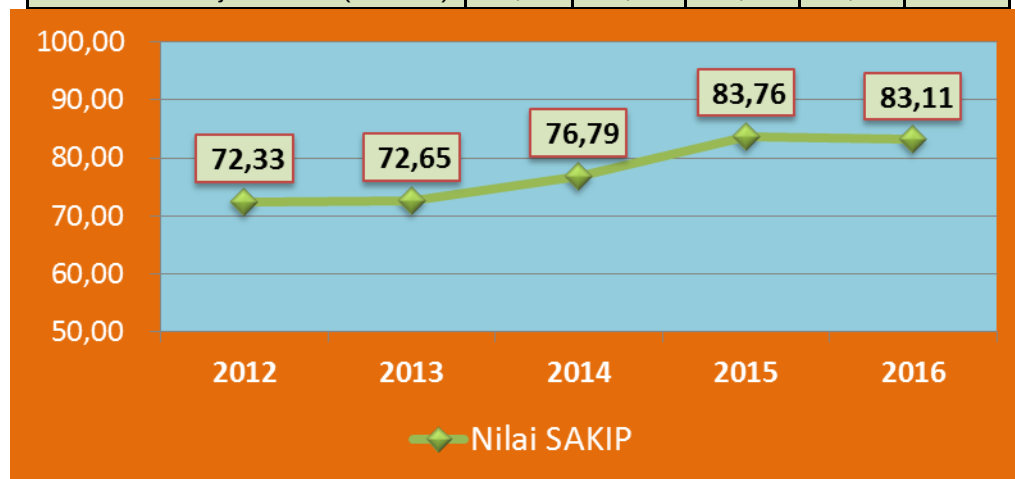
**Indikator Kinerja:
Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDAE minimal 77,25 poin**

Perbandingan Nilai SAKIP Ditjen PHKA (KSDAE) Tahun 2012-2016

Perbandingan Nilai SAKIP Ditjen PHKA (KSDAE) tahun 2015 dengan tahun sebelumnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 19. Nilai SAKIP Ditjen PHKA (KSDAE) Tahun 2012-2016

Indikator Kinerja Kegiatan	Realisasi				
	2012	2013	2014	2015	2016
Nilai SAKIP Ditjen PHKA (KSDAE)	72,33	72,65	76,79	83,76	83,11



Gambar 75. Peningkatan Nilai SAKIP Ditjen PHKA (KSDAE) Tahun 2012-2016

Nilai SAKIP Ditjen PHKA dan KSDAE terus mengalami peningkatan dari tahun 2012-2015, sedangkan pada tahun 2016 terjadi penurunan. Tercatat berturut-turut dari 2012 adalah 72,33 poin dan meningkat menjadi 72,65 poin di tahun 2013 atau terjadi peningkatan 0,44% dari tahun 2012. Selanjutnya pada tahun 2014 kembali meningkat menjadi 76,79 poin sedangkan pada tahun 2015 meningkat menjadi 83,76 poin atau meningkat sebesar 9,08% dari tahun 2014. Sedangkan pada tahun 2016 menurun sebesar 0,78% dari tahun 2015. Secara keseluruhan, tren nilai SAKIP Ditjen PHKA dan KSDAE meningkat. Peningkatan poin tersebut mengindikasikan bahwa kinerja Setditjen PHKA dan KSDAE selalu mengalami peningkatan dari tahun 2012-2015. Sedangkan penurunan nilai SAKIP Ditjen KSDAE tahun 2016 disebabkan karena ada beberapa kelemahan, antara lain dokumen PK Ditjen KSDAE 2016 belum selaras dengan Renstra Ditjen KSDAE 2015-2019.

Evaluasi dilaksanakan terhadap lima komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja, dan Capaian Kinerja. Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah tahun 2014 merupakan

salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Penetapan Kinerja (PK), serta dokumen terkait lainnya. Evaluasi implementasi SAKIP Setditjen PHKA (KSDAE) yang dilakukan oleh Tim Itjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dilakukan sesuai dengan Permen PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam peraturan tersebut, terdapat alokasi nilai setiap komponen dan sub komponen sebagaimana dalam tabel berikut.

Tabel 20. Alokasi Nilai Setiap Komponen dan Sub Komponen

No	Aspek	Bobot	Komponen dan Sub Komponen	
1	Perencanaan Kinerja	30%	a	Rencana Strategis (10%), meliputi: Pemenuhan Renstra (2%) dan Kualitas Renstra (5%) dan implementasi Renstra (3%)
			b	Perencanaan Kinerja Tahunan (20%), meliputi Pemenuhan RKT (4%), Kualitas RKT (10%) dan Implementasi RKT (6%)
2	Pengukuran Kinerja	25%	a	Pemenuhan pengukuran (5%)
			b	Kualitas pengukuran (12,5%)
			c	Implementasi pengukuran (7,5%)
3	Pelaporan Kinerja	15%	a	Pemenuhan pelaporan (3%)
			b	Kualitas pelaporan (7,5%)
			c	Pemanfaatan pelaporan (4,5%)
4	Evaluasi Internal	10%	a	Pemenuhan Evaluasi (2%)
			b	Kualitas evaluasi (5%)
			c	Pemanfaatan hasil evaluasi (3%)
5	Capaian Kinerja	20%	a	Kinerja yang dilaporkan (output) (5%)
			b	Kinerja yang dilaporkan (output) (10%)
			c	Kinerja tahun berjalan (benchmark) (5%)
	Total	100%		

Sumber: Permen PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015

Penyimpulan atas hasil revidi terhadap akuntabilitas kinerja instansi dilakukan dengan menjumlahkan angka tertimbang dari masing-masing komponen, sedangkan nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen akan dipergunakan untuk menentukan tingkat akuntabilitas instansi yang bersangkutan terhadap kinerjanya, dengan kategori sebagai berikut.

Tabel 21. Kategori Nilai Hasil Akhir Penilaian

No	Kategori	Nilai	Interpretasi
1	AA	>90-100	Sangat Memuaskan
2	A	>80 - 90	Memuaskan , Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel.
3	BB	>70 - 80	Sangat Baik , Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.
4	B	>60 - 70	Baik , Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.
5	CC	>50 - 60	Cukup (Memadai) , Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
6	C	>30 - 50	Kurang , Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.
7	D	0 - 30	Sangat Kurang , Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

Sumber: Permen PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015

Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100. Eselon I Ditjen KSDAE memperoleh nilai SAKIP sebesar 83,11 dengan kategori A (>80-90). Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkup Ditjen KSDAE, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Perencanaan Kinerja (30%), dengan nilai capaian 80,50% dan skor 24,15;
- b. Pengukuran Kinerja (25%), dengan nilai capaian 82,00% dan skor 20,46;
- c. Pelaporan Kinerja (15%), dengan nilai capaian 88,70% dan skor 13,30;
- d. Evaluasi Internal (10%), dengan nilai capaian 82,75% dan skor 8,28;
- e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi (20%), dengan nilai capaian 84,58% dan skor 16,92.

Berdasarkan hasil evaluasi ditemukan permasalahan yang menyangkut sistem akuntabilitas kinerja tahun 2015 lingkup Ditjen KSDAE, yaitu sebagai berikut :

a. Perencanaan Kinerja terdapat kelemahan yaitu:

- 1) Perencanaan Strategis
 - a) Kualitas Renstra, kelemahannya yaitu:
 - Indikator kinerja tujuan (outcome) dan sasaran (output) belum seluruhnya memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik, misalnya Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) tidak spesifik dan terukur sehingga target kinerja juga tidak dapat ditetapkan dengan baik;
 - Target kinerja belum seluruhnya ditetapkan dengan baik yaitu dokumen Renstra belum sepenuhnya mempertimbangkan realisasi capaian kinerja.
 - b) Implementasi Renstra, kelemahannya yaitu dokumen Renstra belum direviu secara berkala.
- 2) Perencanaan Kinerja Tahunan
 - a) Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan, kelemahannya yaitu:
 - Dokumen Rencana Kinerja Tahunan telah ada, namun target kinerja belum sepenuhnya mengacu pada Renstra dan belum ada penetapan oleh Direktorat Jenderal KSDAE;
 - Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) belum menyajikan target jangka pendek indikator kinerja;
 - Dokumen PK belum menyajikan Indikator Kinerja Program (IKP) sebagaimana IKP yang telah ditetapkan pada Renstra 2015-2019, yaitu 9 IKP yang ditetapkan pada Renstra, hanya 3 IKP yang dicantumkan pada dokumen PK.
 - b) Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan, kelemahannya yaitu :
 - Target kinerja belum ditetapkan dengan baik, dimana penetapan target kinerja belum sepenuhnya mempertimbangkan realisasi capaian kinerja;
 - Dokumen PK belum selaras dengan dokumen Renstra, khususnya terkait dengan penyajian IKP.
 - c) Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan, kelemahannya yaitu Rencana Aksi atas kinerja belum dimonitor pencapaiannya secara berkala.

b. Pengukuran Kinerja

- 1) Kualitas pengukuran kinerja, kelemahannya yaitu pengumpulan data kinerja belum dapat diandalkan, dimana masih terdapat satker-satker yang tidak menyampaikan data kinerja sebagai bahan pengukuran kinerja Eselon I;
- 2) Implementasi pengukuran kinerja, kelemahannya yaitu:

- a) IKP belum dimanfaatkan untuk penilaian kinerja;
 - b) IKP telah direviu secara berkala, ada upaya perbaikan namun belum ada perbaikan yang signifikan;
 - c) Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi belum digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala.
- c. Pelaporan Kinerja**
- 1) Penyajian informasi kinerja, kelemahannya yaitu informasi kinerja dalam LKj belum sepenuhnya dapat diandalkan karena terdapat indikator kinerja yang tidak spesifik dan terukur.
 - 2) Pemanfaatan informasi kinerja, kelemahannya yaitu:
 - a) Informasi kinerja belum seluruhnya digunakan sebagai perbaikan perencanaan;
 - b) Informasi kinerja belum seluruhnya digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi;
 - c) Informasi yang disajikan belum sepenuhnya dapat digunakan dalam perbaikan perencanaan antara lain dalam penyusunan rencana kerja tahunan maupun dalam penetapan kinerja yang disusun.
- d. Evaluasi Internal**
- 1) Kualitas evaluasi, kelemahannya yaitu:
 - a) Pemantauan dan evaluasi capaian kinerja belum memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan manajemen kinerja yang dapat dilaksanakan;
 - b) Evaluasi kinerja belum dilaksanakan menggunakan pedoman/juklak evaluasi yang selaras dengan ketentuan sehingga belum ada rekomendasi untuk perbaikan capaian kinerja.
- e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi**
- 1) Kinerja yang dilaporkan (output), kelemahannya yaitu target IKP tidak seluruhnya tercapai.

Selain output Nilai SAKIP Ditjen KSDAE 2015, Setditjen KSDAE juga mempunyai capaian beberapa output standar yaitu :

1. Output : Layanan Perkantoran

Pada output ini didukung oleh komponen :

- a. Gaji dan tunjangan
- b. Operasional perkantoran

Akibat adanya arahan *flat policy* dari Kementerian Keuangan yang mulai diberlakukan tahun anggaran 2011, penggunaan alokasi anggaran untuk komponen 002 (operasional perkantoran) sangat terbatas dan cenderung kurang terpenuhi. Dengan adanya kebijakan tersebut, maka setiap satuan kerja harus cermat mengalokasikan detail belanja sesuai dengan kebutuhan riil, yang didukung dengan data dan informasi memadai. Meskipun dengan alokasi anggaran yang sangat terbatas, pemenuhan kebutuhan sehari-hari perkantoran, langganan daya dan jasa, pemeliharaan kantor dan pembayaran yang terkait dengan pelaksanaan operasional perkantoran pada Tahun Anggaran 2016 secara agregat dapat terlaksana dengan efektif dan efisien.

2. Output : Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

Pada tahun anggaran 2016, untuk menjamin kinerja yang optimal dan dalam rangka pemenuhan kebutuhan sarana pengolah data dan komunikasi yang menunjang aktifitas administrasi umum sebuah instansi, Sekretariat Ditjen KSDAE melaksanakan kegiatan pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi sebanyak 48 unit. Akan

tetapi dalam perjalanannya, terdapat kebijakan self blocking, termasuk juga dalam output ini, keseluruhan anggaran di self blocking sehingga tidak dapat dilaksanakan.

3. Output : Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan sarana kelengkapan gedung perkantoran yang memadai dan layak serta untuk alokasi penggantian barang inventaris yang lama, Sekretariat Ditjen KSDAE mengadakan peralatan dan fasilitas perkantoran berupa sarpras perpustakaan di Bogor, sarpras ruang Sekretaris Ditjen KSDAE di Bogor, sarpras opsroom Ditjen KSDAE di Jakarta, sarpras ruang Bagian Program dan Evaluasi di Jakarta, sarpras ruang rapat Ditjen KSDAE di Bogor, dan sarpras ruang Bagian Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana di Bogor. Dalam pelaksanaannya, output ini telah dapat dilaksanakan dengan cukup baik, dari target 5 unit telah terealisasi 5 unit atau tercapai 100%.

Pagu Anggaran

Pagu anggaran Setditjen KSDAE tahun 2016 sebesar Rp. 62.969.134.000,-. Pagu tersebut berbeda dengan pagu yang ada pada dokumen Rencana Kerja Tahun 2016, hal tersebut terjadi karena pagu pada Dokumen Rencana Kerja Setditjen KSDAE sebesar Rp. 61.605.384.000,-, merupakan pagu indikatif, sedangkan pagu yang ditetapkan/pagu definitif pada DIPA Setditjen KSDAE sebesar Rp. 62.969.134.000,-.

Pagu Setditjen KSDAE mengalami revisi sebanyak 2 kali yaitu:

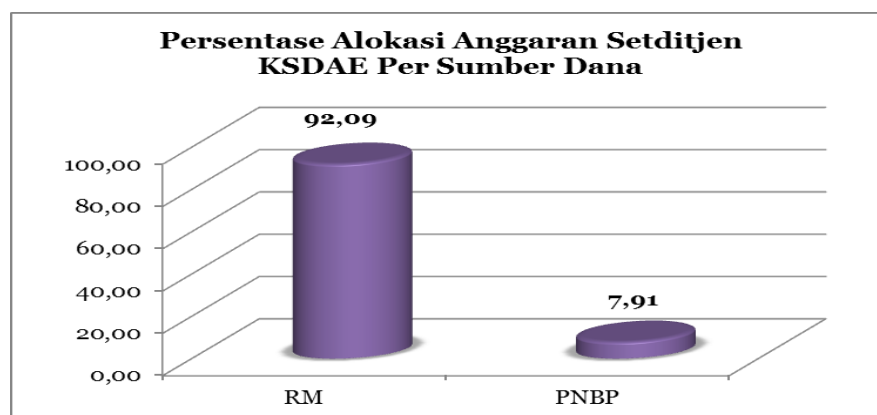
1. Revisi APBN-P I : Rp. 1.879.392.000,-
2. Revisi APBN-P II : Rp. 2.414.201.000,- (self blocking)

Jika pagu Setditjen KSDAE tahun 2016 dikurangi selfblocking maka menjadi sebesar Rp. 60.554.933.000,-.

Pagu anggaran Setditjen KSDAE Tahun 2016 berasal dari sumber dana Rupiah Murni (RM) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sebagian besar sumber pendanaan adalah dari RM (92,09%), rincian sumber pendanaan adalah sebagai berikut)

Tabel 22. Pagu Setditjen KSDAE Tahun 2016 Berdasarkan Sumber Dana

No	Sumber Dana	Rp.	%
1	RM	57.986.195.000	92,09
2	PNBP	4.982.939.000	7,91
	Jumlah	62.969.134.000	100

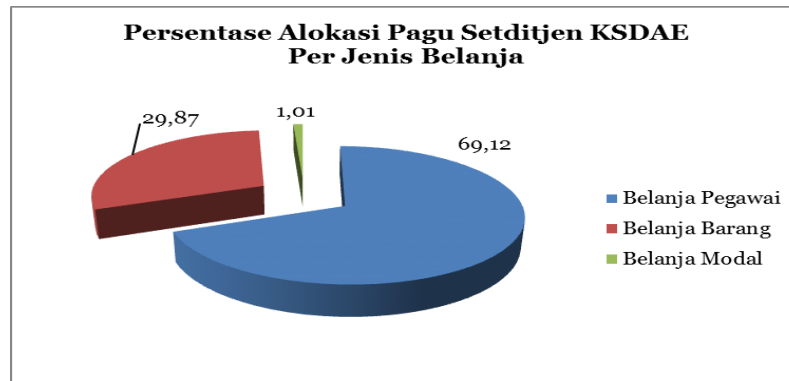


Gambar 76. Persentase Alokasi Pagu Setditjen KSDAE Per Sumber Dana

Sedangkan berdasarkan jenis belanja, pagu anggaran Setditjen terdiri dari tiga jenis belanja yaitu belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Alokasi belanja pegawai adalah yang paling besar yaitu sebesar 69,12%, dan yang terkecil adalah belanja modal (1,01%), rincian alokasi anggaran per jenis belanja sebagai berikut.

Tabel 23. Pagu Setditjen KSDAE Tahun 2016 Berdasarkan Jenis Belanja

No	Jenis Belanja	Rp.	%
1	Belanja Pegawai	43.522.801.000	69,12
2	Belanja Barang	18.810.157.000	29,87
3	Belanja Modal	636.176.000	1,01
	Jumlah	62.969.134.000	100,00



Gambar 77. Persentase Alokasi Pagu Setditjen KSDAE Per Jenis Belanja

Pada tahun 2016, Setditjen KSDAE melaksanakan empat output kegiatan sebagaimana tertuang dalam RKAKL Setditjen 2016, pagu anggaran berdasarkan output adalah sebagai berikut.

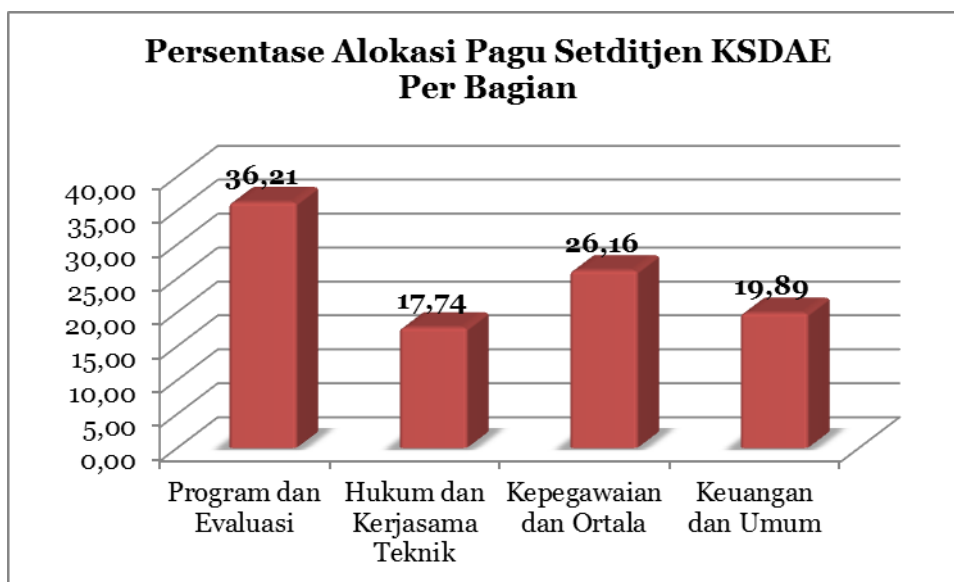
Tabel 24. Pagu Setditjen KSDAE Tahun 2016 Berdasarkan Output

Kode	Output	Pagu (Rp.)	%
5419.001	Nilai SAKIP Ditjen KSDAE	15.224.622.000	24,18
5419.994	Layanan Perkantoran	47.148.336.000	74,88
5419.996	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	476.176.000	0,76
5419.997	Peralatan dan fasilitas Perkantoran	120.000.000	0,19
	Jumlah	62.969.134.000	100,00

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa alokasi terbesar adalah pada output Layanan Perkantoran (74,88%), dimana output ini terdiri dari pembayaran gaji dan tunjangan, keperluan sehari-hari perkantoran, langganan daya dan jasa, pemeliharaan sarana prasarana, serta administrasi pelaksanaan operasional kantor. Sedangkan alokasi terendah adalah pada output Peralatan dan Fasilitas Perkantoran (0,19%). Anggaran pada output Nilai SAKIP Ditjen KSDAE dialokasikan pada empat bagian lingkup Setditjen KSDAE, dimana alokasi anggaran tertinggi adalah pada Bagian Program dan Evaluasi (36,21%), sedangkan yang terendah adalah pada Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik (17,74%). Rincian alokasi anggaran setiap Bagian pada output Nilai SAKIP Ditjen KSDAE adalah sebagai berikut.

Tabel 25. Alokasi Anggaran Per Bagian Lingkup Setditjen KSDAE

No	Bagian	Pagu (Rp.)	%
1	Program dan Evaluasi	5.512.960.000	36,21
2	Hukum dan Kerjasama Teknik	2.701.360.000	17,74
3	Kepegawaian dan Ortala	3.982.235.000	26,16
4	Keuangan dan Umum	3.028.067.000	19,89
	Jumlah	15.224.622.000	100,00



Gambar 78. Persentase Alokasi Pagu Setditjen KSDAE Per Jenis Belanja

Realisasi Anggaran

Sampai dengan akhir tahun 2016, realisasi anggaran Setditjen KSDAE adalah sebesar **Rp.58.012.729.136,-** atau sebesar **92,13%** jika dibandingkan dengan pagu Rp. 62.969.134.000,-. Berdasarkan sumber dana, realisasi tertinggi pada sumber dana RM (93,24%), sedangkan pada sumber dana PNPB terserap sebesar 79,20%. Rincian realisasi anggaran per sumber dana adalah sebagai berikut.

Tabel 26. Realisasi Setditjen KSDAE Tahun 2016 Berdasarkan Sumber Dana

No	Sumber Dana	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	RM	57.986.195.000	54.066.433.838	93,24
2	PNBP	4.982.939.000	3.946.295.298	79,20
	Jumlah	62.969.134.000	58.012.729.136	92,13

Realisasi anggaran Setditjen KSDAE berdasarkan jenis belanja, realisasi tertinggi adalah pada belanja pegawai (95,24%), sedangkan yang terendah pada belanja modal (18,69%). Realisasi yang rendah pada jenis belanja modal disebabkan karena ada satu output yang terkena *self blocking* yaitu output Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi sebesar Rp 476.176.000,-. Realisasi Setditjen KSDAE berdasarkan jenis belanja adalah sebagai berikut.

Tabel 27. Realisasi Setditjen KSDAE Tahun 2016 Berdasarkan Jenis Belanja

No	Jenis Belanja	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	Belanja Pegawai	43.522.801.000	41.449.391.781	95,24
2	Belanja Barang	18.810.157.000	16.444.427.355	87,42
3	Belanja Modal	636.176.000	118.910.000	18,69
	Jumlah	62.969.134.000	58.012.729.136	92,13

Berdasarkan output yang dilaksanakan, realisasi Setditjen KSDAE yang tertinggi adalah pada output Layanan Perkantoran (95,28%), untuk realisasi terendah adalah pada output Peralatan dan Fasilitas Perkantoran (66%). Sedangkan pada output Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi, pagu keseluruhan terkena self blocking sehingga tidak dapat dilaksanakan. Rincian realisasi anggaran berdasarkan output adalah sebagai berikut.

Tabel 28. Realisasi Setditjen KSDAE Tahun 2016 Berdasarkan Output

Kode	Output	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
5419.001	Nilai SAKIP Ditjen KSDAE	15.224.622.000	13.011.874.163	85,47
5419.994	Layanan Perkantoran	47.148.336.000	44.921.654.973	95,28
5419.996	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	476.176.000	-	0,00
5419.997	Peralatan dan fasilitas Perkantoran	120.000.000	79.200.000	66,00
	Jumlah	62.969.134.000	58.012.729.136	92,13

Anggaran pada output Nilai SAKIP Ditjen KSDAE dialokasikan pada setiap Bagian lingkup Setditjen KSDAE, dimana realisasi tertinggi adalah pada Bagian Program dan Evaluasi (88,86%), dan realisasi terendah adalah pada Bagian Keuangan dan Umum (80,48%). Rincian realisasi setiap bagian lingkup Setditjen KSDAE adalah sebagai berikut.

Tabel 29. Realisasi Per Bagian Lingkup Setditjen KSDAE Tahun 2016

No	Bagian	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	Bagian Program dan Evaluasi	5.512.960.000	4.898.711.852	88,86
2	Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik	2.701.360.000	2.272.727.118	84,13
3	Bagian Kepegawaian dan Ortala	3.028.067.000	2.437.069.339	80,48
4	Bagian Keuangan dan Umum	3.982.235.000	3.403.365.854	85,46
	Jumlah	15.224.622.000	13.011.874.163	85,47

Realisasi per Bagian lingkup Setditjen KSDAE dijabarkan menjadi realisasi setiap Sub Bagian, dimana realisasi tertinggi adalah pada Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan (98,57%), sedangkan realisasi terendah adalah pada Sub Bagian Data dan Informasi (74,00%). Rincian realisasi per Sub Bagian adalah sebagai berikut.

Tabel 30. Realisasi Per Sub Bagian Lingkup Setditjen KSDAE Tahun 2016

No	Bagian/Sub Bagian	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
A	Bagian Program Dan Evaluasi	5.512.960.000	4.898.711.852	88,86
1	Sub Bagian Program dan Anggaran	3.250.413.000	2.955.722.519	90,93
2	Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan	1.093.377.000	1.077.759.261	98,57
3	Sub Bagian Data dan Informasi	1.169.170.000	865.230.072	74,00
B	Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik	2.701.360.000	2.272.727.118	84,13
1	Sub Bagian Kerja Sama Teknik	921.325.000	763.282.262	82,85
2	Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan	895.550.000	775.117.056	86,55
3	Sub Bagian Pertimbangan dan Advokasi Hukum	884.485.000	734.327.800	83,02
C	Bagian Kepegawaian, Organisasi Dan Tata Laksana	3.028.067.000	2.437.069.339	80,48
1	Sub Bagian Administrasi Kepegawaian	1.081.577.000	973.272.274	89,99
2	Sub Bagian Administrasi Jabatan Fungsional	1.054.720.000	781.399.600	74,09
3	Sub Bagian Organisasi dan Tata Laksana	891.770.000	682.397.465	76,52
D	Bagian Keuangan Dan Umum	3.982.235.000	3.403.365.854	85,46
1	Sub Bagian Administrasi Keuangan	1.298.915.000	1.131.699.404	87,13
2	Sub Bagian Tata Usaha	1.332.200.000	964.632.052	77,20
3	Sub Bagian Perlengkapan	1.351.120.000	1.243.264.500	92,02
Jumlah		15.224.622.000	13.011.874.163	85,47

Realisasi Anggaran Dengan Pagu Dikurangi Self blocking (Blokir)

Pada tahun 2016, terdapat kebijakan dari Kementerian Keuangan agar setiap Kementerian/Lembaga melakukan penghematan mandiri (*self blocking*), berdasarkan Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: S.389/Menlhk/Setjen/Set-1/9/2016 tanggal 1 September 2016 perihal Self Blocking Anggaran KLHK TA. 2016 Tahap ke-2. Hampir seluruh Satker lingkup Ditjen KSDAE terkena *self blocking*, termasuk Sekretariat Ditjen KSDAE. Jumlah *self blocking* pada Setditjen KSDAE tahun 2016 adalah sebesar Rp. 2.414.201.000,- atau sebesar 3,83% dari keseluruhan pagu Setditjen KSDAE (Rp. 62.969.134.000,-). Adanya *self blocking* ini mempengaruhi besarnya persentase realisasi anggaran Setditjen KSDAE. Jika tanpa dikurangi *self blocking*, persentase realisasi anggaran sebesar 92,13%, maka setelah pagu dikurangi *self blocking*, persentase realisasi anggarannya menjadi sebesar **95,80%**. Realisasi Setditjen KSDAE tahun 2016 berdasarkan jenis belanja dengan pagu setelah dikurangi blokir adalah sebagai berikut.

Tabel 31. Realisasi Setditjen KSDAE Tahun 2016 Dengan Pagu Setelah Self Blocking Per Jenis Belanja

No	Jenis Belanja	Pagu (Rp.)	Blokir (Rp.)	Pagu Dikurangi Blokir (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	Belanja Pegawai	43.522.801.000	0	43.522.801.000	41.449.391.781	95,24
2	Belanja Barang	18.810.157.000	1.900.525.000	16.909.632.000	16.444.427.355	97,25
3	Belanja Modal	636.176.000	513.676.000	122.500.000	118.910.000	97,07
	Jumlah	62.969.134.000	2.414.201.000	60.554.933.000	58.012.729.136	95,80

Realisasi anggaran Setditjen KSDAE berdasarkan sumber dana dengan pagu dikurangi *self blocking*, realisasi tertinggi adalah pada sumber dana PNPB (97,31%), sedangkan sumber dana RM sebesar 95,69%. Rinciannya realisasi berdasarkan sumber dana adalah sebagai berikut.

Tabel 32. Realisasi Setditjen KSDAE Tahun 2016 Dengan Pagu Setelah Self Blocking Per Sumber Dana

No	Sumber Dana	Pagu (Rp.)	Blokir (Rp.)	Pagu Dikurangi Blokir (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	RM	57.986.195.000	1.486.778.000	56.499.417.000	54.066.433.838	95,69
2	PNPB	4.982.939.000	927.423.000	4.055.516.000	3.946.295.298	97,31
	Jumlah	62.969.134.000	2.414.201.000	60.554.933.000	58.012.729.136	95,80

Realisasi Setditjen KSDAE berdasarkan output dengan pagu dikurangi *self blocking*, realisasi tertinggi adalah pada output Nilai SAKIP Ditjen KSDAE (96,65%), sedangkan yang terendah adalah output Layanan Perkantoran (95,56%). Rinciannya realisasi berdasarkan output adalah sebagai berikut.

Tabel 33. Realisasi Setditjen KSDAE Tahun 2016 Dengan Pagu Setelah Self Blocking Per Output

Output	Pagu (Rp.)	Blokir (Rp.)	Pagu Dikurangi Blokir (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
Nilai SAKIP Ditjen KSDAE	15.224.622.000	1.761.790.000	13.462.832.000	13.011.874.163	96,65
Layanan Perkantoran	47.148.336.000	138.735.000	47.009.601.000	44.921.654.973	95,56
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	476.176.000	476.176.000	-	-	-
Peralatan dan fasilitas Perkantoran	120.000.000	37.500.000	82.500.000	79.200.000	96,00
Jumlah	62.969.134.000	2.414.201.000	60.554.933.000	58.012.729.136	95,80

Anggaran pada output Nilai SAKIP Ditjen KSDAE dialokasikan pada setiap Bagian lingkup Setditjen KSDAE. Realisasi per Bagian lingkup Ditjen KSDAE dengan pagu setelah dikurangi *self blocking*, realisasi tertinggi adalah pada Bagian Program dan Evaluasi (98,83%), sedangkan yang terendah adalah pada Bagian Keuangan dan Umum (92,60%). Rincian realisasi per Bagian lingkup Setditjen KSDAE adalah sebagai berikut.

Tabel 34. Realisasi Setditjen KSDAE Tahun 2016 Dengan Pagu Setelah Self Blocking Per Bagian

No	Bagian	Pagu (Rp.)	Blokir (Rp.)	Pagu Dikurangi Blokir (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	Bagian Program dan Evaluasi	5.512.960.000	556.418.000	4.956.542.000	4.898.711.852	98,83
2	Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik	2.701.360.000	356.050.000	2.345.310.000	2.272.727.118	96,91
3	Bagian Kepegawaian dan Ortala	3.028.067.000	542.572.000	2.485.495.000	2.437.069.339	98,05
4	Bagaian Keuangan dan Umum	3.982.235.000	306.750.000	3.675.485.000	3.403.365.854	92,60
	Jumlah	15.224.622.000	1.761.790.000	13.462.832.000	13.011.874.163	96,65

Realisasi Setditjen KSDAE per Sub Bagian, dengan pagu yang telah dikurangi *self blocking*, realisasi tertinggi adalah pada Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan (99,57%), sedangkan realisasi terendah adalah pada Sub Bagian Tata Usaha (85,08%). Rincian realisasi per Sub Bagian lingkup Ditjen KSDAE adalah sebagai berikut.

Tabel 35. Realisasi Setditjen KSDAE Tahun 2016 Dengan Pagu Setelah Self Blocking Per Sub Bagian

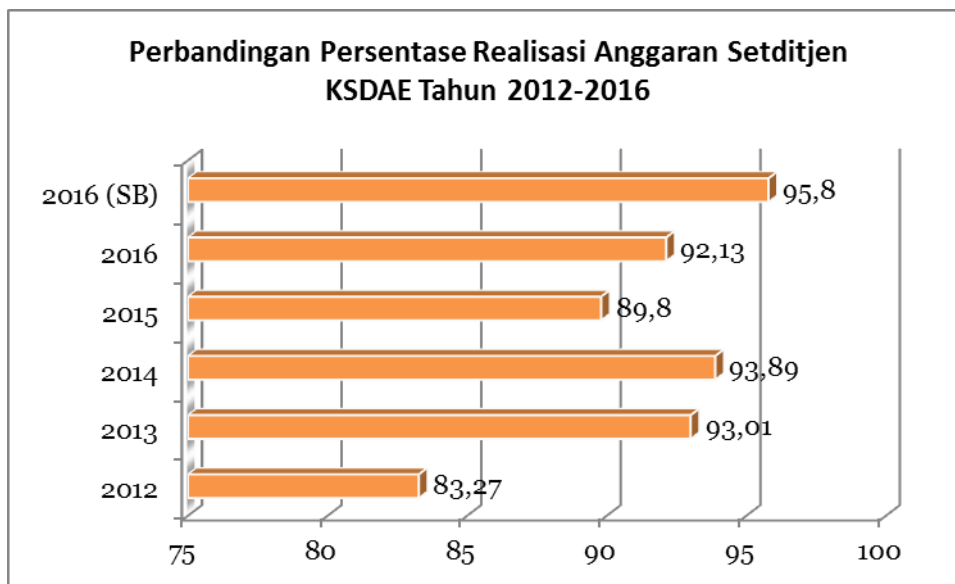
No	Bagian/Sub Bagian	Pagu (Rp.)	Blokir (Rp.)	Pagu Dikurangi Blokir (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
A	Bagian Program Dan Evaluasi	5.512.960.000	556.418.000	4.956.542.000	4.898.711.852	98,83
1	Sub Bagian Program dan Anggaran	3.250.413.000	252.168.000	2.998.245.000	2.955.722.519	98,58
2	Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan	1.093.377.000	11.000.000	1.082.377.000	1.077.759.261	99,57
3	Sub Bagian Data dan Informasi	1.169.170.000	293.250.000	875.920.000	865.230.072	98,78
B	Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik	2.701.360.000	356.050.000	2.345.310.000	2.272.727.118	96,91
1	Sub Bagian Kerja Sama Teknik	921.325.000	133.500.000	787.825.000	763.282.262	96,88
2	Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan	895.550.000	94.800.000	800.750.000	775.117.056	96,80
3	Sub Bagian Pertimbangan dan Advokasi Hukum	884.485.000	127.750.000	756.735.000	734.327.800	97,04
C	Bagian Kepegawaian, Organisasi Dan Tata Laksana	3.028.067.000	542.572.000	2.485.495.000	2.437.069.339	98,05
1	Sub Bagian Administrasi Kepegawaian	1.081.577.000	90.000.000	991.577.000	973.272.274	98,15
2	Sub Bagian Administrasi Jabatan Fungsional	1.054.720.000	256.720.000	798.000.000	781.399.600	97,92
3	Sub Bagian Organisasi dan Tata Laksana	891.770.000	195.852.000	695.918.000	682.397.465	98,06
D	Bagian Keuangan Dan Umum	3.982.235.000	306.750.000	3.675.485.000	3.403.365.854	92,60
1	Sub Bagian Administrasi Keuangan	1.298.915.000	138.500.000	1.160.415.000	1.131.699.404	97,53
2	Sub Bagian Tata Usaha	1.332.200.000	123.500.000	1.208.700.000	1.028.401.946	85,08
3	Sub Bagian Perlengkapan	1.351.120.000	44.750.000	1.306.370.000	1.243.264.500	95,17
	Jumlah	15.224.622.000	1.761.790.000	13.462.832.000	13.011.874.163	96,65

Perbandingan realisasi Setditjen KSDAE tahun 2012-2016 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 36. Pagu dan Realisasi Setditjen KSDAE Tahun 2012-2016

No.	Tahun	Pagu	Realisasi	
			Rp	%
1	2012	65.056.452.000	54.169.281.974	83,27
2	2013	64.929.705.000	60.393.056.721	93,01
3	2014	54.285.572.000	50.966.187.565	93,89
4	2015	40.701.911.000	36.551.645.696	89,8
5	2016	62.969.134.000	58.012.729.136	92,13
		60.554.933.000	58.012.729.136	95,80 *)

*) Realisasi dengan pagu yang telah dikurangi *self blocking*



Gambar 79. Perbandingan Persentase Realisasi Anggaran Setditjen KSDAE Tahun 2012-2016

Pada tahun 2016, realisasi Setditjen KSDAE mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2015, yaitu meningkat sebesar 2,59% (dibandingkan pagu awal). Sedangkan jika dibandingkan dengan pagu dikurangi *self blocking* peningkatannya sebesar 6,68%. Peningkatan ini disebabkan meningkatnya kinerja pengelolaan anggaran dengan struktur organisasi yang cukup mapan dibandingkan dengan tahun pertama pelaksanaan Renstra Setditjen 2015-2019. Dimana pada tahun 2015, terkendala adanya perubahan kelembagaan akibat dari penggabungan Kementerian Lingkungan Hidup dengan Kementerian Kehutanan menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

LAMPIRAN

Tabel Kerjasama Lingkup Ditjen KSDAE

NO	UPT	KERJASAMA			Lampiran PKS	Keterangan
		Aktif	Proses	Expired		
1	Kementerian LHK					Perlu diverifikasi
2	Direktorat Jenderal KSDAE					Perlu diverifikasi
3	Direktorat PIKA	-	-	-		Perlu diverifikasi
4	Direktorat KKH	-	-	-		Perlu diverifikasi
5	Direktorat KK	-	-	-		Sudah Update
6	Direktorat PJLHK	8	-	-		Sudah Update
7	Direktorat BPEE	-	-	-		Sudah Update
8	BKSDA Aceh	-	-	-		Belum Update
9	BTN Aketajawe Lolobata	-	-	-		Belum Update
10	BTN Alas Purwo	3	-	1		Sudah Update
11	BKSDA Ambon	-	-	-		Belum Update
12	BKSDA Bali	1	-	-		Sudah Update
13	BTN Bali Barat	5	3	-	Ada	Hardcopy
14	BTN Baluran	5	-	1		Hardcopy
15	BTN Bantimurung Bulusaraung	8	-	-		Sudah Update
16	BTN Batang Gadis	2	-	1		Softcopy
17	BKSDA Bengkulu	9	-	-		Hardcopy and Softcopy
18	BTN Berbak Sembilang	7	-	-	Ada	Hardcopy and Softcopy
19	BTN Bogani Nani Wartabone	-	-	-		Belum Update
20	BBTN Bromo Tengger Semeru	10	-	6	Ada	Hardcopy and Softcopy
21	BTN Bukit Baka Bukit Raya	-	-	-		Belum Update
22	BTN Bukit Barisan Selatan	15	2	-	Ada	Hardcopy and Softcopy
23	BTN Bukit Duabelas	1	-	-		Sudah Update
24	BTN Bukit Tigapuluh	6	-	-	Ada	Softcopy
25	BTN Bunaken	-	-	-		Belum Update
26	BTN Ciremai	3	-	2		Hardcopy
27	BBTN Betung kerihun dan Danau Sentarum	5	-	-		Sudah Update
28	BKSDA D.I Yogyakarta	4	8	-	Ada	Hardcopy and

						Softcopy
29	BKSDA DKI Jakarta	4	-	1	Ada	Hardcopy
30	BTN Halimun Salak	12	-	-		Sudah Update
31	BBTN Gunung Gede Pangrango	18	-	5		Sudah Update
32	BBTN Gunung Leuser	11	3	-		Hardcopy
33	BTN Gunung Merapi	6	-	-		Softcopy
34	BTN Gunung Merbabu	1	-	-		Belum Update
35	BTN Gunung Palung	-	-	-		Belum Update
36	BTN Gunung Rinjani	1	-	-		Belum Update
37	BTN Gunung Tambora	-	-	-		Belum Update
38	BKSDA Jambi	3	-	1	Ada	Hardcopy and Softcopy
39	BBKSDA Jawa Barat	12	-	11		Hardcopy and Softcopy
40	BKSDA Jawa Tengah	3	-	1		Softcopy
41	BBKSDA Jawa Timur	-	-	-		Belum Update
42	BKSDA Kalimantan Barat	-	-	-		Belum Update
43	BKSDA Kalimantan Selatan	-	-	-		Belum Update
44	BKSDA Kalimantan Tengah	9	4	-		Hardcopy
45	BKSDA Kalimantan Timur	5	-	8		Sudah Update
46	BTN Karimun Jawa	3	-	-	Ada	Hardcopy and Softcopy
47	BTN Kayan Mentarang	-	-	-		Belum Update
48	BTN Kelimutu	-	-	-		Belum Update
49	BTN Kepulauan Seribu	-	-	-		Belum Update
50	BTN Kepulauan Togean	-	-	-		Belum Update
51	BBTN Kerinci Seblat	-	-	-		Belum Update
52	BTN Komodo	4	-	-	Ada	Softcopy
53	BTN Kutai	-	-	-		Belum Update
54	BBTN Lore Lindu	6	1	-	Ada	Hardcopy and Softcopy
55	BTN Lorentz	-	-	-		Belum Update
56	BTN Manusela	1	-	-		Hardcopy
57	BTN Manupeu Tanah Daru dan Laiwangi Wanggameti	-	-	-		Belum Update
58	BTN Meru Betiri	2	-	-	Ada	Hardcopy
59	BKSDA Nusa Tenggara Barat	-	-	-		Belum Update
60	BBKSDA Nusa Tenggara Timur	5	8	1	Ada	Hardcopy and Softcopy
61	BBKSDA Papua	2	-	2		Hardcopy

62	BBKSDA Papua Barat	4	-	-		Sudah Update
63	BTN Rawa Aopa Watumohai	-	-	-		Belum Update
64	BBKSDA Riau	3	-	1		Hardcopy
65	BTN Sebangau	-	-	-		Belum Update
66	BTN Siberut	2	-	-		Sudah Update
67	BBKSDA Sulawesi Selatan	-	-	-		Belum Update
68	BKSDA Sulawesi Tengah	-	-	-		Belum Update
69	BKSDA Sulawesi Tenggara	6	-	-		Softcopy
70	BKSDA Sulawesi Utara	7	4	-		Softcopy
71	BKSDA Sumatera Barat	-	-	-		Belum Update
72	BKSDA Sumatera Selatan	5	11	-	Ada	Hardcopy and Softcopy
73	BBKSDA Sumatera Utara	11	-	-	Ada	Hardcopy and Softcopy
74	BTN Taka Bonerate	-	-	-		Belum Update
75	BTN Tanjung Puting	-	-	-		Belum Update
76	BBTN Teluk Cendrawasih	-	-	-		Belum Update
77	BTN Tesso Nilo	1	4	-	Ada	Hardcopy
78	BTN Ujung Kulon	11	-	-	Ada	Sudah Update
79	BTN Wasur	2	2	-	Ada	Sudah Update
80	BTN Wakatobi	1	1	-		Sudah Update
81	BTN Way Kambas	-	-	-		Belum Update
	Jumlah	253	51	42	346	

SURAT KEPUTUSAN DIRJEN TAHUN 2016.

NO	NOMOR SURAT KEPUTUSAN	PERIHAL	TANGGAL
1	SK.394/KSDAE/SET/ KSA.0/9/2016	Blok pengelolaan suaka margasatwa dataran tinggi yang, kabupaten probolinggo, kabupaten bondowoso dan kabupaten jember provinsi jawa timur	30 September 2016
2	SK.387/KSDAE/SET/ KSA.0/9/2016	Penataan zona taman nasional baluran kabupaten situbondo provinsi jawa timur	30 September 2016
3	SK.381/KSDAE/SET/ KSA.0/9/2016	Zonasi taman nasional bromo tengger semeru kabupaten pasuruan, kabupaten probolinggo kabupaten lumajang dan kabupaten malang provinsi jawa timur	30 September 2016
4	SK.380/KSDAE/SET/ KSA.0/9/2016	Blok pengelolaan cagar alam sungai kolbu iyang plateau, kabupaten situbondo kabupaten probolinggo dan kabupaten bondowoso provinsi jawa timur	30 September 2016
5	SK.379/KSDAE/SET/ KSA.0/9/2016	Blok pengelolaan taman wisata alam pulau satonda kabupaten dompu provinsi NTB	30 September 2016
6	SK.377/KSDAE/SET/ KSA.2/9/2016	Penetapan pusat pembinaan populasi suaka satwa maleo tambun pada desa pinonobatuan kecamatan dumoga timur kabupaten bolaang mongondow, provinsi Sulawesi utara	30 September 2016
7	SK.376/KSDAE/SET/ KSA.2/9/2016	Penetapan pusat pembinaan populasi suaka satwa maleo muara pusian pada desa pusian barat, kecamatan dumoga kabupaten bolaang mongondow provinsi utara	30 September 2016
8	SK.375/KSDAE/SET/ KSA.2/9/2016	Penetapan pusat pembinaan populasi suaka satwa maleo hungayono pada desa tulabolo, kecamatan suwawa timur kabupaten bone bolongo provinsi gorontalo	30 September 2016
9	SK.374/KSDAE/SET/ KSA.2/9/2016	Penetapan pusat konservasi dan breeding semi alami sebagai suaka satwa banteng pad ataman nasional baluran kabupaten situbondo, provinsi jawa timur	30 September 2016
10	SK.373/KSDAE/SET/ KSA.2/9/2016	Penetapan suaka satwa harimau sumatera pada desa batu nagger, kecamatan batang onang, kabupaten padang lawas, provinsi sumatera utara	30 September 2016
11	SK.370/KSDAE/SET/ KSA.1/9/2016	Rencana pengelolaan jangka panjang taman nasional bantimurung bulusaraung kabupaten maros provinsi Sulawesi selatan periode 2016-2025	30 September 2016
12	SK.366/KSDAE/SET/ KSA.0/9/2016	Blok pengelolaan cagar alam gunung butak, kabupaten rembang provinsi jawa tengah	30 September 2016
13	SK.364/KSDAE/SET/ KSA.1/9/2016	Rencana pengelolaan jangka panjang taman wisata alam gunung selok kabupaten cilacap, provinsi jawa tengah	30 September 2016
14	SK.363/KSDAE/SET/ KSA.0/9/2016	Zonasi taman nasional kelimutu, kabupaten ende, provinsi nusa tenggara timur	30 September 2016
15	SK.362/KSDAE/SET/ KSA.1/9/2016	REncana Pengelolaan jangka panjang taman nasional betung kerihun kabupaten Kapuas hulu provinsi Kalimantan barat periode 2016-2025	30 September 2016
16	SK.361/KSDAE/SET/ KSA.0/9/2016	Blok Pengelolaan Cagar Alam Tlogoranjeng, Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah	30 September 2016
17	SK.359/KSDAE/SET/ KSA.3/9/2016	Izin Usaha Pemanfaatan Air Skala Usaha Kecil CV. Jagaraga di Taman Nasional Gunung Ciremai, Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat	30 September 2016
18	SK.356/KSDAE/SET/ KSA.0/9/2016	Zonasi Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Kabupaten Bogor , Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Sukabumi provinsi Jawa Barat	30 September 2016

19	SK.355/KSDAE/SET/ KSA.0/9/2016	Blok Pengelolaan Taman Nasional Wisata Alam Gunung Melintang, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat	30 September 2016
20	SK.350/KSDAE/SET/ KSA.1/9/2016	Rencana Pengelolaan Jangka Panjang Cagar Alam Cagar Alam Donoloyo, Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah Periode 2016-2025	30 September 2016
21	SK.349/KSDAE/SET/ KSA.0/9/2016	Blok Pengelolaan Cagar Alam Donoloyo, Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah	30 September 2016
22	SK.348/KSDAE/SET/ KSA.0/9/2016	Blok Pengelolaan Taman Nasional Wisata Alam Baning, Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat	30 September 2016
23	SK.346/KSDAE/SET/ KSA.3/9/2016	Pembentukan Tim Penilai Permohonan Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi (IPJLPB) Tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan Yang Diajukan Atas Nama Kontrak Operasi Bersama (KOB) PT. Pertamina Geothermal Energy – PT. Indonesia Power Pada Zona Pemanfaatan Taman Nasional Gunung Halimun Salak	30 September 2016
24	SK.344/KSDAE/SET/ KSA.1/9/2016	Rencana Pengelolaan Jangka Panjang Taman Wisata Alam Pananjung Pangandaran, Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat Periode 2016-2025	30 September 2016
25	SK.343/KSDAE/SET/ KSA.0/9/2016	Blok Pengelolaan Taman Wisata Alam Teluk Lasolo, Kabupaten Konawe utara, Provinsi Sulawesi Tenggara	30 September 2016
26	SK.343/KSDAE/SET/ KSA.0/9/2016	Zonasi Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara	30 September 2016
27	SK.338/KSDAE/SET/ KSA.1/9/2016	Rencana Pengelolaan Jangka Panjang Taman Nasional Lore Lindu, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2016-2025	30 September 2016
28	SK.337/KSDAE/SET/ KSA.1/9/2016	Rencana Pengelolaan Jangka Panjang Taman Wisata Alam Punti Kayu Kotamadya Palembang, Provinsi Sumatera Selatan Periode 2016-2025	30 September 2016
29	SK.336/KSDAE/SET/ KUM.3/9/2016	Blok Pengelolaan Taman Wisata Alam Kepulauan Padamarang, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara	30 September 2016
30	SK.333/KSDAE/SET/ KSA.2/9/2016	Suaka Satwa Burung Paruh Bengkok Pada Desa Koli, Kecamatan Oba Kota Tidore kepulauan, Provinsi Maluku Utara	30 September 2016
31	SK.317/KSDAE/SET/ KSA.1/9/2016	Rencana Pengelolaan Jangka Panjang Suaka Margasatwa Paliyan Kabupaten Gunung Kidul Provinsi DIY Periode 2016-2025	27 September 2016
32	SK.316/KSDAE/SET/ KSA.1/9/2016	Rencana Pengelolaan Jangka Panjang Suaka Margasatwa Sermo Kabupaten Kulon Progo Provinsi DIY Periode 2016-2025	27 September 2016
33	SK.271/KSDAE/SET/ KSA.0/9/2016	Blok Pengelolaan Cagar Alam Muara Kendawangan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat	20 September 2016
34	SK.264/KSDAE/SET/ KSA.0/9/2016	Blok Pengelolaan Taman Wisata Alam Bukit Tangkiling Kotamadya Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah	20 September 2016
35	SK.261/KSDAE/SET/ KSA.0/9/2016	Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor SK. 97/KSDAE/SET/KSDAE.0/3/2016 Tentang Zonasi Taman Nasional Sebangau, Provinsi Kalimantan Tengah	16 September 2016
36	SK.258/KSDAE/SET/ KSA.0/9/2016	Blok Pengelolaan Taman Hutan Raya R. Soerjo Kabupaten Mojokerto, Pasuruan, Malang, dan Jombang Provinsi Jawa Timur	13 September 2016
37	SK.256/KSDAE/SET/	Blok Pengelolaan Cagar Alam Raya Pasi Kota	13 September 2016

	KSA.0/9/2016	Singkawang dan Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat	
38	SK.255/KSDAE/SET/ KSA.0/9/2016	Blok Pengelolaan Taman Nasional Kamojang Kabupaten Garut dan Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat	13 September 2016
39	SK.254/KSDAE/SET/ KSA.1/9/2016	Rencana Pengelolaan Jangka Panjang Taman Nasional Komodo Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2016-2025	13 September 2016
40	SK.251/KSDAE/SET/ KSA.3/9/2016	Pengesahaan Rencana Pengusahaan Pemanfaatan Air Skala Usaha Kecil Dengan Sarana Prasarana Seluas 468 M ² di TN Gunung Ciremai an. CV. Jagaraga	13 September 2016
41	SK.250/KSDAE/SET/ KSA.1/9/2016	Rencana Pengelolaan Jangka Panjang Suaka Margasatwa Cikepuh, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat Periode 2016-2025	13 September 2016
42	SK.249/KSDAE/SET/ KSA.0/9/2016	Blok pengelolaan taman wisata alam sungai liku kabupaten sambas, provinsi Kalimantan barat	13 September 2016
43	SK.245/KSDAE/SET/ KSA.0/8/2016	Blok pengelolaan cagar alam pulau saobi kabupaten sumenep, provinsi jawa timur	31 Agustus 2016
44	SK.239/KSDAE/SET/ KSA.1/8/2016	Rencana pengelolaan jangka panjang taman wisata alam ruteng, kabupaten manggarai timur rpvn nusa tenggara	29 Agustus 2016
45	SK.236/KSDAE/SET/ KSA.1/8/2016	Rencana pengelolaan jangka panjang cagar alam toffo kota lambu, kabupaten bima provinsi nusa tenggara barat periode 2016-2025	29 Agustus 2016
46	SK.221/KSDAE/SET/ KSA.3/7/2016	Pengesahan rencana pengusahaan pariwisata alam atas nama PT. joben evergreen pada zona pemanfaatan taman nasional gunung rinjani, kabupaten Lombok timur provinsi nusa tenggara barat jangka waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2070	29 Juli 2016
47	SK.233/KSDAE/SET/ KSA.3/8/2016	Penetapan areal pemanfaatan air dan energy air pada taman nasional manupeu tanah daru dan laiwangi wanggameti	16 Agustus 2016
48	SK.234/KSDAE/SET/KSA.3/ 8/2016	Penetapan pemanfaatan air dan energy air pada taman nasional bukit tiga puluh	16 Agustus 2016
49	SK.224/KSDAE/SET/KSA.0/ 7/2016	Blok pengelolaan suaka margasatwa paliyan, kabupaten gunung kidul, provinsi daerah istimewa yogyakarta	29 Juli 2016
50	SK.222/KSDAE/SET/KSA.0/ 7/2016	Blok pengelolaan suaka margasatwa sermo, kabupaten kulonprogo, provinsi daerah istimewa yogyakarta	
51	SK.213/KSDAE/SET/KSA.0/ 7/2016	Blok pengelolaan cagar alam gunung sojol, kabupaten donggala kabupaten parigi mouton dan kabupaten tolitoli, provinsi Sulawesi tengah	20 Juli 2016
52	SK.210/KSDAE/SET/KUM.1 /7/2016	Blok pengelolaan taman wisata alam peleaihari kabupaten tanah laut, provinsi Kalimantan selatan	20 Juli 2016
53	SK.208/KSDAE/SET/KSA.0/ 7/2016	Blok pengelolaan taman wisata alam ruteng, kabupaten manggarai dan manggarai timur, provinsi nusa tenggara timur	20 Juli 2016
54	SK.205/KSDAE/SET/KSA.0/ 7/2016	Zonasi taman nasional gunung rinjani, kabupaten Lombok barat, Lombok tengah dan Lombok timur provinsi nusa tenggara barat	20 Juli 2016
55	SK.201/KSDAE/SET/KUM.1 /7/2016	Blok pengelolaan suaka margasatwa padang sugihan, kabupaten banyuasin dan kabupaten ogan komering ilir, provinsi sumatera selatan	20 Juli 2016
56	SK.199/KSDAE/SET/KUM.0 /7/2016	Blok pengelolaan suaka margasatwa dangku, kabupaten musi banyuasin, provinsi sumatera selatan	20 Juli 2016
57	P.3/KSDAE/SET/KSA.1/7/2 016	Petunjuk teknis operasional kesatuan KPHK	20 Juli 2016

58	SK.200/KSDAE/SET/KSA.3/7/2016	Tim penilai permohonan izin pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi tahap eksploitasi dan pemanfaatan atas nama kontrak operasi bersama pertamina- chevron geothermal salak, Ltd. Pada zona pemanfaatan taman nasional gunung halimun salak	20 Juli 2016
59	SK.198/KSDAE/SET/KSA.0/7/2016	Blok pengelolaan suaka margasatwa bentayan, kabupaten musi banyuasin dan kabupaten banyuasin, provinsi sumatera selatan	20 Juli 2016
60	SK.192/KSDAE/SET/KUM.0/7/2016	Blok pengelolaan taman wisata alam puti kayu kotamadya Palembang, provinsi sumatera selatan	1 Juli 2016
61	SK.191/KSDAE/SET/KSA.0/7/2016	Penataan blok taman wisata alam grojogan sewu, kabupaten karang anyar, provinsi jawa tengah	1 Juli 2016
62	SK.190/KSDAE/SET/KUM.1/7/2016	Pembentukan panitia kegiatan road to HKAN 2016 dalam rangka peringatan hari konservasi alam nasional tahun 2016	1 Juli 2016
63	SK.189/KSDAE/SET/KSA.0/6/2016	Tim adhoc penyusunan perencanaan terpadu pembangunan sarana prasarana pariwisata alam taman wisata alam kawah ijen yang terletak di datu II banyuwangi dan bondowoso provinsi jawa timur	1 Juli 2016
64	SK.188/KSDAE/SET/KSA.3/7/2016	Penetapan areal pemanfaatan air dan energy air pada taman nasional gunung palung	1 Juli 2016
65	SK.187/KSDAE/SET/KSA.2/6/2016	Panitia pelaksanaan the fifth of the asean heritage parks committee meeting	30 Juni 2016
66	SK.183/KSDAE/SET/KUM.1/6/2016	Tim sekretariat kegiatan dan evaluasi biodiversity conservation and climate protection in the gunung leuseur ecosystem	29 Juni 2016
67	SK.180/KSDAE/SET/KSA.0/6/2016	Blok pengelolaan suaka margasatwa bukit batu, kabupaten bengkalis, provinsi	23 Juni 2016
68	SK.179/KSDAE/SET/KSA.0/6/2016	Blok pengelolaan suaka margasatwa gunung tunggahan, kabupaten sragen, provinsi jawa tengah	23 Juni 2016
69	SK.178/KSDAE/SET/KSA.0/6/2016	Blok pengelolaan taman wisata alam sumber semen, kabupaten rembang, provinsi jawa tengah	23 Juni 2016
70	SK.170/KSDAE/SET/KSA.0/6/2016	Blok pengelolaan suaka margasatwa kerumutan, provinsi kabupaten pelalawan dan kabupaten Indragiri hulu, provinsi riau	15 Juni 2016
71	SK.168/KSDAE/SET/KSA.0/6/2016	Rencana pengelolaan jangka panjang suaka margasatwa muara angke, kota madya Jakarta utara, provinsi daerah khusus ibukota Jakarta periode 2016-2025	13 Juni 2016
72	SK.167/KSDAE/SET/KSA.0/6/2016	Blok pengelolaan taman wisata alam lembah harau, kabupaten lima puluh kota, provinsi sumatera barat	13 Juni 2016
73	SK.166/KSDAE/SET/KSA.0/6/2016	Blok pengelolaan cagar alam pulau mas popaya raya, kabupaten gorontalo utara, provinsi gorontalo	13 Juni 2016
74	SK.165/KSDAE/SET/KSA.0/6/2016	Blok pengelolaan taman wisata alam rimbo panti kabupaten pasaman, provinsi sumatera barat	13 Juni 2016
75	SK.164/KSDAE/SET/KSA.3/6/2016	Penetapan areal pemanfaatan air dan energy air pada taman nasional laiwangi wanggameti	13 Juni 2016
76	SK.161/KSDAE/SET/KUM.1/6/2016	Penetapan areal pemanfaatan air dan energy air pada taman nasional bogani nani wartabone	9 Juni 2016
77	SK.160/KSDAE/SET/KSA.1/6/2016	National project director transforming effectiveness of biodiversity conservation in priority sumatera landscapes	9 Juni 2016
78	SK.159/KSDAE/SET/KSA.0/6/2016	Zonasi taman nasional bukit tiga puluh provinsi riau dan provinsi jambi	9 Juni 2016
79	SK.162/KSDAE/SET/KSA.0/6/2016	Blok pengelolaan taman wisata alam kepulauan banyak, kabupaten aceh singkil, provinsi aceh	9 Juni 2016

80	SK.154/KSDAE/SET/KSA.2/5/2016	Pembentukan tim pemeriksaan stok kulit reptil	30 Mei 2016
81	SK.221/KSDAE/SET/KSA.3/7/2016	Pengesahan rencana pengusahaan pariwisata alam atas nama PT. Joben evergreen pada zona pemanfaatan taman anasional gunung rinjani, kabupaten Lombok timur, provinsi nusa tenggara barat, jangka waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2070	29 Juli 2016
82	SK.220/KSDAE/SET/KSA.1/7/2016	Pembentukan kelompok kerja smart untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan kawasan konservasi	29 Juli 2016
83	SK.150/KSDAE/SET/KSA.1/5/2016	Penetapan Efektifitas Pengelolaan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru	20 Mei 2016
84	SK.144/KSDAE/SET/KSA.0/5/2016	Blok Pengelolaan Taman Wisata Alam Anke Kapuk, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	18 Mei 2016
85	SK.143/KSDAE/SET/KSA.0/5/2016	Blok Pengelolaan Cagar Alam Pulau Bokor, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	18 Mei 2016
86	SK.142/KSDAE/SET/KSA.0/5/2016	Blok Pengelolaan Margasatwa Pulau Rambut, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	18 Mei 2016
87	SK.141/KSDAE/SET/KSA.0/5/2016	Blok Pengelolaan Taman Wisata Alam Tanjung Keluang, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah	18 Mei 2016
88	SK.140/KSDAE/SET/KSA.0/5/2016	Blok Pengelolaan Suaka Margasatwa Muara Angke, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta	18 Mei 2016
89	SK.139/KSDAE/SET/KUM.3/5/2016	Tim pendamping kegiatan kerjasama pelaksanaan Indonesia-japan project for development of REDD+IMPLEMENTATION MECHANISM (IJ+REDD+)	17 Mei 2016
90	SK.138/KSDAE/SET/KSA.1/5/2016	Rencana pengelolaan jangka panjang suaka margasatwa pulau rambut, kabupaten administrasi kepulauan seribu, provinsi daerah khusus ibukota Jakarta periode 2016-2025	13 Mei 2016
91	SK.137/KSDAE/SET/KSA.1/5/2016	Penunjukan Asisten Tenaga Ahli Bidang Alam dalam Word Heritage Committee-Unesco	13 Mei 2016
92	SK.134/KSDAE/SET/KSA.0/5/2016	Blok pengelolaan taman wisata alam danau sicikeh-cikeh, kabupaten dairi dan kabupaten pakpak bharat, provinsi sumatera utara	12 Mei 2016
93	SK.133/KSDAE/SET/KSDA.1/5/2016	Pembentukan Kelompok Kerja Bimbingan teknis dan Pengawasan Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi	2 Mei 2016
94	SK.130/KSDAE/SET/KSA.2/4/2016	Tim penyiapan bahan conference of the parties convention on biological diversity	29 April 2016
95	SK.129/KSDAE/SET/KSA.2/4/2016	Tim penyiapan IUCN word conservation congress 2016	29 April 2016
96	SK.128/KSDAE/SET/KSA.2/4/2016	Tim penyiapan conference of the parties convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora	29 April 2016
97	SK.127/KSDAE/SET/KSA.2/4/2016	Perubahan atas keputusan direktur jenderal KSDAE nomor SK. 270/KSDAE-KKH/2015 tentang pembentukan dewan pengarah proyek (Project Board) Enhancing Protected Area In Sulawesi (E-Pass) for Biodiversity conservation	21 April 2016
98	SK.124/KSDAE/SET/KSA.1/4/2016	Rencana pengelolaan jangka panjang taman wisata alam angke kapuk, kotamadya Jakarta utara provinsi daerah khusus ibukota Jakarta periode 2016-2025	21 April 2016
99	SK.123/KSDAE/SET/KSA.1/4/2016	Rencana pengelolaan jangka panjang cagar alam pulau bokor provinsi daerah khusus ibukota Jakarta periode	21 April 2016

		2016-2025	
100	SK.122/KSDAE/SET/KSA.4/4/2016	Pembentukan kelompok kerja fasilitas pembentukan kelembagaan pengelola koridor hidupan liar bentang alam wehea-kelay di kabupaten kutai timur dan kabupaten berau, provinsi Kalimantan timur	21 April 2016
101	SK.109/KSDAE/SET/KSA.0/4/2016	Zonasi Taman Nasional Gunung Palung, Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat	11 April 2016
102	SK.107/KSDAE/SET/KSA.1/4/2016	Penetapan lokasi desa binaan dan pendampingan pada daerah penyangga kawasan konservasi	7 April 2016
103	SK.106/KSDAE/SET/KSA.4/4/2016	Pembentukan kelompok kerja penyusunan norma, standard an prosedur kegiatan pedoman pengelolaan koridor hidupan liar	7 April 2016
104	SK.103/KSDAE/SET/KSDAE.2/3/2016	Penetapan areal pemanfaatan air dan energy air pada taman wisata alam danau matano	30 Maret 2016
105	SK.102/KSDAE/SET/KSDAE.2/3/2016	Penetapan kuota tangkap ikan arwana irian provinsi papua tahun 2016	29 Maret 2016
106	SK.101/KSDAE/SET/KSDAE.2/3/2016	Rencana produksi satwa liar hasil penangkaran tahun 2016	28 Maret 2016
107	SK.100/KSDAE/SET/KSDAE.2/3/2016	Penetapan tim teknis penancangan gerakan nasional penyelamatan tumbuhan dan satwa liar	28 Maret 2016
108	SK.97/KSDAE/SET/KSDAE.0/3/2016	Zonasi taman nasional sebangau, provinsi Kalimantan tengah	24 Maret 2016
109	SK.96/KSDAE/SET/KSDAE.0/3/2016	Blok pengelolaan taman wisata alam laut tujuh belas pulau, kabupaten ngada, provinsi nusa tenggara timur	24 Maret 2016
110	SK.95/KSDAE/SET/KSDAE.3/3/2016	Blok pengelolaan taman wisata alam laut teluk maumere, kabupaten sikka, provinsi nusa tenggara timur	22 Maret 2016
111	SK.94/KSDAE/SET/KSDAE.0/3/2016	Blok pengelolaan taman wisata alam baumata, kabupaten kupang, provinsi nusa tenggara timur	22 Maret 2016
112	SK.83/KSDAE/SET/KSDAE.0/3/2016	Blok pengelolaan taman wisata alam menipo, kabupaten kupang, provinsi	14 Maret 2016
113	SK.79/KSDAE/SET/KSDAE.2/3/2016	Penetapan tim secretariat komisi keamanan hayati produk rekayasa genetik	14 Maret 2016
114	SK.78/KSDAE/SET/KSDAE.0/3/2016	Blok pengelolaan taman wisata alam camplong, kabupaten kupang, provinsi nusa tenggara timur	14 Maret 2016
115	SK.59/KSDAE/SET/KUM.1/2/2016	Perubahan atas keputusan DIRJEN KSDAE Nomor SK.24/KSDAE/SET/KUM.1/2/2016 tentang TIM PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK RANCANGAN uu PENYEMPURNAAN uu Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem	22 Februari 2016
116	SK.55/KSDAE/SET/KSDAE/0/2/2016	Blok pengelolaan cagar alam gunung ambang, provinsi Sulawesi utara	19 Februari 2016
117	SK.54/KSDAE/SET/KSDAE/0/2/2016	Blok pengelolaan taman wisata alam telaga patengan, kabupaten bogor dan cianjur, provinsi jawa barat	
118	SK.50/KSDAE/SET/KSDAE.0/2/2016	Blok pengelolaan cagar alam gunung lokon, kabupaten minahasa dan kota tomohon, provinsi Sulawesi utara	16 Februari 2016
119	SK.46/KSDAE/SET/KSDAE.2/2/2016	Blok pengelolaan taman hutan raya banten kabupaten pendeglang, provinsi banten	12 Februari 2016
120	SK.42/KSDAE/SET/KSDAE.0/2016	Blok pengelolaan suaka margasatwa manembo-nembo, kabupaten minahasa dan kabupaten minahasa selatan, provinsi Sulawesi utara	11 Februari 2016
121	SK.41/KSDAE/SET/KSDAE.0/2016	Blok pengelolaan taman wisata alam gunung batur bukit paying, kabupaten bangle, provinsi bali	11 Februari 2016
122	SK.39/KSDAE/SET/KSDAE.0	Blok pengelolaan cagar alam tanjung panjang,	11 Februari 2016

	/2/2016	kabupaten pohuwato, provinsi gorontalo	
123	SK.38/KSDAE/SET/KSDAE.0 /2/2016	Blok pengelolaan taman wisata alam pulau weh, kota sabang, provinsi aceh	11 Februari 2016
124	SK.37/KSDAE/SET/KSDAE.0 /2/2016	Zonasi taman nasional gunung merapi, kabupaten magelang, kabupaten boyolali, kabupaten klaten, provinsi jawa tengah dan kabupaten sleman, provinsi daerah istimewa yogyakarta	11 Februari 2016
125	SK.35/KSDAE/SET/KSDAE.0 /2/2016	Blok pengelolaan taman wisata alam telaga warna dan taman wisata alam jember, kabupaten bogor dan cianjur, provinsi jawa barat	9 Februari 2016
126	SK.34/KSDAE/SET/KSDAE.0 /2/2016	Blok Pengelolaan taman wisata telogo Warno/telogo pengilon kabupaten wonosobo, provinsi jawa tengah	9 Februari 2016
127	SK.33/KSDAE/SET/KSDAE.0 /2/2016	Kelompok kerja penilaian rancangan dan rencana penataan zona atau blok kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam	9 Februari 2016
128	SK.32/KSDAE/SET/KSDAE.0 /2/2016	Zonasi taman nasional bogani nani wartabone, provinsi gorontalo dan provinsi Sulawesi utara	9 Februari 2016
129	SK.24/KSDAE/SET/KUM.1/ 2/2016	Tim penyusunan naskah akademik rancangan undang-undang penyempurnaan undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya	3 Februari 2016
130	SK.23/KSDAE/SET/KSDAE.0 /2/2016	Blok pengelolaan cagar alam durian luncuk I dan cagar alam durian luncuk II, kabupaten sarolangun dan kabupaten Batanghari, provinsi jambi	27 Januari 2016
131	SK.17/KSDAE/SET/KSDAE.3 /1/2016	Blok pengelolaan cagar alam dua saudara, kota bitung, provinsi Sulawesi utara	22 Januari 2016
132	SK.15/KSDAE/SET/KSDAE.3 /1/2016	Perubahan penetapan areal pemanfaatan air dan energy air pad ataman nasional bukit barisan selatan	22 Januari 2016
133	SK.14/KSDAE/SET/KSDAE.3 /1/2016	Penetapan areal pemanfaatan air dan energy air pad ataman nasional lore lindu	20 January 2016
134	SK.13/KSDAE/SET/KSDAE.0 /1/2016	Blok pengelolaan cagar alam hutan bakau pantai timur, kabupaten jabung barat dan kabupaten jabung timur, provinsi jambi	22 Januari 2016